

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Vol. 6 No. 01 September - Desember 2016

ISSN 2089 - 0338
E-ISSN 2502-7921

- FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN PENYEBAB PERILAKU AGRESIF REMAJA DI PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BANDUNG

Badrun Susantyo

- REHABILITASI SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT BAGI KORBAN MENYALAHGUNAAN NAPZA DI YOGYAKARTA

Gunawan

- PENGARUH DUKUNGAN ORGANISASI DAN KEMAMPUAN INDIVIDU TERHADAP KINERJA PENYULUH SOSIAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Subhan Kadir, Sunarru Samsi Hariadi, dan Subejo

- PERAN TARUNA SIAGA BENCANA DALAM MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN SERANG DAN SUKABUMI

Aulia Rahman

- PENGEMBANGAN KETERAMPILAN SOSIAL DAN KEWIRAUSAHAAN PADA ORGANISASI PEMUDA KEAGAMAAN DI DEPOK

Sari Viciawati Machdum, Kania Saraswati Harisoesyanti, Ni Luh Putu Agastya, Getar Hati, Lucky Kusuma Wardani, dan Sri Daryanti

- PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM PERSPEKTIF INDEKS KEPUASAN PUBLIK DI RIAU

Meyzi Heriyanto, Adianto dan Hasim As'ari

- INTEGRASI SOSIAL DI PERDESAAN: KETERKAITAN KAWASAN TRANSMIGRASI DENGAN DESA-DESA SEKITAR

Widarjanto dan Slamet Rahmat Topo Susilo

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

SOSIOKONSEPSIA	Volume 6	Nomor 01	Halaman 1 - 122	Jakarta Desember 2016	ISSN 2089 - 0338
----------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------------	---------------------



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

ISSN 2089-0338, E-ISSN 2502-7921
Volume 6 Nomor 1 September – Desember 2016

Sebuah Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial menyajikan karangan ilmiah dalam bentuk hasil penelitian bidang kesejahteraan sosial. Terbit setahun tiga kali periode April, Agustus, dan Desember.

SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mulai terbit Vol 1 No. 1 September - Desember 2011, merupakan kelanjutan dari “Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial” yang terbit pertama kali Vol 1 No. 1 Januari 1995 sampai dengan Vol 16 No. 2 Mei - Agustus 2011. Terhitung mulai edisi Vol 5 No.2 Januari - April 2016 Jurnal Ilmiah "SOSIO KONSEPSIA" menggunakan *Open Journal System (OJS)*. Penulis yang akan mengajukan naskahnya untuk dimuat di Sosio Konsepsia melakukan pengiriman naskah melalui *Open Journal System (OJS)*: <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>

Edisi cetak diterbitkan oleh
P3KS Press bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI

Mitra Bestari/Peer Reviewers

1. Prof. Adi Fahrudin, Ph.D. *Praktek dan Pendidikan Pekerjaan Sosial, Psikososial, dan Disaster Management (Universitas Muhammadiyah Jakarta)*
2. Prof. Irwanto, Ph.D. *Psikologi, Perkembangan Anak dan Studi Keluarga, HIV/AIDS, Disabilitas (Universitas Atmajaya Jakarta)*
3. Prof. Isbandi Rukminto Adi, M.Kes, Ph.D *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (Universitas Indonesia)*
4. Prof. Zulkarnain Ahmad Hatta, DSW *Pekerjaan Sosial, Kebijakan Sosial (Universiti Sains Malaysia)*
5. Binahayati Rusyidi, MSW, Ph.D *Program dan Kebijakan Kesejahteraan Sosial, Gender Based Violence, Perlindungan Anak, Etika Praktek Kesejahteraan Sosial, Etika Penelitian (Universitas Pajajaran Bandung)*
6. Bagus Aryo, Ph.D. *Kesejahteraan Sosial, Kebijakan Sosial dan Pembangunan, Microfinance (Universitas Indonesia)*
7. DR. Bambang Rudito *Antropologi, Interkultural, Corporate Social Responsibility (Institut Teknologi Bandung)*

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Editor

Drs. Suradi, M.Si

Editor Bagian

1. Drs. Setyo Sumarno, M.Si
2. Dra. Indah Huruswati, M.Si
3. Drs. Nurdin Widodo, M.Si
4. Drs. B. Mujiyati, M.SW
5. Drs. Muhtar, M.Si
6. DR. Hari Harjanto Setiawan
7. Badrun Susantyo, Ph.D (**Copy Editor**)
8. Habibullah, S.Sos, M.Kesos (**Editor Layout**)

Manager Jurnal/Copy Editor

Irmayani, SH, M.Si

Proofreader

Ivo Noviana, S.Sos, M.Si

Alamat

Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur 13630 Telp. (021) 8017146, Fax (021) 8017126
Email : sosiokonsepsia@gmail.com Website: puslit.kemsos.go.id
Ejournal: <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Volume 6, No. 01, September - Desember 2016

ISSN 2089-0338, E-ISSN 2502-7921

DAFTAR ISI	HALAMAN
■ PENGANTAR REDAKSI	I
■ Faktor-Faktor Determinan Penyebab Perilaku Agresif Remaja di Permukiman Kumuh di Kota Bandung Badrun Susantyo	1 - 17
■ Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat bagi Korban Menyalahgunaan Napza di Yogyakarta Gunawan	18 - 38
■ Pengaruh Dukungan Organisasi dan Kemampuan Individu Terhadap Kinerja Penyuluh Sosial dan Partisipasi Masyarakat Subhan Kadir, Sunarru Samsi Hariadi, dan Subejo	39 - 55
■ Peran Taruna Siaga Bencana dalam Mitigasi Bencana di Kabupaten Serang dan Sukabumi Aulia Rahman	56 - 74
■ Pengembangan Keterampilan Sosial dan Kewirausahaan pada Organisasi Pemuda Keagamaan di Depok Sari Viciawati Machdum et.al, Kania Saraswati Harisoesyanti, Ni Luh Putu Agastya, Getar Hati, Lucky Kusuma Wardani, dan Sri Daryanti	75 - 89
■ Program <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam Perspektif Indeks Kepuasan Publik di Riau Meyzi Heriyanto, Adianto dan Hasim As'ari	90 - 109
■ Integrasi Sosial di Perdesaan: Keterkaitan Kawasan Transmigrasi dengan Desa-Desa Sekitar Widarjanto dan Slamet Rahmat Topo Susilo	110 - 121

PENGANTAR REDAKSI

Pada Vol 6 Nomor 1 Tahun 2016 ini, SOSIO KONSEPSIA menyajikan artikel yang menarik, terkait dengan agresifitas remaja, penyalahgunaan napza, penyuluhan sosial, peran Tagana, peran organisasi kepemudaan, peran dunia usaha dan integrasi sosial.

Perilaku agresif remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor diterminan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi perilaku agresif remaja, yaitu keluarga/orang tua, rekan sebaya, lingkungan sosial/tetangga, media massa dan kondisi internal. Dari sejumlah faktor tersebut, faktor rekan sebaya merupakan faktor yang tidak dominan atau berpengaruh signifikan terhadap perilaku agresif remaja.

Selain cenderung berperilaku agresif, remaja juga berpotensi untuk menjadi korban penyalahgunaan napza. Di Yogyakarta tercatat prevalensi penyalahgunaan napza sebesar 2,8 persen dari jumlah penduduk. Terkait dengan penyalahgunaan napza, telah dikembangkan model rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM). Keberadaan RBM sangat strategis dalam penanganan korban penyalahgunaan napza. Namun demikian, RBM tersebut masih memerlukan peningkatan kapasitas SDM, sehingga tujuan tercapai secara optimal.

Eksistensi penyuluh sosial sangat strategis dalam pengembangan dan partisipasi sosial masyarakat. Sehubungan dengan itu, diperlukan dukungan dari organisasi dan peningkatan kualitasnya SDM penyuluh tersebut, sehingga kinerjanya tercapai secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian di beberapa wilayah di Indonesia, bahwa dukungan organisasi dan peningkatan kemampuan individu penyuluh berpengaruh positif terhadap kinerja penyuluhan, dan perilaku positif ini berpengaruh pada peningkatan partisipasi masyarakat.

Permasalahan yang tidak akan pernah selesai, adalah terjadinya bencana alam di Indonesia. Kementerian Sosial mengembangkan program penyiapan kelompok pemuda dalam penanganan korban bencana, yang kemudian dikenal dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Salah satu tugas Tagana adalah melaksanakan mitigasi bencana. Berdasarkan hasil penelitian di Serang dan Sukabumi, Tagana telah melaksanakan tugas yang diembannya, dan peran tersebut telah memberi manfaat bagi instansi lintas sektor dan masyarakat di daerah rawan bencana.

Selain berkiprah di area kebencanaan, pemuda memiliki potensi dan sumber daya yang dapat diarahkan untuk pengembangan masyarakat. Berkaitan dengan itu, dilakukan penelitian tindakan di Depok Jawa Barat. Pada penelitian tersebut kelompok pemuda keagamaan ditempatnya sebagai agen perubahan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pengembangan keterampilan kewirausahaan, tidak dapat menanggalkan urgensi keterampilan sosial guna memperkuat peran pemuda di komunitas.

Selain potensi dan sumber dalam bentuk individu, kelompok dan organisasi, terdapat juga potensi dan sumber dalam bentuk dunia usaha. Di Riau terdapat beberapa dunia usaha yang sudah melaksanakan program pengembangan masyarakat dalam skema *Corporate Social Responcibility*

(CSR). Mereka menyelenggarakan program pengembangan masyarakat di sekitar kawasan usahanya. Berdasarkan hasil penelitian, program tersebut belum memberikan kepuasan bagi masyarakat, karena yang dikehendaki masyarakat adalah program pemberdayaan ekonomi.

Proses integrasi sosial bukan merupakan proses yang mudah untuk diwujudkan. Berbagai tantangan senantiasa dihadapi oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk mewujudkan integrasi sosial tersebut. Kelembagaan yang ada di lokasi transmigrasi telah memberi dorongan terjadinya interaksi yang intensif, terjadi harmonisasi, toleransi, kegiatan kolektif, dan partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa proses integrasi sosial di lokasi transmigrasi karena adanya dukungan dari tiga kekuatan integratif, yaitu koersif di pusat KTM, normatif di desa-desa hinterland, dan kawasan KTM dengan integrasi fungsional.

Akhirnya, disampaikan terima kasih kepada Kepala Puslitbangkesos, kontributor, mitra bestari dan pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, sehingga *SOSIO KONSEPSIA* terbit sesuai jadwal. Kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan penerbitan jurnal ke depan.

Editor

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa izin dan biaya.

Badrun Susantyo (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN PENYEBAB PERILAKU AGRESIF REMAJA DI PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BANDUNG

SOSIO KONSEPSIA Vol.6, No.01, Desember 2016, hal: 1-17.

Abstrak

Secara hipotetis, faktor-faktor determinan penyebab terjadinya perilaku agresif dalam penelitian ini dimodelkan sebagai a). Faktor keluarga/orang tua, b). Faktor rekan sebaya, c). Faktor lingkungan sosial/tetangga, d). Faktor media massa, e). Kondisi internal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji struktur model penyebab terjadinya perilaku agresif di kalangan remaja yang tinggal di permukiman kumuh. Disamping itu juga untuk menguji apakah faktor-faktor penyebab tersebut signifikan berpengaruh terhadap terjadinya perilaku agresif? Penelitian ini melibatkan 311 responden remaja dari tiga kelurahan dengan level kekumuhan yang berbeda. Hasil uji permodelan (SEM) menunjukkan bahwa model hipotetis penyebab perilaku agresif remaja yang tinggal di kawasan permukiman terbukti fit, dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi perilaku agresif remaja juga terbukti signifikan berpengaruh terhadap perilaku agresif remaja, kecuali faktor rekan sebaya. Beberapa saran direkomendasikan terkait dengan pencegahan perilaku agresif di kalangan remaja yang tinggal di permukiman kumuh yang terbagi ke dalam beberapa aras, yaitu aras mikro, meso maupun makro yang dapat diimplementasikan baik secara individu, keluarga, kelompok, organisasi maupun komunitas.

Kata kunci: perilaku agresif, keluarga, rekan sebaya, lingkungan sosial.

Gunawan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia)

REHABILITASI SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT BAGI KORBAN MENYALAHGUNAAN NAPZA DI YOGYAKARTA

SOSIO KONSEPSIA Vol.6, No.01, Desember 2016, hal: 18-38.

Abstrak

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai angka prevalensi penyalahgunaan Napza cukup tinggi yakni mencapai 2,8% dari jumlah penduduk rentan. Dalam penanggulangan Korban Napza, masyarakat merupakan unsur penting dalam upaya rehabilitasi sosial bagi korban narkoba dan semakin dibutuhkan ketika kapasitas lembaga pemerintah sudah tidak dapat menampung korban Narkoba yang semakin banyak. Naskah ini merupakan penelitian tentang penyelenggaraan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat di Yogyakarta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kondisi RBM di wilayah tersebut. Data dihimpun dengan teknik (a) wawancara mendalam, (b) studi dokumentasi, (c) observasi dan (d) diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil studi kasus menunjukkan bahwa RBM telah terbentuk sampai di tingkat desa, bahkan

beberapa RBM telah dijadikan program Desa. Kegiatan RBM lebih terkonsentrasi pada komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dari segi jumlah, RBM merupakan suatu kekuatan besar dalam pencegahan penyalahgunaan Napza yang perlu diperhitungkan dalam penentuan program. Optimalisasi peran RBM diperlukan peningkatan kapasitas pengurus dan anggota RBM. Peningkatan kapasitas dimaksud dapat difasilitasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang ada pada instansi sektoral, atau lebih khusus di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.

Kata kunci: rehabilitasi sosial, basis masyarakat, korban napza.

Subhan Kadir, Sunarru Samsi Hariadi, dan Subejo (Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada)

PENGARUH DUKUNGAN ORGANISASI DAN KEMAMPUAN INDIVIDU TERHADAP KINERJA PENYULUH SOSIAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

SOSIO KONSEPSIA Vol.6, No.01, Desember 2016, hal: 39-55.

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh dukungan organisasi dan kemampuan individu terhadap kinerja penyuluh sosial dan terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian diharapkan menghasilkan sebuah model untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam program kesejahteraan sosial melalui kinerja penyuluh, kemampuan individu dan dukungan organisasi. Penelitian menggunakan metode penelitian survey kuantitatif dan analisis data menggunakan pemodelan persamaan struktur dengan program AMOS. Pengumpulan data menggunakan angket kemampuan individu, dukungan organisasi, kinerja penyuluh sosial, dan partisipasi masyarakat. Responden yang berpartisipasi penelitian ini adalah sebanyak 124 penyuluh sosial dan calon penyuluh sosial yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyuluh ($r=0,623$; $p=0,012$), juga ditemukan pengaruh positif dan signifikan kinerja penyuluh terhadap partisipasi masyarakat ($r=0,644$; $p=0,021$), ditemukan juga adanya korelasi positif antara dukungan organisasi dengan kemampuan individu ($r=0,558$; $p=0,000$). Kinerja penyuluh sosial memoderasi hubungan antara dukungan organisasi dan partisipasi masyarakat. Model peningkatan partisipasi masyarakat juga telah diidentifikasi di dalam penelitian ini.

Kata kunci: dukungan organisasi, kinerja penyuluh sosial, partisipasi masyarakat.

Aulia Rahman (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

PERAN TARUNA SIAGA BENCANA DALAM MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN SERANG DAN SUKABUMI

SOSIO KONSEPSIA Vol.6, No.01, Desember 2016, hal: 56-74.

Abstrak

Penelitian mengenai peran Taruna Siaga Bencana (Tagana) pada mitigasi bencana belum banyak dilakukan. Pada umumnya mengkaji peran Tagana pada tahap kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran Tagana dalam mitigasi bencana di Kabupaten Serang dan Sukabumi, bagaimana koordinasi antara Tagana dan pemerintah daerah pada kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Serang dan Sukabumi dan manfaat partisipasi Tagana dalam mendukung ketahanan daerah di Kabupaten Serang dan Sukabumi. Metode wawancara dilakukan terhadap 9 narasumber yang terdiri dari Kementerian Sosial sebagai lembaga pembina pusat, Dinas Sosial, (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Anggota Tagana Kabupaten dan masyarakat. Studi dokumentasi dilakukan dengan melihat artikel, laporan kegiatan dan dokumentasi terkait mitigasi yang sudah dilakukan. Temuan lapangan memberikan kesimpulan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten secara kesinambungan bekerjasama

dengan Tagana untuk kegiatan mitigasi bencana dan koordinasi yang dilakukan antar lintas instansi sering dilakukan pada tiga tahapan penanggulangan bencana serta dapat disimpulkan masyarakat memahami tentang kegiatan mitigasi bencana serta turut serta pada setiap kegiatan mitigasi sehingga masyarakat siap jika menghadapi bencana.

Kata Kunci: tagana; mitigasi, bencana.

Sari Viciawati Machdum et.al, Kania Saraswati Harisoesyanti, Ni Luh Putu Agastya, Getar Hati, Lucky Kusuma Wardani, dan Sri Daryanti (Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

PENGEMBANGAN KETERAMPILAN SOSIAL DAN KEWIRAUSAHAAN PADA ORGANISASI PEMUDA KEAGAMAAN DI DEPOK

SOSIO KONSEPSIA Vol.6, No.01, Desember 2016, hal: 75-89.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kelompok pemuda dalam organisasi Muhammadiyah sebagai *Faith Based Organization* (FBO) menjadi agen perubah dalam pengembangan masyarakat lokal di Kelurahan Cinangka, Depok, Jawa Barat. Penelitian ini membahas tentang proses intervensi kelompok pemuda dengan mempergunakan strategi penelitian aksi (*participatory action research*). Tahapan penelitian aksi terdiri dari tiga tahap, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi (*look*), merancang program intervensi (*think*), dan mengimplementasikan program intervensi (*act*). Berdasarkan identifikasi masalah dan kebutuhan pada tahap *look*, penelitian ini menemukan potensi masyarakat dalam upaya penyelesaian permasalahan lingkungan. Selain pemuda yang tergabung dalam FBO, ada juga kelompok ibu yang terlibat. Tahap *look* memperlihatkan bahwa potensi pemuda dari FBO dapat maksimal apabila mendapatkan dukungan dari elemen lain, terutama orang tua di dalam komunitas sasaran. Kemudian melalui proses perencanaan kegiatan dalam tahap *think* bersama komunitas sasaran, terdapat beberapa kegiatan yang diimplementasikan dalam penelitian ini, yaitu pengembangan keterampilan sosial dan kewirausahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi kelompok pemuda dalam pengembangan komunitas melalui pengembangan keterampilan kewirausahaan, tidak dapat menanggalkan urgensi keterampilan sosial guna memperkuat peran pemuda dari FBO di komunitas.

Kata Kunci: pengembangan masyarakat, intervensi kelompok pemuda, pengelolaan lingkungan, Faith Based Organization, keterampilan mikro.

Meyzi Heriyanto, Adianto dan Hasim As'ari (Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau)

PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERSPEKTIF INDEKS KEPUASAN PUBLIK DI RIAU

SOSIO KONSEPSIA Vol.6, No.01, Desember 2016, hal: 90-109.

Abstrak

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu kebutuhan dan di Indonesia merupakan suatu kewajiban dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana pada pasal 74 menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial merupakan suatu kegiatan yang diwajibkan dan dilaksanakan berdasarkan pada kepatutan dan kewajaran sesuai dengan peraturan pemerintahan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dikenal dengan istilah CSR oleh perusahaan merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama *stakeholders* terkait, terutama masyarakat disekitar perusahaan tersebut berada. Karena peran CSR ternyata saat ini semakin penting bagi masyarakat di sekitar perusahaan dalam upaya

menyeimbangkan pembangunan, baik ekonomi, sosial dan lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan secara komprehensif mengenai implementasi dan prioritas program CSR di PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Tapung, Minas dan Rumbai Provinsi Riau. Metode penelitian dilakukan dengan metode campuran (mixed methods) yaitu mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket, in-dept interview dan observasi terhadap multistakeholders. Hasil penelitian yang ditemukan implementasi program CSR oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Provinsi Riau masih berjalan dengan kurang baik. Sedangkan prioritas program CSR yang dibutuhkan berdasarkan indeks kepuasan publik di PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Tapung, Minas dan Rumbai Provinsi Riau adalah program yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: *pemberdayaan, program Corporate Social Responsibility, indeks kepuasan publik.*

Widarjanto dan Slamet Rahmat Topo Susilo (Pusat Penelitian dan Pengembangan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)

INTEGRASI SOSIAL DI PERDESAAN: KETERKAITAN KAWASAN TRANSMIGRASI DENGAN DESA-DESA SEKITAR

SOSIO KONSEPSIA Vol.6, No.01, Desember 2016, hal: 110-121.

Abstrak

Pengembangan masyarakat lebih efektif dilaksanakan melalui kelembagaan berbasis komunitas dan kawasan. Melalui pendekatan kelembagaan, baik kelembagaan ekonomi maupun sosial dapat mempermudah mengontrol pengambilan keputusan, kebijakan, program, dan pelaksanaan. Kelembagaan dapat menghimpun norma dan aturan yang dibuat dan disepakati dalam mengatur pergaulan hidup dengan tujuan bersama berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis kondisi integrasi sosial, mempelajari pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dikembangkan oleh masyarakat transmigrasi dan merumuskan saran tindak dan pendekatan pengembangan masyarakat yang lebih sesuai dalam pembangunan transmigrasi. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan melihat hubungan gejala yang bersifat interaktif. Melalui kelembagaan dapat mendorong terjadinya dinamika proses seperti interaksi yang intensif, terjadi harmonisasi, toleransi, kegiatan kolektif, dan partisipasi. Dinamika proses yang terjadi menghasilkan integrasi sosial dengan dukungan tiga kekuatan integratif, yaitu koersif di pusat Kota Terpadu Mandiri (KTM), normatif di desa-desa hinterland, dan kawasan KTM dengan integrasi fungsional. Semua unsur melakukan harmonisasi pada derajat tertentu dalam menjamin kelangsungan sistem sosial.

Kata kunci: *pengembangan masyarakat, integrasi sosial, transmigrasi.*

SOSIO KONSEPSIA

Journal of Social Welfare Research and Development

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a paper. These abstracts are allowed to copy without consent from the author/publisher and free of charge.

Badrun Susantyo (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)
THE DETERMINANT FACTORS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR AMONG ADOLESCENCE WHO LIVES IN SLUMS AREA IN BANDUNG

SOSIO KONSEPSIA Vol.6, No.01, December 2016, page: 1-17.

Abstract

The research uses hypothesis that aggressive behavior has been clustered into five main root causes that cover a). Family, b). Peers, c). Social environmental/ neighbors, d). Mass media, and e). Internal conditions. The objective of the study is examine the hypothesis. Moreover, that's also intended to examine how significant of those factors on the aggressive behavior. This study involved 311 adolescents as respondents from three villages with different levels of slums. The modelling test (Structural Equation Modelling) has showed that the hypothetical model causes of adolescent aggressive behavior is fit, and the factors are suspected to affect in adolescent aggressive behavior are significant, excluding peers. This study recommends that preventing of aggressive behavior among adolescents who live in slums area which are divided into several levels; which are in micro, messo and macro level. They are could be implemented either as individuals, families, groups, organizations and communities.

Keywords: *aggressive behavior, family, peer group, social environment.*

Gunawan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia)

COMMUNITY BASED SOCIAL REHABILITATION FOR DRUG ABUSER IN YOGYAKARTA

SOSIO KONSEPSIA Vol.6, No.01, December 2016, page: 18-38.

Abstract

Yogyakarta has noted that has had high prevalence of drug abuser which reach in 2.8% of the vulnerable population. In terms of overcoming those drugs abuse, community has seen as an important element. Its seen as a strategic way when the capacity of government institutions is very limited. This paper is a case study of the implementation of Community-Based Rehabilitation in Yogyakarta. The purpose of research is to describing the condition of RBM in the region. Data compiled by the technique (a) in-depth interviews, (b) documentary study, (c) observation and (d) focus group discussions (FGD). The results of case studies indicate that CBR had build up at the village level, and even some of CBR has been used as a Village program. CBR activities are more concentrated on communication, information and education to the community. In terms of numbers, RBM is a major force in the prevention of drug abuse that needs to be taken into account in determining the program. Optimizing the role of CBR are necessary to increase the capacity of management and members of RBM. Capacity building may be facilitated by education and

training institutions that exist, or more specifically at the Center for Education and Training of the Ministry of Social Welfare.

Keywords: social rehabilitation, community base, drug abuser.

Subhan Kadir, Sunarru Samsi Hariadi, dan Subejo (Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada)

THE ROLE OF ORGANIZATIONAL SUPPORT AND INDIVIDUAL CAPACITY ON SOCIAL EXTENSION WORKERS PERFORMANCE AND COMMUNITY PARTICIPATION

SOSIO KONSEPSIA Vol.6, No.01, December 2016, page: 39-55.

Abstract

This quantitative research has intended to investigate the role of organizational support and individual capacity of social extension workers' performance. The successful of those performance has been measured on social participation on social development. The research has expected to gain a kind of model of social participation in social welfare programs, through social worker's performance, individual capacity and organizational support. The research is a quantitative survey. Data has been analyzed through AMOS program. Data were collected in a survey using four instruments measuring competence, organizational support, worker performance and community participation. The study found that organizational support has positive and significant association with social extension workers' performance. The association between social extension workers' performance and community participation was also found to be positive and significant. Performance of social extension workers was found to be a moderating factors as it mediate organizational support to community participation.

Keywords: organizational support, social extension workers' performance, community participation.

Aulia Rahman (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)
THE ROLE OF YOUTH MITIGATE SQUAD IN DISASTER MITIGATION IN SERANG AND SUKABUMI

SOSIO KONSEPSIA Vol.6, No.01, December 2016, page: 56-74.

Abstract

Study of Tagana in disaster mitigation are mostly examines about Tagana role in preparedness and disaster response. This study examines the role of Tagana in disaster mitigation in Serang regency and Sukabumi regency, in terms of their coordinative activities and their participate on regional resilience. Data has collected through Interview Method that covers 9 informants consisted of Ministry of Social Affairs, District Social Services, Regional Disaster Management Agency (BPBD), a Tagana district member and the community. The source of secondary data are from articles, reports of activities and documentation related to the mitigation. The research found that the local government through the District Social Services and BPBD have cooperated with Tagana for disaster mitigation activities. The coordination among those agencies was conducted in three phases of disaster management. Beyond that, the research found that the people have also contributed in any mitigation activities.

Keywords: tagana; mitigation; disaster.

Sari Viciawati Machdum et.al, Kania Saraswati Harisoesyanti, Ni Luh Putu Agastya, Getar Hati, Lucky Kusuma Wardani, dan Sri Daryanti (Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

DEVELOPING OF SOCIAL SKILLS AND ENTREPREUNERSHIP IN Faith Based Organization IN DEPOK

SOSIO KONSEPSIA Vol.6, No.01, December 2016, page: 75-89.

Abstract

This study examines the youth groups in the Muhammadiyah organization as an Faith Based Organization (FBO) as agents of change in community development at Cinangka Village, Depok, West Java. By using a Participatory Action Research, this study discusses the process of youth group intervention in three stages, which covers needs and potencies assessment (look), action plan (think) and implementation (act). Based on 'look' phase, this study found people's potential at their community which are youth in FBO and groups women. In this phase has identified that youth's potencies in FBO could be maximized if supported by parents. In the next stage through planning process, there were some activities that are implemented in this study which are development of social skills and entrepreneurship. This study has found that youth group intervention should also recognize social skills on strengthen the role of youth in FBO.

Keywords: *community development, youth groups intervention, environmental management, Faith Based Organization, micro skills.*

Meyzi Heriyanto, Adiando dan Hasim As'ari (Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN PUBLIC SATISFACTION INDEX PERSPECTIVE IN RIAU

SOSIO KONSEPSIA Vol.6, No.01, December 2016, page: 90-109.

Abstract

Corporate Social Reponsibility program (CSR) is seen as an urgent thing on social development. Its supported by regulation that stated in Act No. 40 year 2007 about Limited Company. In the article number 74 stated that social responsibility is one among activities that should be conducted by the companies. The companies should have committed for surround people quality of life, in terms of social and economic perspective. The sample of this research covers the implementation of the priority programmes and corporate social responsibility (CSR) PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai and PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) at Tapung, Minas and Rumbai Riau Province. Data has been collected by questionnaire, in-depth interview and observation. Results of the study found implementation of programs of corporate social responsibility by PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai and PT Cevron Pacific Indonesia (CPI) in Riau Province is still inadequate. The CSR program of the sample have been emphasized on social-economy empowerment.

Keywords: *empowerment, Corporate Social Reponsibility program, public satisfaction index.*

**Widarjanto dan Slamet Rahmat Topo Susilo (Pusat Penelitian dan Pengembangan Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)**

***SOCIAL INTEGRATION IN RURAL: LINKAGE OF TRANSMIGRATION AREA WITH VILLAGES
NEIGHBOURHOOD***

SOSIO KONSEPSIA Vol.6, No.01, December 2016, page: 110-121.

Abstract

Community development through community and regional based institutions has seen as an effective approach. Those approach, both economic and social institutions can facilitate in the controlling of decision-making, policy, program, and implementation. The research objective is to analyze the conditions of social integration, between migrant and origin community. The research is a qualitative and uses case studies that looks at social reality as something holistic, complex, dynamic, and full of meaning, as well as seeing the interactive relationship of symptoms. Institutions can lead to such intensive interaction processes, harmonization, tolerance, collective activity, and participation. The dynamics of the processes that occur will generate social integration with the support of three integrative forces, namely coercive forces in the center of the Integrated Independent City (KTM), normative forces in the hinterland villages, and the KTM regions with functional integration. All elements harmonize at certain degrees in ensuring the continuity of the social system.

Keywords: *community development, social integration, transmigration.*

FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN PENYEBAB PERILAKU AGRESIF REMAJA DI PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BANDUNG

THE DETERMINANT FACTORS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR AMONG ADOLESCENCE WHO LIVES IN SLUMS AREA IN BANDUNG

Badrun Susantyo

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur, Telp. 021-8017146, Fax (021) 8017126
E-mail: besusantyo@yahoo.com

Diterima: 19 Oktober 2016; Drevisi: 24 Nopember 2016; Disetujui: 14 Desemberr 2016

Abstrak

Secara hipotetis, faktor-faktor determinan penyebab terjadinya perilaku agresif dalam penelitian ini dimodelkan sebagai a). Faktor keluarga/orang tua, b). Faktor rekan sebaya, c). Faktor lingkungan sosial/tetangga, d). Faktor media massa, e). Kondisi internal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji struktur model penyebab terjadinya perilaku agresif di kalangan remaja yang tinggal di permukiman kumuh. Disamping itu juga untuk menguji apakah faktor-faktor penyebab tersebut signifikan berpengaruh terhadap terjadinya perilaku agresif? Penelitian ini melibatkan 311 responden remaja dari tiga kelurahan dengan level kekumuhan yang berbeda. Hasil uji permodelan (SEM) menunjukkan bahwa model hipotetis penyebab perilaku agresif remaja yang tinggal di kawasan permukiman terbukti fit, dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi perilaku agresif remaja juga terbukti signifikan berpengaruh terhadap perilaku agresif remaja, kecuali faktor rekan sebaya. Beberapa saran direkomendasikan terkait dengan pencegahan perilaku agresif di kalangan remaja yang tinggal di permukiman kumuh yang terbagi ke dalam beberapa aras, yaitu aras mikro, meso maupun makro yang dapat diimplementasikan baik secara individu, keluarga, kelompok, organisasi maupun komunitas.

Kata kunci: perilaku agresif, keluarga, rekan sebaya, lingkungan sosial.

Abstract

The research uses hypothesis that aggressive behavior has been clustered into five main root causes that cover a). Family, b). Peers, c). Social environmental/ neighbors, d). Mass media, and e). Internal conditions. The objective of the study is examine the hypothesis. Moreover, that's also intended to examine how significant of those factors on the aggressive behavior. This study involved 311 adolescents as respondents from three villages with different levels of slums. The modelling test (Structural Equation Modelling) has showed that the hypothetical model causes of adolescent aggressive behavior is fit, and the factors are suspected to affect in adolescent aggressive behavior are significant, excluding peers. This study recommends that preventing of aggressive behavior among adolescents who live in slums area which are divided into several levels; which are in micro, meso and macro level. They are could be implemented either as individuals, families, groups, organizations and communities.

Keywords: aggressive behavior, family, peer group, social environment.

PENDAHULUAN

Banyaknya kejadian kekerasan yang terjadi merupakan manifestasi dari perilaku agresif, baik yang dilakukan secara verbal (kata-kata) maupun non-verbal (*action*). Berbagai wujud perilaku agresi ini bisa kita temukan hampir pada setiap pemberitaan media massa, bahkan dalam kehidupan di lingkungan sekitar. Mencaci maki, mengumpat, merampok, bahkan sampai pembunuhan sekalipun, serta segala jenis perilaku kriminal dan tindak kekerasan, merupakan perwujudan dari perilaku agresif. Walaupun data pasti akan terjadinya “tindakan agresif” ini sangatlah sulit untuk ditemukan secara dokumentatif. Hal demikian mengingat masih lebarnya perbedaan pemahaman antar institusi yang menangani dampak/akibat dari tindakan agresif ini. Data yang bisa diakses (walaupun tidak seluruhnya) biasanya yang terkait dengan tindak kriminal (tindak kriminal yang secara yuridis telah teridentifikasi dengan telah melawati proses hukum). Sedangkan, secara “*de jure*” tidak semua perilaku agresif (maupun akibat yang ditimbulkan) masuk dalam ranah tindak kriminal.

Perilaku agresif bisa juga diartikan sebagai luapan emosi atas reaksi terhadap kegagalan individu yang ditunjukkan dalam bentuk “perusakan” terhadap orang atau benda dengan disertai unsur kesengajaan yang bisa diekspresikan melalui kata-kata (verbal) dan perilaku non-verbal. Agresi merupakan setiap bentuk perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, atau bahkan walau sekedar hanya merupakan perasaan ingin menyakiti orang lain. Sedangkan Moore dan Fine (dalam Koeswara, 1988) memandang perilaku agresif sebagai tingkah laku kekerasan secara fisik ataupun secara verbal terhadap individu lain atau objek-objek lain.

Perilaku agresif menurut Murry (dalam Halll & Lindzey, 1993) didefinisikan sebagai

suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, berkelahi, melukai, menyerang, membunuh, atau menghukum orang lain. Atau secara singkatnya agresi adalah tindakan yang dimaksudkan untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain. Hal yang terjadi pada saat tawuran sebenarnya adalah perilaku agresif dari seorang individu atau kelompok. Dill dan Dill (1998) melihat perilaku agresif sebagai perilaku yang dilakukan berdasarkan pengalaman dan adanya rangsangan situasi tertentu sehingga menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan agresif. Perilaku ini boleh dilakukan secara dirancang, seketika atau kerana rangsangan situasi. Tindakan agresif ini biasanya merupakan tindakan anti sosial yang tidak sesuai dengan budaya dan agama dalam suatu masyarakat.

Lebih lanjut, Bandura (1977) beranggapan bahwa perilaku agresif merupakan sesuatu yang dipelajari dan bukannya perilaku yang dibawa individu sejak lahir. Perilaku agresif ini dipelajari dari lingkungan sosial seperti interaksi dengan keluarga, interaksi dengan rekan sebaya dan media massa melalui modelling.

Munculnya perilaku agresif melibatkan banyak faktor. Pembahasan tentang faktor-faktor penyebab munculnya perilaku agresif juga amat tergantung dari sisi pendekatan yang digunakan. Setidaknya ada empat pendekatan utama untuk memahami beberapa penyebab munculnya perilaku agresif ini, yaitu 1). Pendekatan biologis, 2). Pendekatan psikologis, 3). Pendekatan situasional, dan 4). Pendekatan sosio-ecological.

Pendekatan biologis, memandang bahwa perilaku agresif terkait dengan kondisi hormon testosterone dalam diri individu (Tieger dalam Dunkin, 1995; Brigham, 1991; Baron, Byrne & Suls, 1994). Ada juga pandangan biologis yang lain, yang meyakini bahwa perilaku agresif juga

bisa disebabkan karena abnormalitas anatomis, misalnya kelainan pada jaringan syaraf otak. Secara biologis, ada beberapa perspektif yang digunakan untuk menjelaskan tentang munculnya perilaku agresif ini, diantaranya adalah perspektif secara etologis, sosiobiologis dan genetika perilaku.

Perilaku agresif dalam perspektif Etologi disebabkan oleh faktor instingtif dalam diri manusia dan perilaku ini dilakukan dalam rangka adaptasi secara evolusioner (Brigham, 1991; Dunkin, 1995). Perilaku agresif menurut perspektif ini diyakini sebagai upaya untuk mempertahankan diri (biasanya secara teritori/kewilayahan) dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Termasuk didalamnya adalah agonistic aggression, yaitu perilaku agresif yang dilakukan dalam upaya mempertahankan teritory dan dominasi hirarki (Brigham, 1991). Bahkan Zastrow (2008) masih meyakini dan beranggapan bahwa manusia itu sama halnya binatang yang memiliki naluri (*instinct*) bawaan yang sifatnya agresif.

Perspektif sosiobiologi percaya bahwa perilaku agresif berkembang karena adanya kompetisi sosial terhadap sumber daya yang terbatas (Dunkin, 1995). Hal ini dilakukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup, agar tetap survive untuk tetap menjaga dan mengembangkan sisi manusia ataupun komunitasnya. Tanpa agresi manusia akan punah atau dipunahkan oleh pihak lain (Wiggins, Wiggins & Zanden, 1994; Zastrow, 2008). Perilaku agresif menurut perspektif ini merupakan sesuatu yang fundamental karena merupakan strategi adaptasi dalam kehidupannya.

Kecenderungan perilaku agresif dalam perspektif genetika perilaku merupakan bagian sifat bawaan genetik individu yang diwariskan dari orang tuanya (*hereditary*). Individu-

individu yang berhubungan secara genetis memiliki kecenderungan agresif yang satu sama lain lebih serupa, dibanding individu-individu yang tidak memiliki hubungan secara genetis (Krahe, 2001).

Pendekatan psikologis. Dalam pendekatan ini ada sejumlah teori besar yang mendasari pemikiran mengenai agresi, antara lain teori *instinct* oleh Sigmund Frued. Dalam pendekatan inipun terdapat beberapa perspektif dalam memahami perilaku agresif. Krahe (2001) mencatat setidaknya ada 7 (tujuh) perspektif agresif dalam perspektif ini, yaitu; 1). perspektif psikoanalisis, 2). perspektif frustrasi-agresi, 3). perspektif *neo-asosianisme* kognitif, 4). model pengalihan rangsangan, 5). perspektif sosial-kognitif, 6). teori pembelajaran sosial, dan ke 7). perspektif model interaksi sosial.

Pendekatan Situasional, yang mencoba melihat beberapa kondisi situasional sebagai pencetus (*trigger*) munculnya perilaku agresif. Pendekatan ini meyakini bahwa perilaku agresif bukanlah merupakan faktor bawaan (naluri) yang ada pada setiap individu. Munculnya perilaku agresif melibatkan faktor-faktor (stimulus-stimulus) eksternal sebagai determinan-determinan dalam pembentukan agresi. Aspek-aspek situasi yang memicu atau memperburuk perilaku agresif merupakan stimulus yang muncul pada situasi tertentu yang mengarahkan perhatian individu ke arah agresi sebagai respons yang potensial.

Beberapa pengaruh situasi yang memicu perilaku agresif tersebut diantaranya adalah karena adanya efek senjata (Berkowitz, 1967, 1984; Carlson, Marcus-Newhall & Miller, 1990; Brehm & Kassin, 1993), pengaruh stimulus alkohol dan suhu udara, kepadatan (*crowding*), kebisingan, dan polusi udara (Bushman & Cooper, 1990; Chermack & Giancola, 1997; Anderson & Anderson, 1998; Crowe, 2000),

dan juga karena adanya kompetisi antar kelompok yang menimbulkan konflik (Baron, Byrne & Suls, 1994).

Pendekatan *socio-ecological*, diperkenalkan oleh Bronfenbrenner (1989), yang dikenal dengan ecological model, kemudian dilengkapi oleh Bronfenbrenner dan Morris (2006) menjadi *socio-ecological* model. Model ini menjelaskan bahwa perkembangan perilaku dan kepribadian individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia tinggal. lingkungan ini memiliki beberapa tingkatan, mulai dari *microsystem*, *mesosystem*, *exosystem* dan *macrosystem*. Menurut model *socio-ecological* Bronfenbrenner ini, kepribadian dan perilaku individu terjadi dalam sebuah proses besar yang systemic dan berlangsung atas beberapa tingkatan. Diawali dari sistem lingkungan terdekat dengan individu yang dikenal dengan *microsystem* dengan berbagai elemennya, kemudian berlanjut ke tingkat *exosystem*. Dimana, diantara lingkungan *microsystem* dengan *exosystem* ini terdapat sebuah lingkungan (jembatan) penghubung diantara keduanya, yaitu *mesosystem*. Tingkatan terluar dalam sistem lingkungan ini adalah *macrosystem*. Diantara tingkatan pada masing-masing sistem lingkungan ini terjadi proses saling mempengaruhi dan saling membentuk diantara tingkatan sistem lingkungan lainnya.

Perdebatan yang panjang dalam menjelaskan sebab-sebab munculnya perilaku agresif serta faktor-faktor serta kondisi

pencetusnya, merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan pandangan sesuai perspektif pendekatan yang melandasinya. Perspektif teoritik biologis mencoba menjelaskan perilaku agresif dari sisi internal anatomis manusia dengan mengambil perumpamaan pada binatang. Perspektif teoritik psikologis menjelaskan perilaku agresif dari sisi psyche (jiwa) manusia dengan mempertimbangkan elemen-elemen sosial (kemasyarakatan) yang melingkupi individu. Sedangkan dalam perspektif situasi, memandang munculnya perilaku agresif merupakan pengaruh situasi tertentu yang memaksa individu untuk memunculkan perilaku agresif, baik itu disadari ataupun tidak.

Berdasarkan diskusi singkat terkait teori, pendekatan dan perspektif agresi, terlihat demikian rumit dan luasnya faktor penyebab dan pencetus tindakan agresif itu sendiri. Mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa faktor bawaan merupakan pencetus tindakan agresi (pendekatan biologis), keadaan psikologislah pencetus tindakan agresi (pendekatan psikologis) sampai dengan pandangan yang menyebutkan bahwa agresi lebih disebabkan kerana adanya keadaan situasional yang mendukung tindakan agresif itu sendiri (pendekatan situasi). Sehingga jika diskripsikan secara skematik, penyebab perilaku agresif berdasarkan masing-masing perspektif yang mendasarinya akan nampak sebagaimana Diagram 1 berikut ini.

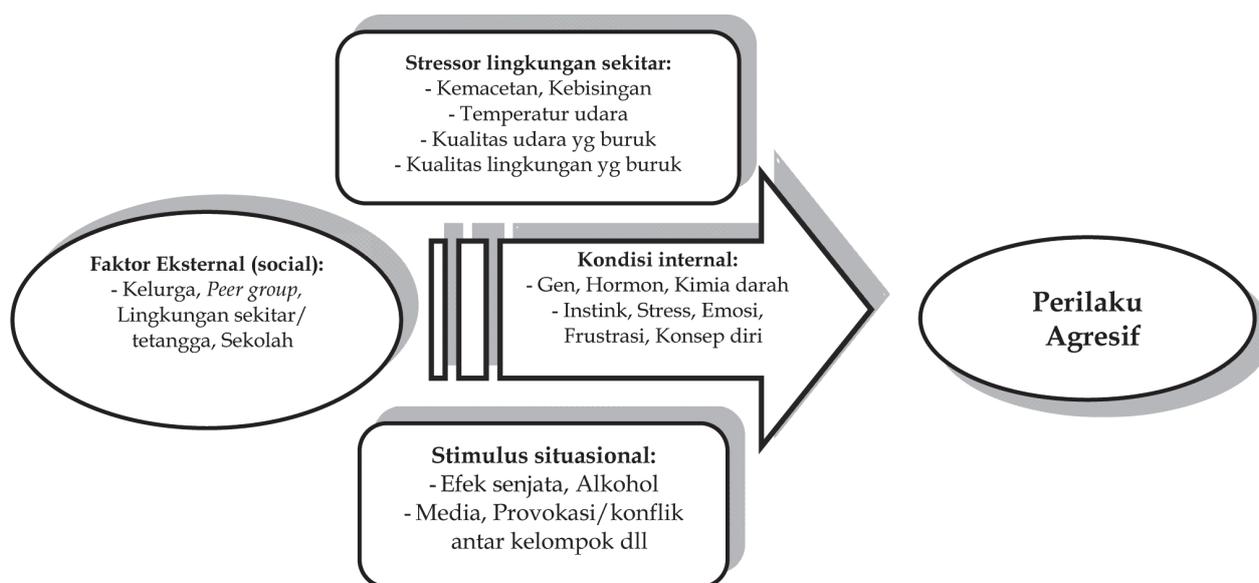


Diagram 1. Rekonstruksi model integratif faktor penyebab dan pencetus perilaku agresif

Skemadiatas merupakan sebuah rekonstruksi model akan faktor-faktor pembentuk dan pencetus munculnya perilaku agresif. Skema tersebut merupakan penggabungan dari berbagai pendekatan beserta perspektif teoritis dalam memandang perilaku agresif. Dari keempat elemen utama dalam model di atas yaitu faktor kondisi internal, kondisi eksternal sosial, stimulus situasi dan stressor lingkungan terjadi korelasi diantara masing-masing elemen dan juga diantara aspek-aspek dalam elemen itu sendiri. Sehingga jika dirinci lebih lanjut arah hubungan diantara masing-masing aspek di dalamnya, akan terciptalah sebuah model hubungan saling saling mempengaruhi diantara aspek dan elemen tersebut secara rumit.

Penelitian ini mencoba menawarkan sebuah replika model (bagian dari rekonstruksi model integratif di atas), tentang faktor-faktor determinan dalam membentuk perilaku agresif, khususnya di kalangan remaja. Model ini menawarkan bahwa untuk terjadinya perilaku agresif, setidaknya harus memenuhi beberapa faktor berikut; 1). Faktor keluarga/orang tua 2). Faktor rekan sebaya, 3). Faktor media massa 4). Kondisi internal, dan 5). Adanya stressor

lingkungan. Dalam penelitian ini, stressor lingkungan direpresentasikan oleh kondisi lingkungan yang buruk (permukiman kumuh) dimana penelitian dilakukan. Melalui *Structural Equation Modelling*, model faktor determinan penyebab terjadinya perilaku agresif ini diuji. a). Apakah benar faktor-faktor penyebab yang dihipotesiskan dalam penelitian ini, sudah bisa mewakili dari beberapa faktor penyebab yang ada? Juga sekaligus untuk menguji, b). apakah faktor-faktor penyebab tersebut signifikan berpengaruh terhadap terjadinya perilaku agresif

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik stratified multistage *cluster* sampling. Teknik penarikan sampel ini merupakan perpaduan antara stratified sampling dengan multistage *cluster* sampling. Teknik stratified sampling perlu dilakukan karena terdapat beberapa tingkat kekumuhan yang tersebar di beberapa wilayah Kota Bandung, yaitu; 1) agak kumuh, 2) kumuh, dan 3) sangat kumuh. Klasifikasi tingkat kekumuhan ini didasarkan atas data tingkat kekumuhan (*slums level*)

dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. Sedangkan multistage *cluster* sampling dilakukan untuk memilih Rukun Tetangga (RT) sebagai *cluster* terpilih dalam penelitian ini. Di wilayah Rukun Tetangga inilah pengumpulan data responden dilakukan. Alat ukur (instrumen) merupakan adaptasi dari: Buss & Perry (1992) tentang The aggression questionnaire. Uji validitas dan reliabilitas alat ukur ini sudah menyatu dengan uji dalam SEM. Ini salah satu kelebihan SEM (Wijayanto, 2008; Kusnendi, 2007; Card & Litle dalam Flannery, Vazsonyi & Waldman, 2007)

Populasi dalam penelitian ini adalah para remaja dengan rentang usia 15 – 18 tahun atau remaja pertengahan (*middle adolescence*). Pemilahan usia ini sesuai dengan kategorisasi dari Badan Pusat Statistik dan Levy-Marren (1996). Sebanyak 311 remaja terpilih sebagai responden. Beberapa variable yang diukur meliputi; 1. Keluarga/Orangtua, 2. Rekan sebaya, 3. Lingkungan sosial/tetangga, 4. Media massa, 5. Kondisi internal individu, dan 6. Perilaku agresif. Indikator dari masing-masing variable yang diukur terlihat sebagaimana dalam Tabel 1. Penelitian dilakukan pada Tahun 2012.

Tabel 1. Variabel dan indikator dalam penelitian Faktor-Faktor Determinan Penyebab Perilaku Agresif: Penelitian Pada Remaja Yang Tinggal Di Permukiman Kumuh Di Kota Bandung

No	Variabel	Indikator	Keterangan
1	Keluarga/Orangtua	<ul style="list-style-type: none"> ◦ penampilan peran orangtua ◦ pemenuhan kebutuhan keluarga ◦ pemecahan masalah dalam keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Eksogen 1.1 ◦ Eksogen 1.2 ◦ Eksogen 1.3
2	Rekan sebaya	<ul style="list-style-type: none"> ◦ penerimaan (<i>acceptance</i>) ◦ dukungan sosial (<i>social support</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Eksogen 2.1 ◦ Eksogen 2.2
3	Lingkungan sosial/tetangga	<ul style="list-style-type: none"> ◦ penerimaan (<i>acceptance</i>) ◦ control sosial (<i>social control</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Eksogen 3.1 ◦ Eksogen 3.2
4	Media massa	<ul style="list-style-type: none"> ◦ intensitas menonton/membaca ◦ durasi waktu menonton/membaca 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Eksogen 4.1 ◦ Eksogen 4.2
5	Kondisi internal individu	<ul style="list-style-type: none"> ◦ kecerdasan emosi ◦ tingkat frustrasi ◦ konsep diri 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Endogen 1.1 ◦ Endogen 1.2 ◦ Endogen 1.3
6	Perilaku agresif	<ul style="list-style-type: none"> ◦ respons agresif ◦ intensitas tindakan agresif 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Endogen 2.1 ◦ Endogen 2.2

Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuisioner, dengan melibatkan beberapa orang enumerator lapangan. Data diolah secara statistik dengan menggunakan Metode SEM (*Structural Equation Modelling*) dibantu dengan aplikasi LISREL

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Uji kesesuaian model dan statistik

Analisis data statistik dilakukan dengan menggunakan metode *Structural Equation*

Modelling (SEM) dengan bantuan aplikasi statistik Linear Structural Relationships (LISREL) release 8.8. Secara garis besar, metode SEM dengan menggunakan LISREL terbagi atas dua bagian yaitu; 1) *Confirmatory factor analysis* (CFA) untuk menguji validitas dan reliabilitas model pengukuran. Jika dari hasil pengujian dengan CFA didapati bahwa model pengukuran dalam keadaan valid dan reliable (*melalui fit index*) hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan pun akan valid dan reliabel, dan 2) Pengujian model dan hipotesis penelitian.

Tabel 2. Evaluasi Goodness-of-fit Indices

Goodness of fit index	Hasil model	Keterangan
χ^2 Chi- Square	χ^2 Chi- Square = 43.57 P = 0.083	Fit
RMSEA	0.034	Fit
GFI	0.98	Fit
AGFI	0.94	Fit
CMIN/DF	1.362	Fit
CFI	1.00	Fit

Sumber: Hasil olah data.

Dalam penelitian ini, nilai Chi-square yang diperoleh adalah 43.57 dengan $p = 0.083$ (lebih besar dari 0,05). Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai RMSEA sebesar 0.034. Goodness of Fit Index (GFI) dalam penelitian ini adalah sebesar 0.98, atau mendekati angka 1. Sedangkan nilai AGFI menunjukkan angka 0.94 (hampir mendekati angka 0,95). Sementara itu, nilai CMIN/DF adalah 1.362. Terakhir, berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa indeks CFI adalah 1.00.

Dari hasil olah statistik ini dapat dikatakan bahwa secara *overall*, model yang ditawarkan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku agresif di kalangan remaja dalam penelitian ini, dapat diterima.

Uji hipotetis model penelitian

Analisis kausalitas. Analisis kausalitas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel. Melalui analisis ini juga dapat diketahui hubungan yang terjadi antara keluarga/Orangtua, rekan sebaya, lingkungan sosial/tetangga, faktor media massa, kondisi internal sebagai variable antara terhadap tingkah laku agresif remaja.

Secara tidak langsung analisis kausalitas yang dilakukan dapat menjawab pertanyaan penelitian, jika faktor-faktor hipotetis terbukti mempengaruhi tingkah laku agresif. Diagram pengujian (analisi jalur) dalam penelitian ini, bisa dilihat dalam diagram 2 berikut ini.

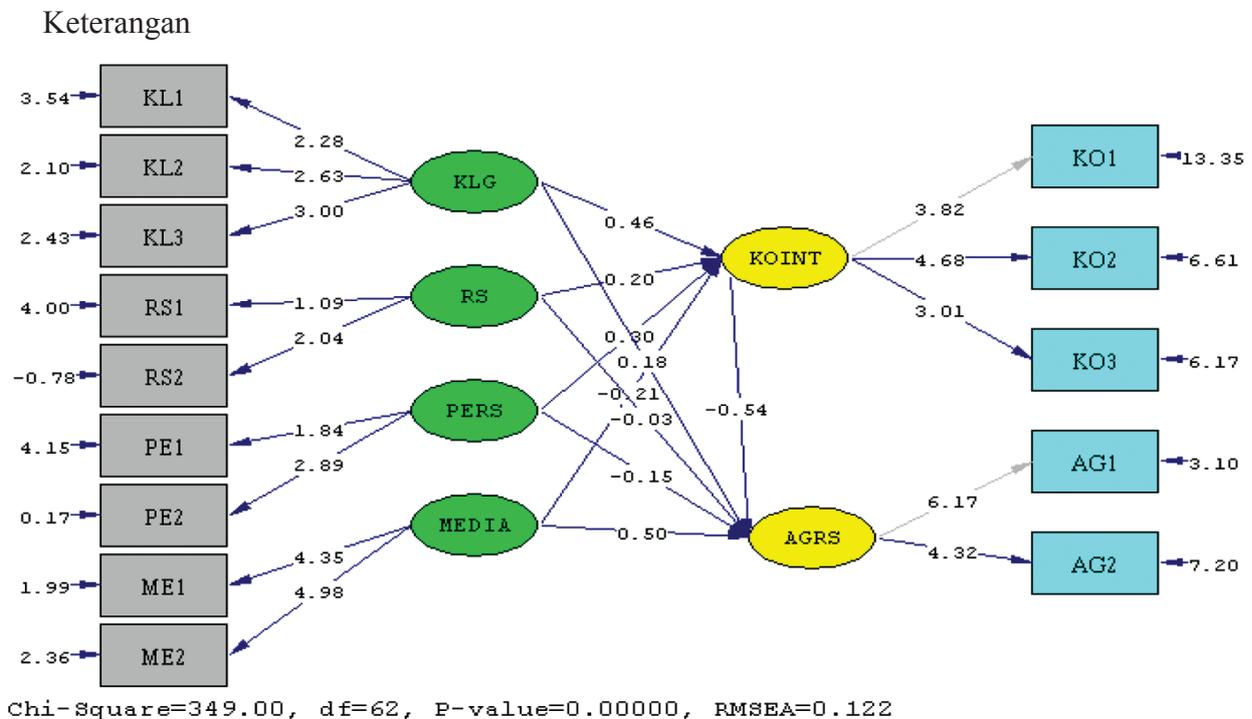


Diagram 2. Analisis Model menggunakan Structural Equation Modelling dengan LISREL

Keterangan:

KLG : Faktor Keluarga

RS : Faktor Rekan Sebaya

PERS : Faktor Lingkungan Sosial/tetangga

MEDIA : Faktor Media

KOINT : Kondisi Internal

AGRS : Perilaku Agresif

Diagram 2 menunjukkan skor pengujian koefisien beserta diagram jalur untuk setiap hubungan yang terjadi. Hubungan tersebut terjadi antara variabel konstruk (variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen) maupun antara variabel konstruk beserta indikator-indikatornya (faktor bobot koefisien variabel manifest eksogen maupun endogen).

Uji kausalitas

Hasil pengujian kausalitas berdasarkan model hipotetis faktor-faktor yang berpengaruh dalam munculnya perilaku agresif menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan bantuan *software* aplikasi statistik LISREL 8.8 didapatkan data sebagai berikut:

- a. Variabel keluarga/orangtua terhadap tingkah laku agresif remaja menunjukkan bahwa faktor keluarga/orangtua secara signifikan mempengaruhi tingkah laku agresif remaja. Hubungan yang terjadi adalah positif dan signifikan. Angka yang diperoleh adalah 0.45 (CR 2.53), artinya angka tersebut lebih besar dari angka standar signifikansi (α) = 5% ataupun 1.967. Hasil Uji ini menunjukkan bahwa keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku agresif.
- b. Variabel rekan sebaya terhadap tingkah laku agresif remaja menunjukkan bahwa rekan sebaya secara signifikan berpengaruh

terhadap tingkah laku agresif remaja. Walaub agaimanpun hubungan yang terjadi adalah tidak terlalu kuat signifikannya dan positif antara rekan sebaya dengan tingkah laku agresif remaja. Hasil yang diperoleh adalah 0.07 (CR 1.66) yaitu lebih kecil dari angka standar signifikansi (α) = 5% ataupun 1.967. Hasil Uji ini menunjukkan bahwa, dalam penelitian ini, faktor rekan sebaya kurang berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku agresif remaja.

- c. Variabel lingkungan sosial/tetangga terhadap tingkah laku agresif remaja menunjukkan bahwa lingkungan sosial/tetangga mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkah laku agresif remaja. Hubungan yang terjadi adalah signifikan dan negatif. Hasil pengujian diperoleh adalah angka -0.38 (CR -2.55) yaitu lebih besar (angka mutlak) dari angka standar signifikansi (α) = 5% ataupun 1.967.
- d. Variabel media massa terhadap tingkah laku agresif remaja menunjukkan bahwa faktor media massa mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap tingkah laku agresif remaja. Hubungan yang terjadi adalah signifikan dan positif. Angka yang diperoleh adalah 0.49 (CR 7.24) lebih besar dari angka standar signifikansi (α) = 5% yaitu 1.967.
- e. Variabel kondisi internal individu terhadap tingkah laku agresif remaja menunjukkan bahwa faktor kondisi internal individu mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkah laku agresif remaja. Hubungan yang terjadi adalah signifikan dan negatif. Hasil yang diperoleh adalah -0.61 (CR -7.38) lebih besar dari angka standar signifikansi (α) = 5% yaitu 1.967. Sebagaimana terlihat dalam resume pengujian pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Kausalitas

Variabel Independen	Variabel Dependen	Estimate	S.E.	C.R	Keputusan H0
Keluarga/orang tua	Kondisi internal individu	0.37	0.12	2.99	Ditolak
Rekan sebaya	Kondisi internal individu	0.15	0.05	3.32	Ditolak
lingkungan sosial/ Tetangga	Kondisi internal individu	0.16	0.12	1.36	Diterima
Media massa	Kondisi internal individu	-0.29	0.07	-4.39	Ditolak
Keluarga/Orangtua	Perilaku agresif	0.45	0.18	2.53	Ditolak
Rekan sebaya	Perilaku agresif	0.07	0.04	1.66	Diterima
lingkungan sosial/tetangga	Perilaku agresif	-0.38	0.15	-2.55	Ditolak
Media massa	Perilaku agresif	0.49	0.07	7.24	Ditolak
Kondisi internal individu	Perilaku agresif	-0.61	0.08	-7.38	Ditolak

Keterangan:

S.E : Standart Error

C.R : critical ratio

PEMBAHASAN

Uji Model

Hasil penelitian menunjukkan Chi-square yang diperoleh adalah 43.57 dengan $p = 0.083$ (lebih besar dari 0,05). Berdasarkan nilai yang diperoleh tersebut, maka kesesuaian model yang digunakan adalah sangat baik. Hal ini bermakna bahwa model yang ditawarkan, yang berupa struktur penyebab terjadinya perilaku agresif di kalangan remaja yang tinggal di permukiman kumuh, yang meliputi faktor keluarga/orangtua, lingkungan sosial/tetangga, rekan sebaya, media massa dan kondisi internal individu memang berpengaruh dalam pembentukan perilaku agresif remaja. Hal ini senada dengan hipotesis Susantyo (2011).

RMSEA adalah perbedaan per degree of freedom yang diharapkan terhadap populasi (dan bukannya di dalam sampel). $RMSEA \leq 0.08$ adalah *good fit*, sedang $RMSEA < 0.05$ adalah *close fit*. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai RMSEA sebesar $0.034 < 0,08$. Ini menunjukkan model yang digunakan dapat diterima sekiranya diukur dengan menggunakan RMSEA. Hal ini bermakna bahwa, struktur model tentang faktor-faktor determinan

penyebab perilaku agresif remaja yang tinggal di permukiman kumuh, jika diukur dengan menggunakan sampel, akan mendekati kondisi riil dalam populasi. Artinya, gambaran dalam replika model ini menunjukkan gambaran populasi yang sebenarnya.

Goodness of Fit Index (GFI) adalah pengukuran non-statistikal yang mempunyai rentang nilai antara 0 (*poor fit*) sampai mendekati angka 1.0 (*perfect fit*). Nilai yang tinggi di dalam indeks ini menunjukkan “better fit.” Hasil pengujian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah GFI sebesar 0.98. Dengan nilai GFI yang mendekati angka 1, maka model yang digunakan adalah fit dan sesuai diadaptasikan di dalam penelitian ini. Hal ini senada dengan pengukuran RMSEA, bahwa nilai (kondisi) hasil uji statistik dalam model ini, semakin mendekati kondisi riil pada populasi yang sebenarnya, yang ditunjukkan dengan perolehan skor mendekati angka 1 (sempurna).

Hasil pengujian AGFI yang diperoleh menunjukkan angka 0.94. Dengan ini, nilai AGFI yang hampir mendekati angka 0,95 menunjukkan bahwa model yang digunakan dapat diterima dengan memperoleh hasil keputusan yang baik. Hal ini bermakna bahwa skor yang diperoleh dalam pengujian model ini secara keseluruhan menunjukkan nilai yang cukup *adequate*, dalam arti gambaran

dalam model adequate dengan gambaran dalam populasi. Disamping itu, berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai CMIN/DF adalah 1.362. Hasil ini memberi gambaran bahwa model yang digunakan dapat diterima dengan hasil perolehan yang baik.

Terakhir, berdasarkan hasil pengujian didapati bahwa indeks CFI adalah 1.00, dan penggunaan model dikategorikan sebagai fit. Hal ini memiliki menunjukkan bahwa struktur model yang dihipotetiskan menyerupai kondisi asli dalam populasinya (secara statistisk). Dengan demikian secara *overall*, melalui serangkaian pengujian diatas, struktur model tentang faktor determinan penyebab perilaku agresif remaja di permukiman kumuh, yang dihipotetiskan dalam penelitian ini dapat diterima.

Uji kausalitas

Dari Tabel 3, tentang Hasil Uji Kausalitas, antara variabel independen keluarga, lingkungan sosial/tetangga, rekan sebaya dan media dengan kondisi internal remaja, diketahui bahwa rekan sebaya ternyata tidak secara signifikan berpengaruh terhadap kondisi internal remaja. Berbeda halnya dengan fariabel keluarga, lingkungan sosial/tetangga, dan media, yang ketiganya memiliki pengaruh yang signifikansi bagi kondisi internal remaja.

Faktor keluarga dalam penelitian ini berkaitan erat dengan derajat keberfungsian sosial (sosial functioning) sebuah keluarga. Jika merujuk pada pengukuran tingkat Sosial functioning dari Olson, Bell dan Lavee (1983), yang digunakan dalam penelitian ini, diketahuinya tingkat sosial functioning keluarga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung dalam kategori normal. Tingkat fungsi sosial keluarga yang demikian menurut temuan penelitian Masngudin (2001) termasuk dalam tingkat keluarga cukup bahagia dan cukup mampu memenuhi keperluan bagi keluarga

mereka, baik secara sosial, psikologis maupun ekonomi. Temuan penelitian ini sekaligus menjawab bahwa fktor keluarga memang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kondisi internal dan terjadinya perilaku agresif di kalangan remaja.

Variabel rekan sebaya (*peer group*) dalam penelitian ini, memang berpengaruh secara signifikan kepada kondisi internal individu, namun tidak pada munculnya perilaku agresif. Temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan tingkat penerimaan (*acceptance*) dan dukungan sosial (*sosial support*) yang tinggi di antara rekan sebaya yang sama-sama tinggal di kawasan permukiman. Hal ini merupakan kecenderungan yang wajar kerana usia remaja (14 – 15 tahun) sememangnya merupakan usia awal mulai tertariknya untuk berkumpul (bersatu) dan memberikan dukungan kepada sesama rekan sebayanya. Adanya dukungan sosial yang dipadukan dengan penerimaan (*acceptance*) yang baik di antara rekan sebaya inilah yang pada akhirnya melahirkan conformity (Zebua, 2003), yang memiliki tingkat kesetiaan yang relatif cukup tinggi di antara mereka. Dukungan kepada conformity di antara remaja ini biasanya ditunjukkan dalam identitas bersama, dalam bentuk persamaan tingkah laku dan sikap. Bahkan dalam kelompok rekan sebaya ini terjadi sifat saling pengaruh-mempengaruhi dan saling mendominasi Brown (1990). Temuan penelitian ini juga turut mendukung penelitian Brown (1990) dan menjawab sebuah pertanyaan mengapa remaja lebih tertarik, hormat dan bahkan patuh kepada kelompok rekan sebaya dibanding dengan anggota keluarga lain atau bahkan orangtua mereka sendiri? Hal demikian dikarenakan golongan remaja dalam rentang usia ini mulai menilai diri dan melakukan perbandingan-perbandingan sosial di antara rekan sebayanya yang lain yang pada akhirnya akan membentuk

self-image dan self-esteem (Hetherington & Parke, 1999; Webster, 2007).

Hasil uji pada variabel lingkungan sosial/tetangga menunjukkan bahwa, walaupun mereka hidup dalam lingkungan yang secara ekonomi berada dalam level bawah, bahkan cenderung miskin tetapi dalam segi pengawasan (*control*) dan penerimaan sosial, mereka memiliki tingkat yang cukup memadai. Dengan dukungan kehidupan sosial yang cukup baik, diharapkan akan membentuk tingkah laku sosial yang relatif baik pula bagi para anggota masyarakatnya. Hasil penelitian ini telah membalikkan kekhawatiran Dishion, French dan Patterson (dalam Yanti, 2005) bahwa lingkungan yang tidak ideal (termasuk lingkungan yang secara ekonomi nampak miskin) akan memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan tingkah laku sosial para anggotanya (Jimerson, Caldwell, Chase & Savarnejad, 2002). Secara mendasar, temuan penelitian ini sejalan dengan Proctor (2006), Hetherington dan Parke (1999) bahwa lingkungan di mana keluarga tinggal juga mempengaruhi perkembangan moral, keperibadian dan tingkah bagi anak-anaknya yang tinggal di dalamnya. Perkembangan moral, keperibadian dan tingkah laku yang dimaksudkan disini (Proctor, 2006; Hetherington & Parke, 1999) sebenarnya tidak lain merupakan hasil dari proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang dipegang oleh para anggota dalam lingkungan tersebut. Hal ini dikarenakan, terkadang nilai-nilai lingkungan ini begitu kuat bahkan sangat kuat dan bisa mempengaruhi nilai-nilai individu yang ada di dalamnya (Tedeschi & Felson, 1994).

Faktor media massa dalam penelitian ini menunjukkan bahwa media massa memiliki pengaruh yang signifikan bagi kondisi internal remaja, dan juga dalam memicu terjadinya perilaku agresif, khususnya remaja yang

tinggal di permukiman kumuh. Temuan ini cukup mengkhawatirkan, mengingat tingginya intensitas serta durasi mereka dalam “melahap” media massa yang berisi kekerasan (bacaan, video game, film-film yang berisi kekerasan dan lain-lain). Kekhawatiran ini wajar jika kita merujuk pada penelitian Sunarto, Rahardjo dan Pudjosantoso (2015). Keberadaan media massa (dalam hal ini tayangan video) yang sarat dengan adegan kekerasan, akan menghasilkan kekerasan (Dill & Dill, 1998;; Chowhan & Stewart, 2007). Hal demikian sejalan dengan perspektif dalam teori Stimulating Effects (*Aggressive Cues*) yang menunjukkan bahwa tayangan kekerasan (agresif) akan mempengaruhi tingkat emosi dan psikologis seseorang yang bisa meningkatkan perilaku kekerasan orang tersebut (Kirsh, 2006).

Kondisi internal dalam penelitian ini merujuk pada tiga indikator yaitu; 1) Kecerdasan emosi, 2) Tingkat kekecewaan, dan 3) Konsep diri. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi internal secara signifikan mempengaruhi terjadinya perilaku agresif di kalangan remaja. Hal demikian turut memperkuat temuan penelitian Aziz (2003) bahwa kecerdasan emosi yang cukup dan memadai akan meningkatkan rasa kepercayaan diri (*self confidence*) sehingga diharapkan akan terhindar dari masalah perilaku anti sosial/agresif. Bahkan Patrick dan Zempolich (1998) menemukan bahwa rasa marah merupakan faktor penting yang seringkali menyertai dalam pelbagai tindakan agresif yang berakhir dengan munculnya tindakan kekerasan. Penelitian Abu Bakar (2007) juga menemukan bahwa keputusan untuk marah atau tidak ini sangat dipengaruhi oleh kecerdasan emosi individu. Walaupun terkadang keputusan untuk marah atau tidak ini sebenarnya merupakan tingkah laku coping atas tekanan yang datang dari lingkungan sekitarnya. Tingkah laku coping

ini merupakan salah satu bentuk pengendalian keadaan emosi pada diri individu (Lestari, 2003).

Keadaan kecewa jika dibiarkan bisa mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan agresif secara pasif (Hidayah, Fauzan & Mappiareet, 1996). Jika merujuk kepada formulasi hipotesis kekecewaan-agresif (*frustration-aggression hypothesis*) keadaan ini sememangnya bisa mendorong terjadinya perilaku agresif. Temuan dalam penelitian ini juga turut mendukung penelitian McNally (2004) yang mendapati bahwa penyebab dari tingkah laku agresif ini adalah karena adanya perasaan kekecewaan dalam diri pelaku.

Konsep diri bisa berubah menjadi positif atau negatif tergantung seberapa kuat pengaruh lingkungan dan juga daya tahan individu untuk menerima maupun menolak pengaruh yang datang. Jika pengaruh lingkungan dan daya tahan individu kuat, menjadikannya perubahan konsep diri ke arah yang positif dan lebih baik perilakunya. Namun jika perubahan yang terjadi ke arah yang negatif, maka akan negatif pula perilaku yang ditampilkan, yang lebih sering ditunjukkan dengan kesulitan dalam penyesuaian diri dan adanya kecemasan sosial (Rosaline, 2003). Manakala perubahan konsep diri ke arah negatif ini terus terjadi, sehingga individu berada dalam level konsep diri yang rendah, akan menimbulkan perilaku antisosial dan agresif. Rendahnya konsep diri dengan terjadinya tindakan-tindakan agresif ini memiliki korelasi yang cukup signifikan (Mustika, 2003).

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mampu menjawab dua tujuan utama. Pertama, permodelan yang diusulkan dalam penelitian ini layak dan dapat diterima untuk menjadi sebuah model tentang faktor-faktor determinan penyebab perilaku

agresif di kalangan remaja yang tinggal di permukiman kumuh.

Kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku agresif yang dihipotetiskan dalam penelitian ini, meliputi; faktor keluarga/orang tua, rekan sebaya, lingkungan sosial/tetangga, media massa dan kondisi internal individu, secara uji statistik dapat diterima. Dalam penelitian ini faktor rekan sebaya berpengaruh secara signifikan kepada kondisi internal individu, namun tidak pada munculnya perilaku agresif itu sendiri.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, telah dirancang model intervensi Pekerjaan Sosial dalam pencegahan perilaku agresif di bagi remaja yang komprehensif, dan memungkinkan dilakukan secara bersamaan.

Skala Mikro

Intervensi skala mikro ini ditujukan langsung bagi individu (remaja), baik yang diduga mengalami masalah perilaku (agresif) maupun yang tidak. Bagi remaja yang sudah diidentifikasi mengalami masalah perilaku, beberapa pendekatan ini yang bisa diterapkan diantaranya; 1). Konseling, 2. Latihan mengendalikan amarah.:

1. Konseling.

Kegiatan ini bertujuan untuk membuka pemikiran remaja tentang tingkah laku agresif itu sendiri; apa manfaat memunculkan tingkah laku agresif? apakah tingkah laku agresif memang perlu untuk ditunjukkan? Bagaimana kerugian-kerugian yang ditimbulkan bagi diri sendiri dan juga orang lain, jika tingkah laku agresif ini muncul, dan sebagainya. Konseling ini dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan proses yang berkesinambungan (Mulai dari tahap membangun hubungan

sampai dengan evaluasi/pengakhiran). Salah satu teknik yang banyak digunakan dalam konseling adalah katarsis, yang ditujukan kepada individu yang telah diidentifikasi memiliki permasalahan psikologis. Katarsis ini bertujuan untuk melepaskan “keinginan” agresif secara sementara, dan diharapkan dapat mengurangi dorongan untuk berperilaku agresif. Inti dari katarsis ini adalah pelepasan emosi-emosi yang terpendam.

2. Latihan mengendalikan amarah.

Tujuan dari latihan ini adalah untuk menunjukkan kepada para remaja yang telah diidentifikasi berperilaku agresif tentang arti dan akibat dari kemarahan, dan bagaimana mengendalikannya.

Skala Messo

Intervensi dalam skala ini lebih dikhususkan bagi keluarga yang telah diidentifikasi memiliki anggota keluarga yang mengalami masalah tingkah laku (agresif). Intervensi yang bisa diterapkan meliputi konseling keluarga dan pembentukan Kelompok Bantu-diri maupun Kelompok Saling Dukung.

1. Konseling keluarga.

Ini merupakan penerapan konseling dalam situasi khusus. Konseling ini lebih fokus pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan pelaksanaan konselingnya juga melibatkan anggota keluarga. Permasalahan yang dialami oleh anggota keluarga (remaja dengan perilaku anti sosial/ agresif) akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga yang lain. Konseling ini bertujuan membantu anggota keluarga belajar memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan antara anggota keluarga yang lainnya. Juga, membantu anggota keluarga agar dapat menerima kenyataan bahwa jika

salah seorang anggota keluarga memiliki permasalahan, akan berpengaruh kepada persepsi, harapan, dan interaksi anggota keluarga lainnya. Terapi keluarga merupakan salah satu bentuk konseling keluarga.

2. Pembentukan kelompok bantu diri dan kelompok saling dukung (*self-help group and mutual support group*).

Kelompok ini merupakan sebuah kelompok kecil yang dibentuk secara sukarela oleh kelompok sebaya (*peers*) yang mempunyai tujuan untuk saling membantu diantara kelompok sebaya. Anggota kelompok ini bisa terdiri atas remaja-remaja yang mempunyai masalah perilaku atau para orang tua yang mempunyai anak remaja yang memiliki masalah perilaku.

Dalam Kelompok bantu diri dan kelompok saling dukung ini dimungkinkan untuk diberikan semacam latihan (*Workshop*) tentang pengasuhan/pendidikan keluarga. *Workshop* ini memiliki tujuan untuk mengajarkan kepada para orang tua dalam menerapkan pengasuhan anak (*parenting*) untuk memperkuat perilaku pro-sosial.

Skala makro

Intervensi dalam skala ini ditujukan bagi komunitas/lingkungan sosial di mana remaja tinggal, dengan tujuan untuk bersama-sama mencegah terjadinya perilaku agresif di kalangan mereka, atau secara bersama-sama mengatasi permasalahan perilaku yang ada. Ada dua model yang bisa diadopsi dalam skala intervensi ini, yaitu 1). Aksi sosial, dan 2). Pengembangan masyarakat lokal.

1. Aksi sosial (*social action*).

Pendekatan aksi sosial berdasarkan suatu pandangan bahwa masyarakat merupakan sistem klien (*client system*) yang seringkali menjadi korban ketidakadilan struktur. Aksi sosial memiliki orientasi kepada tujuan proses, disamping juga hasil. Aksi sosial ini

bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait dengan “kepedulian akan lingkungan sekitarnya”. Dalam hal ini, masyarakat digerakkan melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan yang tepat untuk memperbaiki struktur agar lebih memenuhi prinsip demokratis, kesetaraan (*equality*) dan keadilan (*equity*).

2. Pengembangan masyarakat lokal (*local development*).

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi melalui partisipasi serta inisiatif aktif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan semata sebagai sistem klien (pihak yang bermasalah) melainkan juga sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pendamping/pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

Antara aksi sosial dan pengembangan masyarakat lokal sangat mungkin diterapkan secara bersamaan, tanpa tersekat. Karena pada dasarnya setiap program pengembangan masyarakat sangat mungkin untuk diisi dengan aktifitas aksi sosial, demikian juga sebaliknya. Salah satu contoh perpaduan antara keduanya misalnya adalah “gerakan penataan lingkungan sehat”. Di satu sisi, menggerakkan masyarakat untuk sama-sama memperbaiki kualitas lingkungan mereka, disisi lain juga terselip aktifitas untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup para anggotanya. Contoh menarik lainnya adalah sebagaimana yang pernah

diterapkan oleh Corten (dalam Susantyo, 2007) dalam perspektif pengembangan masyarakat di desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Apresiasi disampaikan kepada Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI untuk semua dukungannya, sehingga terselenggaranya kegiatan penelitian ini. Juga Walikota Bandung, Camat Regol beserta Staf, Lurah Ciseureh, Lurah Ancol dan Lurah Cigereleng beserta Staf, juga para “remaja” di tiga kelurahan tersebut yang telah berpartisipasi memberikan data dan informasi yang berguna bagi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, M. (2007). Perkaitan antara hubungan keluarga, pengaruh rakan sebaya dan kecerdasan emosi dengan tingkah laku delinkuen pelajar. *Fakulti Pendidikan. Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia.*
- Anderson, C.A. & Anderson, K.B., (1998). “Temperature and aggression: Paradox, controversy, and a (fairly) clear picture”. In R.G. Geen & E. Donnerstein (Eds). *Human aggression: Theories, research and implications for social policy.* San Diego, CA: Academic Press.
- Aziz, W. (2003). Hubungan antara kemampuan pengendalian emosi dengan kepercayaan diri pada remaja. *Status siswa-siswi Kelas II SMK Satria Jakarta.* Jakarta: Universitas Tarumanegara.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2010). *Bandung dalam angka.* Bandung: Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory,* New Jersey: Prentice – Hall, Inc.

- Baron, R. A., Bryne, D., & Suls, J. (1994). Aggression and heat: Mediating effects of prior provocation and exposure to an aggressive model. *Journal of Personality and Social Psychology*, 31, 825 – 832.
- Berkowitz, L. (1984). Some effects of thoughts on anti and prosocial influence of media events. A cognitive neoassociationist analysis. *Psychological Bulletin*, 95, 410 - 427.
- Berkowitz, L., & Green, R. G. (1967). Stimulus qualities of the target of aggression: A further study. *Journal of personality and Social Psychology*, 5, 364 – 368.
- Brehm, S.S., & Kassin, S.M. (1993). *Social psychology*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Brigham, J.C. (1991). *Social psychology*. New York: Harper Collingns Publishers Inc.
- Bronfenbrenner, U. (1989). Ecological systems theory. In R. Vasta (Ed.), *Annals of child development*, Vol. 6 (pp. 187–249). Greenwich, CT: JAI Press.
- Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human development. In W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), *Handbook of child psychology*, Vol. 1: Theoretical models of human development (6th ed., pp. 793–828). New York: John Wiley.
- Brown, F.J. (1990). *Educational psychology*. (2nd ed.). New Jersey: Prentice Hall Engelwood.
- Bushman, B.J. & Cooper, H.M. (1990). “Effects of alcohol on human aggression: An integrative research review. *Psychological Bulletin*, 107, 341-354.
- Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The aggression questionnaire. *Journal of Personality & Social Psychology*, 63, 452-459.
- Carlson, M., Marcus-Newhall, A. & Miller, N. (1990). Effects of situational aggression cues: A quantitative review. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58, 622-633.
- Chermack, S.T., & Giancola, P.R. (1997). “The relation between alcohol and aggression: An integrated biopsychosocial conceptualization”. *Clinical Psychology Review*, 17, 621-649.
- Chowhan, J. & Stewart, J. M. (2007). Television and the behaviour of adolescents: Does socio-economic status moderate the link? *Social Science & Medicine*. 65, 1324–1336
- Crowe, T. D. (2000). *Crime prevention through environment design: Applications of architectural design and space management concepts*. (2nd ed.). National Crime Prevention Institute, Butterworth-Heinemann.
- Dill, K.E. & Dill. J.C. (1998). Video game violence: A review of the empirical literature. *Aggression and Violent Behavior*, 3 (4), 407–428.
- Dunkin, K. (1995). *Developmental social psychology. From Infancy an old age*. Oxford: Blackwell Publisher Ltd.
- Flannery, D.J., Vazsonyi, A.T. & Waldman, I.D. (2007). *The cambridge handbook of violent behavior and aggression*. (Eds.). Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo: Cambridge University Press

- Hall & Lindzey.(1993). Psikologi kepribadian. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hetherington, E.M & Parke, R.D. (1999). Child psychology: A contemporary view point (5th ed.). Boston: Mc Graw-Hill College.
- Hidayah, N.R, Fauzan, L.M & Mappiare, A.A.T. (1996). Sikap orangtua sebagai sumber perilaku agresif anak. Diakses pada 9 Oktober 2012 dari <http://www.malang.ac.id/jurnal/fip/ilpen/1996a.htm>.
- Jimerson, S. R., Caldwell, R., Chase, M. & Savarnejad, A. (2002). Conduct disorder. Santa Barbara: University of California.
- Kirsh, S.J. (2006). Cartoon violence and aggression in youth. *Aggression and Violent Behavior*, 11, 547–557.
- Koswara, E. (1988). Agresi manusia. Bandung: PT. Eresco.
- Krahe, B. (2001). The social psychology of aggression: social psychology a modular course. United Kingdom: Psychology Press Ltd: Taylor and Francis group.
- Kusnendi. (2007). Model-model persamaan struktural. Satu dan multi group sample dengan lisrel. Bandung: Alfabeta.
- Levy-Warren, M. (1996). The Adolescent journey: Development, identity formation and psychoterpy. New Jersey: Jason Aronson Inc.
- Lestari, B. (2003). Hubungan antara stres lingkungan dengan perilaku coping. Suatu penelitian pada masyarakat di salah satu RW, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Jakarta: Universitas Tarumanegara.
- Masngudin,H.M.S. (2001). Kenakalan remaja sebagai perilaku menyimpang hubungannya dengan keberfungsian sosial keluarga: Kasus di pondok pinang pinggiran Kota metropolitan Jakarta: Laporan penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- McNally, I. M. (2004). Causal factors in weekend city center aggression. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 19 (1), 46 - 57
- Mustika, F.R. (2003). Penelitian korelasi antara konsep diri dengan agresivitas pada pelaku penjarahan dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Jakarta: Universitas Tarumanegara.
- Patrick, C.J. & Zempolich, K.A. (1998). Emotion and aggression in the psychopathic ersonality. *Aggression and Violent Behavior*, 3 (4), 303–338.
- Proctor, L.J. (2006). Children growing up in a violent community: The role of the family. *Aggression and Violent Behavior*, 11, 558–576.
- Rosaline (2003). Hubungan antara konsep diri dan kecemasan sosial dengan penyesuaian pada remaja tuna daksa. Jakarta: Universitas Tarumanegara.
- Sunarto, Rahardjo, T. & Pudjosantoso, H. (1997). Pengaruh video game terhadap perilaku agresif remaja di Kotarmadia Semarang. Retrieved May 18, 2015 from <http://hqweb01.bkkbn.go.id/hqweb/ceria/sslappage1.html>
- Susantyo, B. (2011). Memahami Perilaku Agresif: Sebuah Tinjauan Konseptual.

- Jurnal Informasi. (16), 3, 189-202.
- Susantyo, B. (2007). *Community development dalam praktik pekerjaan sosial*. Bandung: STKS Press.
- Susantyo, B. (2007). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Pedesaan.. Jurnal Informasi. (12), 3, 177-198.
- Tedeschi, J.T. & Felson, R.B. (1994). *Violence, aggression, and coercive actions*. Washington DC: American Psychological Association.
- Webster, G.D. (2007). Is the relationship between self-esteem and physical aggression necessarily U-shaped?. *Journal of Research in Personality*, 41, 977-982.
- Wiggins, J.A., Wiggins, B.B., & Zanden, J.V., (1994). *Social psychology*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Wijayanto, S.H. (2008). *Struktural equation modelling dengan lisrel 8.8: Konsep & tutorial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yanti, D. (2005). *Ketrampilan sosial pada anak menengah akhir yang mengalami gangguan perilaku*. Makalah. Medan: Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU).
- Zastrow, C. (2008). *Introduction to social work and social welfare: Empowering people*. George Williams College of Aurora University: Thomson, Brook/Cole.
- Zebua, A.S. (2003). *Hubungan antara konformitas dan konsep diri dengan perilaku konsumtif remaja putri*. Penelitian pada SMU Tarakanita 1. Jakarta: Universitas Tarumanegara.

REHABILITASI SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT BAGI KORBAN MENYALAHGUNAAN NAPZA DI YOGYAKARTA

COMMUNITYBASED SOCIAL REHABILITATION FOR DRUG ABUSER IN YOGYAKARTA

Gunawan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur, Telp. 021-8017146,
Email: gun_prawiro@yahoo.co.id

Diterima: 16 Maret 2016; Drevisi: 19 Oktober 2016; Disetujui: 14 Desember 2016

Abstrak

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai angka prevalensi penyalahgunaan Napza cukup tinggi yakni mencapai 2,8% dari jumlah penduduk rentan. Dalam penanggulangan Korban Napza, masyarakat merupakan unsur penting dalam upaya rehabilitasi sosial bagi korban narkoba dan semakin dibutuhkan ketika kapasitas lembaga pemerintah sudah tidak dapat menampung korban Narkoba yang semakin banyak. Naskah ini merupakan penelitian tentang penyelenggaraan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat di Yogyakarta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kondisi RBM di wilayah tersebut. Data dihimpun dengan teknik (a) wawancara mendalam, (b) studi dokumentasi, (c) observasi dan (d) diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil studi kasus menunjukkan bahwa RBM telah terbentuk sampai di tingkat desa, bahkan beberapa RBM telah dijadikan program Desa. Kegiatan RBM lebih terkonsentrasi pada komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dari segi jumlah, RBM merupakan suatu kekuatan besar dalam pencegahan penyalahgunaan Napza yang perlu diperhitungkan dalam penentuan program. Optimalisasi peran RBM diperlukan peningkatan kapasitas pengurus dan anggota RBM. Peningkatan kapasitas dimaksud dapat difasilitasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang ada pada instansi sektoral, atau lebih khusus di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.

Kata kunci: rehabilitasi sosial, basis masyarakat, korban napza.

Abstract

Yogyakarta has noted that has had high prevalence of drug abuser which reach in 2.8% of the vulnerable population. In terms of overcoming those drugs abuse, community has seen as an important element. Its seen as a strategic way when the capacity of government institutions is very limited. This paper is a case study of the implementation of Community-Based Rehabilitation in Yogyakarta. The purpose of research is to describing the condition of RBM in the region. Data compiled by the technique (a) in-depth interviews, (b) documentary study, (c) observation and (d) focus group discussions (FGD). The results of case studies indicate that CBR had build up at the village level, and even some of CBR has been used as a Village program. CBR activities are more concentrated on communication, information and education to the community. In terms of numbers, RBM is a major force in the prevention of drug abuse that needs to be taken into account in determining the program. Optimizing the role of CBR are necessary to increase the capacity of management and members of RBM. Capacity building may be facilitated by education and training institutions that exist, or more specifically at the Center for Education and Training of the Ministry of Social Welfare.

Keywords: social rehabilitation, community base, drug abuser.

PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu dan Pengetahuan di bidang farmakologi telah berhasil menemukan berbagai jenis narkotika baru sintetik dan dikemas dalam berbagai bentuk. Menurut catatan dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan 65 jenis narkotika yang dikategorikan dalam Golongan I, Golongan II sebanyak 86 jenis, dan 14 jenis masuk dalam kategori Golongan III. Khususnya narkotika kategori Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Jumlah ragam jenis narkotika ini belum termasuk narkotika jenis baru (New Psychoactive Substances, NPS) di dunia saat ini terdapat 354 jenis NPS dan di Indonesia ditemukan 29 NPS. Kebutuhan NPS ini diperkirakan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan narkotika (Poernamasasi, 2014). Pada tahun 2015 BNN menemukan dua jenis zat baru (*new psychoactive substances*) yaitu CB-13 dan 4-klorometkatinon. Sehingga total NPS yang telah ditemukan BNN hingga akhir tahun 2015 yakni sebanyak 37 jenis (BNN:2015).

Kemajuan di bidang farmakologi telah memberikan kontribusi besar untuk penyembuhan berbagai penyakit. Namun dibalik kemajuan yang telah dicapai, zat-zat yang bersifat NAPZA juga disertai dengan meningkatnya penyalahgunaan NAPZA. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan tersebut tidak hanya merusak fisik dan mental bagi korban, tetapi juga dapat berkaitan dengan masalah sosial dan ekonomi, bahkan penyakit yang lain seperti HIV dan AIDS

Selama hampir lima dekade (sejak ditetapkannya penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika sebagai permasalahan nasional yang menonjol (Instruksi Presiden Nomor 6

Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional) upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan dampaknya telah banyak membuahkan hasil yang positif. Namun secara kuantitatif, korban penyalahgunaan narkotika masih tergolong tinggi. Berdasarkan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba pada 2011, angka prevalensi atau pengguna di Indonesia sebesar 2,2 persen atau 4,2 juta orang. Meski masih di bawah proyeksi prevalensi sebesar 2,23 persen, angka tersebut mengalami peningkatan dan masih terus meningkat (Rosarians, 2014).

Jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (current users) pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia. Dengan bahasa lain ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang dari mereka yang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai narkoba di tahun 2014 (BNN, 2015)

Persoalan yang lebih membutuhkan keseriusan dalam penanganan korban narkotika adalah meningkatnya jumlah pengguna napza di usia remaja. Sebagai ilustrasi, catatan Direktorat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, pada tahun 2011, siswa SMP pengguna napza berjumlah 1.345 orang. Tahun 2012 naik menjadi 1.424 orang, sedangkan pengguna baru pada Januari-Februari 2013 tercatat 262 orang. Di kalangan SMA, pada 2011 tercatat 3.187 orang, tahun berikutnya menjadi 3.410 orang. Adapun kasus baru tahun 2013 tercatat 519 orang. (Kompas, 2013).

Perkembangan jumlah pengguna narkotika ini juga tercermin dari laporan RSKO tahun 2013, sebagian besar (65,17%) pasien rawat jalan dan rawat inap penyalahguna narkoba di RSKO adalah pasien penyalahguna narkoba dengan status pengguna lama. sedangkan

sisanya (34,83%) adalah pengguna baru (Pusdatin Kemenkes RI, 2014). Sebagian dari penyalah guna lama ini kemungkinan besar adalah penyalahguna narkoba yang kambuhan. Penyalahguna kambuhan biasanya sudah berhenti mengkonsumsi narkoba tetapi kemudian kembali lagi menjadi pengguna narkoba. Kambuh atau relapse merupakan suatu tantangan yang tak terpisahkan dari proses panjang menuju pemulihan penuh. Kendati mantan penyalahguna sudah dapat lepas dari ketergantungan narkoba untuk jangka waktu tertentu, tetapi kecenderungan untuk menggunakan zat-zat tersebut masih akan terasa. Data dan informasi ini mengindikasikan bahwa persoalan korban narkoba masih cukup besar. Di satu sisi jumlah korban yang ada belum memperoleh ketuntasan penanganan sementara itu masih ditambah jumlah korban/pecandu baru.

Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai tingkat kerawanan (kerentanan) terhadap penyalahgunaan Napza cukup tinggi. Hasil penelitian BNN dengan Puslitkes UI Tahun 2011 mengungkapkan, bahwa prevalensi DIY 2,8% dari jumlah penduduk rentan atau sekitar 69.700 orang, dengan kategori maksimal coba pakai 27,414 orang, teratur pakai 40,384 orang, pecandu suntik 1,717 orang, pecandu bukan suntik 24,822 orang dengan distribusi kelompok penyalahguna adalah pekerja, pelajar, WPS, dan anak jalanan. Adapun jenis Narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, ekstasi, shabu, dan pil koplo. (BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014).

Upaya perlindungan dan penyelamatan bangsa dari penyalahgunaan narkoba, penanganan bagi pecandu narkoba telah mengalami perkembangan, yakni pengalihan sanksi pidana ke sanksi rehabilitasi. UU 35/2009 tentang Narkoba, Pasal 54 menegaskan bahwa

Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Peraturan perundangan ini telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba yang menegaskan bahwa pecandu narkoba harus menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Terbitnya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Sanksi rehabilitasi bagi korban narkoba bukan hanya sebagai alternatif untuk mengatasi persoalan keterbatasan kapasitas tampung rumah tahanan, karena sanksi pidana dipandang tidak efektif untuk perubahan perilaku. Menurut Riza Sarasvita, & Rahardjo Budi (2014) bahwa pemenjaraan tidak merubah perilaku pengguna ke arah yang positif. Artinya dari sisi psikologi pecandu, hukuman pidana tidak memberikan penjeraan kepada pecandu untuk berhenti mengkonsumsi narkoba. Terkait dengan pandangan ini, Kristianingsih (2009) memprediksikan bahwa setelah keluar dari penjara, kemungkinan besar narapidana akan melakukan lagi tindak kriminalitas seperti yang dilakukan sebelumnya, khususnya pada

narapidana narkoba, sehingga kemungkinan untuk masuk lagi ke penjara cukup besar. Menurut Simanungkalit (2011: 259), titik ekstrem dari efek negatif yang muncul pada keluarga terpidana adalah pemberian cap atau stigma dari masyarakat, sehingga kerap kali dikucilkan dari lingkungan sosial. Salah satu faktor penting dari keengganan masyarakat untuk menerima kembali bekas narapidana antara lain: pertama tidak responsifnya hukum bagi keadilan masyarakat, di mana kerugian akibat tindak pidana yang diderita masyarakat tidak bisa semata mata dipulihkan karena hukuman yang kejam dan berat. Namun harus ada suatu bentuk pidana yang dapat memulihkan hubungan sosial pelaku dengan korban maupun masyarakat. Kedua karena tidak adanya falsafah pemidanaan. Hal ini didasarkan karena masyarakat Indonesia maupun aparat penegak hukum serta petugas pemasyarakatan masih memandang pidana penjara itu tujuannya adalah memberikan rasa sakit (penjeraan), bahkan mencabut kebebasan narapidana selama di penjara. Oleh karena itu falsafah pemidanaan harus bertujuan kepada kesejahteraan masyarakat dan ketertiban negara. Menurut Mardiah, A. Din, M, dan Nirzali, R (2012) Sanksi pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama merumuskan tujuan pemidanaan adalah adanya keseimbangan dua sasaran pokok yaitu “perlindungan masyarakat dan pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Dari aspek hukum, korban penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang wajib menjalani rehabilitasi. Persoalannya adalah jumlah lembaga yang memberikan pelayanan rehabilitasi korban Narkotika masih sangat terbatas dan belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan jumlah Korban Narkotika. Kondisi ini mengisyaratkan pentingnya partisipasi masyarakat luas dalam

penyelenggaraan rehabilitasi. Peran masyarakat dalam bidang rehabilitasi tercermin dari UU 35/2009 tentang Narkotika Pasal 57: Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Terkait dengan peraturan perundangan ini, Menteri Sosial memberi peluang besar kepada masyarakat untuk turut serta dalam rehabilitasi sosial. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Pasal 29 ayat (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA tersebut juga telah banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Sebagai ilustrasi, fenomena tersebut dapat dilihat dari kepedulian masyarakat baik secara individual maupun kelompok yang tergabung dalam organisasi sosial seperti Pesantren Suryalaya sebagai pusat rehabilitasi narkoba yang dibangun oleh Abah Anom.

Fenomena kepedulian masyarakat khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diamati juga dari (1) pesan moral yang dituangkan dalam bentuk poster dan grafiti di sekitar gang (jalan) masuk permukiman masyarakat, larangan penggunaan narkotika di lingkungan sekolah, kampus dan hotel; (2) Penyadaran tentang bahaya penyalahgunaan di sekolah dan pada event yang dianggap penting oleh masyarakat; (3) antusias masyarakat dalam kompetisi “Lomba Kampung Bersih Narkoba” yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional Yogyakarta tahun 2010.

Kepedulian masyarakat tersebut juga dapat diamati dari dukungan masyarakat dalam pembentukan lembaga yang disebut Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM). Menurut Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Penyalahguna Napza Departemen Sosial RI, 2009, RBM merupakan kegiatan terpadu untuk menangani korban Napza dan HIV/AIDS di masing-masing wilayah dengan mendayagunakan partisipasi masyarakat setempat.

Dalam upaya penjangkauan pelayanan korban penyalahgunaan narkoba, RBM berpotensi besar dalam pelayanan rehabilitasi. RBM sebagai salah satu pilar (kekuatan) dalam pelayanan. Persoalannya adalah bagaimana kondisi RBM tersebut. Apakah RBM yang ada telah mampu memainkan peran dalam rehabilitasi sosial bagi korban/pecandu. Dalam kerangka analisis yang komprehensif, diperlukan data dan informasi yang dihimpun dari RBM lokal (RBM yang dibentuk di tingkat desa/kelurahan) dan RBM yang dibentuk oleh komunitas.

METODE

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2014 ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui kondisi RBM yang berkiprah dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. RBM dimaksud adalah RBM yang diinisiasi Kementerian Sosial yang ditempatkan di Provinsi, RBM yang diinisiasi Dinas Sosial yang ditempatkan di desa, dan komunitas pecandu dan mantan pecandu.

Pokok bahasan dalam penelitian ini meliputi: (1) Institusionalisas Lembaga RBM; (2) Sumber daya manusia; (3) Fasilitas RBM; (4) Peran RBM dalam Rehabilitasi Sosial; (5) Jejaring dan Mitra RBM; (6) Keberlanjutan Kelembagaan RBM.

Dalam kerangka penghimpunan data yang holistik (menyeluruh), digunakan teknik: (a) wawancara mendalam kepada Ketua/pengurus RBM, (b) studi dokumentasi, (c) observasi di lembaga RBM, dan (d) diskusi kelompok terarah (FGD) dengan Ketua RBM, Tokoh masyarakat, instansi sektoral (perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Kepolisian, BNNK Yogyakarta, Dinas Kesehatan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai predikat sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota wisata. Sebagai kota kebudayaan berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan budaya bernilai tinggi semasa kerajaan-kerajaan tersebut yang sampai kini masih tetap lestari, Kota Pelajar berkaitan dengan sejarah dan peran kota ini dalam dunia pendidikan di Indonesia, Sebagai kota wisata menggambarkan potensi propinsi ini dalam kacamata kepariwisataan. Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali (Dikpora, 2015).

Sebagai kota budaya, Yogyakarta mempunyai kekayaan seni dan budaya, adat istiadat yang masih terjaga secara turun temurun. Nilai, norma dan ilmu pengetahuan serta religi telah dijadikan sebagai ciri khas masyarakat. Sebagai ilustrasi, catatan yang terdapat di monumen Batik Yogyakarta, adalah *United Nations Educational, Scientific, and Culture Organization* (UNESCO) telah menegaskan bahwa Batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia (*World Heritage*) pada tanggal 2 Oktober 2009, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditetapkan sebagai Kota Batik Dunia *World Craft Council* (WCC) tahun pada 2014.

Dalam praktik kehidupan dan kehidupan bermasyarakat, aturan (norma) lokal yang melandasi perilaku hubungan antar masyarakat

(khususnya masyarakat Jawa) masih cukup kuat. menurut kepala Dinas Sosial kabupaten Sleman, Masyarakat Yogyakarta masih kental dengan budaya Jawa dan nilai kekeluargaan dan tanggung jawab sosial yang dimanifestasikan dalam bentuk Tolong menolong dan kerjasama (gotong-royong). Penyelesaian suatu persoalan yang dipandang penting untuk masyarakat selalu dimusyawarahkan (dalam terminologi lokal disebut dirembug bebarengan)

Nilai (rembugan) yang ada di dalam masyarakat ini dapat dipahami sebagai salah satu modal sosial terutama untuk meringankan beban pekerjaan termasuk didalamnya adalah pemecahan masalah. Menurut Field (2010) mengemukakan Modal sosial bisa disebut dengan modal selama hal ini melahirkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan aktor individu dan kelompok untuk mencapai tujuan mereka secara lebih efektif dari pada mereka melakukan tanpa modal sosial dimaksud. Tolong menolong dan gotong royong ini juga dapat berfungsi sebagai sumber energi sosial masyarakat. Menurut Soetomo (2012) Sumber energi sosial dalam masyarakat berupa nilai kemandirian, solidaritas, kesadaran kolektif, tanggung jawab sosial yang mendorong terwujudnya tindakan bersama. Tidak dapat diingkari bahwa setiap orang sebagai individu mempunyai aspirasi, kepentingan yang dapat berbeda dengan orang lain sesama warga masyarakat. Kunci terpeliharanya energi sosial adalah adanya komitmen bersama dan kesadaran akan tujuan bersama.

Dibalik sederetan predikat yang melekat, DIY juga mempunyai sejarah dalam perkembangan peredaran narkoba yang cukup diperhitungkan. Yogyakarta pernah mempunyai posisi penting untuk pengelolaan dan peredaran Narkoba (khususnya Candu). Persediaan Candu setengah matang di pabrik Wonosari

pada bulan November 1948 sebanyak tiga ton, sedangkan di pabrik Beji satu ton (Ibrahim, 2013). Kini, industri candu di DI Yogyakarta tinggal kenangan.

Meskipun sudah puluhan tahun pabrik candu di Yogyakarta sudah tiada, namun peredaran narkoba di daerah ini masih tergolong tinggi. Kondisi ini tercermin dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sangat tinggi. DI Yogyakarta merupakan provinsi yang memperoleh peringkat ke lima paling rawan dalam peredaran narkoba. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DI Yogyakarta pada tahun 2014 mencapai 2,37 persen dari total 2,62 juta penduduk yang berusia 10-59 tahun (Pratama, 2015)

Rembug desa, tolong menolong dan gotong Royong di lingkungan masyarakat merupakan suatu mekanisme potensial untuk penanganan masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dalam kerangka penanggulangan Penyalahgunaan Napza, kebersamaan masyarakat sebagai suatu energi mungkin lebih mudah dan efektif dimanifestasikan untuk pencegahan penyalahgunaan napza. Persoalannya, apakah mekanisme tersebut dapat berfungsi sebagai energi sosial dalam rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza?. Meskipun agama dan etika telah mengajarkan kepada masyarakat untuk tolong menolong, namun untuk kasus korban penyalahgunaan napza masih banyak mengalami hambatan. Salah satu hambatan yang cukup kuat adalah adanya stigma masyarakat terhadap pecandu/korban penyalahgunaan napza.

Dampak dari stigma masyarakat tersebut adalah korban penyalahgunaan napza mendapat perlakuan yang kurang baik seperti: pengucilan, kecurigaan masyarakat yang seringkali berlebihan, tidak ada kepercayaan

dari masyarakat. Stigma masyarakat tersebut dapat dipandang sebagai sanksi sosial bagi korban. Uraian ini mengindikasikan bahwa pandangan masyarakat tentang seseorang yang bermasalah dengan penyalahgunaan napza adalah orang yang melanggar hukum. Masyarakat belum memahami secara baik tentang istilah korban penyalahgunaan napza. Sebagai korban tentunya mempunyai posisi yang sama sebagaimana korban bencana yang membutuhkan pertolongan dari orang lain.

Dalam kerangka pertolongan bagi Pecandu/korban Napza RBM yang dijumpai dari penelitian ini adalah (1) RBM yang pembentukannya diinisiasi Kementerian Sosial, yakni RBM Putra Mataram dan mempunyai wilayah kerja di tingkat provinsi dan berkedudukan di Provinsi; (2) RBM lokal (desa) yang pembentukannya diinisiasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota; RBM yang dijumpai adalah RBM Bariton (Barisan Tolak Narkotika) dan RBM Gerhana; dan (3) ARMETH (All Recovering Addict and Metadoners) yakni perkumpulan pecandu dan mantan pecandu yang bertujuan untuk pemulihan korban Napza. Khususnya lembaga yang dibentuk oleh komunitas pecandu dan mantan pecandu, keanggotaannya tidak dibatasi dengan satuan wilayah geografis (*teritory*) dimana mereka tinggal, tetapi mereka didorong dan diikat dengan kesamaan perasaan (*community sentiment*) dan kepentingan bersama (*community of common interest*) yang bersifat fungsional.

RBM atau yang lebih dulu dikenal adalah CBR (*Community Based Rehabilitation*) pada awalnya dipergunakan untuk penjangkauan pelayanan rehabilitasi bagi orang dengan kecacatan (korban perang pasca Perang Dunia II). Dalam perkembangannya, strategi tersebut telah dikembangkan dan diimplementasikan untuk penanganan masalah sosial lainnya termasuk korban penyalahgunaan Napza.

Dalam perkembangan pelayanan RBM telah dijadikan sebagai nomenklatur program dan lembaga.

RBM merupakan salah satu strategi dalam perluasan jangkauan pelayanan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai basis utama dalam pelayanan. Masyarakat lokal akan memiliki otoritas yang nyata dan tanggungjawab untuk mengelola layanan-layanan dengan cara yang paling sesuai dengan keadaan mereka. Masyarakat lokal akan menetapkan prioritas mereka sendiri, sebagai contoh dalam menggunakan sumber daya perawatan kesehatan Kontribusi dari semua anggota masyarakat akan dihargai dan didorong. Fasilitas masyarakat (sekolah, klinik, kantor, gedung gedung dan lain lain) akan dipakai bersama, ketimbang digunakan untuk tujuan tunggal dan berbagai kegiatan masyarakat akan diintegrasikan (Ife, 2006).

Dalam kerangka penerapan strategi yang menempatkan masyarakat sebagai basis kekuatan, keberhasilan dalam penyelenggaraan RBM sangat ditentukan oleh seberapa besar partisipasi masyarakat. Menurut Komisi Brundland dalam Clark, 1995, bahwa salah satu prasyarat utama terjadinya pembangunan berkelanjutan adalah menjamin efektivitas partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Cary J Lee dalam Iskandar (1993) mengemukakan:

- a. Setiap warga masyarakat harus berpartisipasi secara aktif di dalam upaya perubahan masyarakat
- b. Partisipasi warga masyarakat itu haruslah seluas mungkin
- c. Partisipasi warga masyarakat itu harus dilaksanakan melalui organisasi-organisasi yang demokratis.

Partisipasi masyarakat luas merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan

pelayanan berbasis masyarakat. Partisipasi sebagai konsep, Menurut Davis (1967) mengemukakan *participation is defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them*. Sebagai tolok ukur dari partisipasi Ndraha (1990) menyebutkan ada 5 bentuk sumbangan yakni (1) partisipasi buah pikiran (2) partisipasi keterampilan, (3) partisipasi Tenaga, (4) partisipasi harta benda, dan (5) partisipasi uang.

Telaahan terhadap terbentuknya RBM di Yogyakarta, ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati yakni (1) Kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Napza. Kesadaran masyarakat tersebut tercermin dari semangat masyarakat (baik masyarakat umum maupun masyarakat pecandu dan mantan pecandu) untuk membangun suatu kekuatan dalam penanggulangan penyalahgunaan Napza; (2) peran pemerintah, bahwa berkembangnya lembaga RBM di Yogyakarta tidak terlepas dari peran Dinas Sosial. Sebagai ilustrasi, peran Pemerintah ini tercermin dari (1) Pemerintah Pusat (Kemensos) dalam pembentukan RBM Provinsi (RBM Putra Mataram); (2) Peran Instansi Sosial Kabupaten dalam Pembentukan RBM Desa; dan (3) dukungan BNNK yang memfasilitasi kegiatan perkumpulan Armeth (*All Recovering Addict and Metadoners*).

Informasi ini mengindikasikan bahwa sinergitas peran dari kedua unsur (pemerintah dan masyarakat) sangat penting. Di tingkat masyarakat, inisiasi dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menstimuli berjalannya lembaga yang terbentuk di tengah masyarakat. Dalam kerangka penanganan masalah Soetomo (2012) mengemukakan tiga variasi yakni: Variasi pertama adalah pemanfaatan institusi yang sudah ada karena institusi yang ada masih dipandang efektif dalam memfasilitasi aktivitas

bersama Variasi kedua adalah pemanfaatan institusi yang sudah ada tetapi sesuai dengan perkembangan tuntutan perkembangan membutuhkan modifikasi. Modifikasi diperlukan untuk mempertahankan bahkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Variasi ketiga adalah pembentukan institusi baru. Sebagai lembaga bentuk baru sifat institusi ini bukan terbentuk melalui proses spontan dan alamiah, melainkan dibentuk dengan sengaja atau by design. Pertimbangannya adalah karena institusi yang sudah ada masih belum mampu atau paling tidak belum mencukupi untuk merespon tuntutan kebutuhan sesuai dinamika perkembangan yang ada. Dari variasi yang dikemukakan Soetomo tersebut, dapat dikemukakan bahwa RBM yang terbentuk adalah lembaga yang masuk dalam kategori yang ketiga. Artinya lembaga tersebut di design sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan napza termasuk di dalamnya adalah untuk rehabilitasi sosial.

Ditinjau dari segi proses, meskipun sudah ada empat unsur ikatan (Gagasan, Normatif, Tindakan, dan Perhatian baik secara individu maupun kolektif), namun dalam penyelenggaraan kegiatannya di tengah masyarakat tidak dapat terlepas dari peran faktor eksternal. Dukungan dari masyarakat luas dan pemerintah masih sangat dibutuhkan. Dalam kerangka hubungan ini sinergi antara kepentingan masyarakat arus bawah (*bottom up*) dengan pemerintah (*top down*) harus memperoleh titik temu. Menurut Soetomo (2012) idealnya hubungan antara peran internal dan eksternal dalam pendekatan keswadayaan masyarakat dapat disarikan:

- a. Proses perubahan baik perubahan spontan maupun perubahan terencana, baik diinisiasi dari internal atau distimuli eksternal berangkat dari proses dan mekanisme

berdasarkan pola yang sudah berlaku dalam masyarakat

- b. Peran eksternal masuk dalam proses sesuai dengan kebutuhan/permintaan masyarakat.
- c. Unsur eksternal diinterpretasikan dalam perspektif masyarakat bukan sebaliknya masyarakat yang harus mengikuti perspektif eksternal.
- d. Unsur eksternal yang harus menyesuaikan dengan pola yang sudah berlaku dalam masyarakat lokal
- e. Unsur eksternal harus dapat diintegrasikan dengan pola lokal, perlu dihindari masuknya unsur eksternal justru menyebabkan terjadinya disintegrasi yang disebabkan munculnya alien (asing) dalam sistem kehidupan lokal.

1. **Institusionalisasi Lembaga RBM**

RBM sebagai suatu kelompok yang sengaja dibentuk oleh masyarakat sebagai tempat melaksanakan aktivitas pertolongan kepada Korban Napza. Dalam kerangka pengorganisasian masyarakat, Soetomo (2006, hal.388), mengemukakan bahwa dalam kehidupan masyarakat pada tingkat komunitas lebih mudah diorganisasikan berbagai bentuk tindakan bersama, termasuk tindakan bersama untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat secara individual apalagi kebutuhan kolektif. Hal itu disebabkan karena pada tingkat komunitas masih lebih kental dirasakan adanya kesadaran kolektif, solidaritas sosial dan kepentingan bersama. Dengan demikian, apabila masyarakat lokal memiliki komitmen tentang suatu gagasan sebagai bentuk prakarsa dan kreativitas dari dalam, mereka akan berusaha untuk memobilisasi sumber daya yang ada melalui tindakan bersama guna merealisasikan gagasan tersebut.

Ditinjau dari peraturan perundangan, RBM yang dijumpai di Yogyakarta dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Dalam UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 angka 7; Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pasal 1 angka 15, Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam perkembangan sebagai organisasi, RBM yang di DI yogyakarta dapat dikategorikan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Tipe C (Tumbuh). Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Sosial nomor 03 tahun 2012 tentang Standard Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, pasal 24 ayat (2) LKS dikelompokkan dalam tiga tipe yakni: a. LKS tipe C/Tumbuh; b. LKS tipe B/Berkembang; dan c. LKS tipe A/Mandiri. Dari hasil penilaian dari Permensos tersebut RBM yang dijumpai dalam penelitian ini masih dalam kategori tipe C/Tumbuh.

Dalam kerangka Institusionalisasi Lembaga RBM di tengah masyarakat, ada persoalan yang perlu dijadikan sebagai telaahan, yakni bagaimana legitimasi lembaga tersebut. Legitimasi ini diperlukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelaksana RBM dan memperoleh dukungan dari masyarakat dalam penyelenggaraan RBM. Di sisi lain Legalitas lembaga masyarakat telah dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mengakses program yang ada pada beberapa lembaga (baik

pemerintah maupun non pemerintah) yang mempunyai keterkaitan dengan kegiatan lembaga tersebut.

Dalam arti sempit, legitimasi (legalitas) adalah lembaga pengelola RBM yang secara resmi telah terdaftar dan memperoleh izin dari instansi hukum (Kementerian Hukum dan Ham) untuk pelaksanaan kegiatan, lokasi serta ruang lingkup wilayah operasionalisasinya, dalam konteks ini RBM harus memenuhi persyaratan (administratif). Legalitas RBM sebagai LKS hingga saat ini masih sebatas pengukuhan dari Kepala Dinas untuk provinsi dan Pemerintah Desa untuk RBM Desa. Jika ditelaah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2012 sebagaimana termaktub dalam pasal 7, maka RBM masih perlu keseriusan dalam pembenahan dan penguatan.

RBM belum berstatus Berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam beberapa pasal dalam Permen No. 03/2012 berikut: Pasal 7 ayat (1) Status Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza yang dibentuk oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum. Ayat (2) Selain memiliki status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza juga wajib mendaftarkan kepada Kementerian Sosial atau instansi sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya. Pasal 28 ayat (1) Huruf b. persyaratan pendaftaran bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk oleh masyarakat harus memiliki akte notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum.

Tujuan dari beberapa klausul dalam peraturan tersebut adalah untuk menjamin kualitas lembaga dalam pelayanan

rehabilitasi sosial. Persoalannya adalah bagaimana RBM yang baru tumbuh dan dibentuk tanpa dilandasi dengan orientasi keuntungan ekonomi (*non-profit*). RBM merupakan manifestasi dari partisipasi masyarakat yang dilandasi dengan niatan tolong-menolong, gotong royong dalam pemecahan masalah sosial di lingkungannya. Sementara itu untuk memperoleh status Terdaftar sebagai Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dalam pasal 28 ayat (1) huruf b, RBM harus diotentikkan dalam bentuk Akta Notariil (Akta Notaris Pendirian RBM). Dalam konteks lembaga Berbadan Hukum, RBM dapat dipandang sebagai sebuah embrio organisasi sosial dan suatu saat dapat ditingkatkan menjadi Organisasi Sosial/Yayasan.

Persoalan lain yang mungkin timbul adalah penyelenggaraan RBM yang sifatnya adalah partisipatif. Aktivitas yang diselenggarakan bukan merupakan pekerjaan pokok (profesi) atau pekerjaan sampingan. Pekerjaan yang berkaitan dengan RBM sangat tergantung dari komitmen dan waktu luang yang diberikan oleh anggota. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya program pengembangan RBM dari instansi/ lembaga yang berkompeten baik dalam pengembangan kelembagaan maupun aktivitasnya.

Dalam arti yang lebih luas, legitimasi RBM tidak hanya sebatas pada perijinan dari pemerintah setempat tetapi termasuk di dalamnya adalah proses pelembagaan RBM di tengah masyarakat. Menurut Suchman (1995) dalam Irawan (n.d), bahwa legitimasi merupakan hasil dari proses institusionalisasi, sehingga dampak dari perubahan institusi yang ditandai dengan tingginya ketidakpastian lingkungan

berpengaruh terhadap legitimasi organisasi. Dalam kondisi ini, legitimasi menjadi penting bagi keberlanjutan organisasi. Legitimasi menjadi sumber, dan organisasi membutuhkannya untuk memperoleh akses ke sumber lingkungan lainnya.

Dalam kerangka proses pelembagaan RBM di tengah masyarakat, beberapa hal yang menarik untuk dicermati yakni persepsi masyarakat tentang istilah RBM. Persepsi masyarakat terhadap RBM banyak dipengaruhi oleh beberapa program instansi sektoral di tengah masyarakat. Program pemerintah yang diselenggarakan di tingkat masyarakat (berbasis masyarakat) didukung lembaga teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap lembaga (instansi sektoral). Dari hasil diskusi kelompok terungkap bahwa sasaran program instansi sektoral tersebut saling bersinggungan. Sebagai ilustrasi, (1) Di tengah masyarakat telah terbentuk beberapa kelembagaan yang diinisiasi Kementerian Sosial dan dapat difungsikan dalam pencegahan penyalah-gunaan NAPZA seperti Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Karang Taruna, RBM. Khususnya untuk RBM pada awalnya memang lebih terkonsentrasi pada penanganan orang dengan kecacatan, tetapi dalam perkembangannya RBM juga telah digunakan sebagai suatu pendekatan untuk permasalahan sosial lainnya; (2) Di Yogyakarta, istilah RBM dalam pelayanan bagi korban napza lebih dikenal dengan *Napza Crisis Center* (NCC). Wakil dari Dinas sosial kota Yogyakarta dalam FGD mengemukakan bahwa RBM ini Eksistensinya sama dengan apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah kota dengan istilah *Napza Crisis Center* (NCC), hanya berbeda istilah saja; (3) Istilah RBM

juga diperkenalkan oleh Instansi pendidikan tetapi dengan makna yang berbeda. Ketua RBM Gerhana desa Meguoharjo Depok- Sleman Yogyakarta mengatakan “pada awalnya Pengetahuan masyarakat tentang RBM adalah program dari dinas pendidikan. RBM dipahami terkait dengan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yakni Ruang Belajar Masyarakat”. (4) Sementara itu istilah RBM belum familier bagi anggota perkumpulan pecandu dan mantan pecandu seperti Armeth, meskipun kelompok yang mereka bangun dan aktivitasnya selama merupakan salah satu pengejawantahan dari RBM.

Informasi ini mengindikasikan bahwa istilah RBM sebagai sebuah model perlu disosialisasikan dan diadvokasi secara intensif kepada masyarakat secara luas. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk membangun kesamaan persepsi diantara penyelenggara RBM, masyarakat, dan pemangku di satu wilayah. Advokasi bertujuan untuk memperoleh kepercayaan lembaga di tengah masyarakat.

RBM yang dibentuk atau diinisiasi (sebagai variasi ke *3/by disign*) oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) dan RBM di tingkat desa yang diprakarsai oleh Pemuda Karang Taruna dan aparat desa lebih mudah memperoleh kepercayaan masyarakat. Pada umumnya pengurus RBM adalah tokoh masyarakat yang sudah cukup dikenal di tengah masyarakat dan lembaga pendidikan. RBM pada variasi ketiga ini mempunyai kemudahan untuk bekerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan dalam komunikasi edukasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah (SLTP dan SLTA) maupun di masyarakat (Penyuluhan Desa). Sedangkan RBM yang diprakarsai oleh pemuda yang notabene telah

mendapat cap (stigma masyarakat), terlebih lagi mereka juga dipandang oleh masyarakat sebagai orang bermasalah (penyalahgunaan narkoba yang seringkali berkaitan dengan persoalan kriminal, misalnya: pencurian, peno-dongan, bikin onar) lebih sulit untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Uraian ini mengindikasikan bahwa dalam proses pelebagaan, advokasi terhadap RBM sangat diperlukan.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur utama dalam menunjang keberhasilan penyelenggara-an organisasi. Pendidikan, Pengetahuan dan keterampilan, serta pengalaman empiris dari SDM pengelola organisasi sangat dibutuhkan. Pendidikan dan pengalaman akan memberikan kontribusi besar dalam mengurai masalah dan menentukan alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan.

Ditinjau dari segi pendidikan, pengelola RBM di tingkat Provinsi lebih baik dibanding dengan RBM lokal maupun komunitas. Pengalaman dibidang organisasi kemasyarakatan dan dalam penyelenggaraan program dari pemerintah (instansi sektoral) sudah cukup banyak. Pendidikan dan pengalaman di bidang kemasyarakatan telah memberikan keuntungan (1) memperkaya informasi tentang bagaimana mengelola organisasi (2) lebih banyak informasi tentang lembaga yang dapat diakses untuk penyelenggaraan pelayanannya, sejak awal pembentukan RBM sampai dengan penyelenggaraan kegiatannya RBM Provinsi didukung oleh petugas dari Dinas Sosial sebagai fasilitator yang mempunyai pengalaman penyelenggaraan program di bidang rehabilitasi sosial. namun dari segi frekuensi interaksi Lembaga yang dibentuk pemuda

kampung dan komunitas pecandu dan mantan Napza lebih tinggi.

Dari segi pengalaman empirik, komunitas pecandu dan mantan pecandu lebih kaya dibanding dengan RBM Provinsi maupun RBM Desa dan ikatan emosional mereka lebih kuat. Dalam konteks ini, pengalaman empiris (baik sebagai korban, klien di suatu lembaga, maupun sebagai penyelenggara organisasi). Sebagai mantan pecandu, mereka cukup mengetahui kondisi diri ketika sedang mengalami masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan Napza. Kekayaan pengalaman empirik mantan pecandu tersebut akan mempermudah dalam pelaksanaan pendampingan bagi pecandu yang sedang mengalami Sakau atau *Withdrawel Syndrome* yang mempunyai kecenderungan untuk lapse maupun *relapse*. Mantan pecandu lebih dipercaya untuk melakukan pendampingan. Mantan pecandu lebih bisa merasakan untuk (empati) apa yang sedang dialami pada pecandu yang sedang dalam kondisi sakau. Pengalaman tersebut merupakan salah satu penunjang dalam pendampingan selama proses rehabilitasi korban napza.

Kondisi di atas mengisyaratkan perlunya kolaborasi antara sumber daya yang ada di lembaga RBM Provinsi dan RBM Desa/ Kelurahan serta Komunitas pecandu dan mantan pecandu Napza. Tujuan adalah untuk saling mengisi kekurangan SDM yang dimiliki oleh tiap RBM. Sebagai ilustrasi, kolaborasi antara RBM Putra Mataram dengan Armeth. Di satu sisi Putra Mataram mempunyai akses dengan dinas pendidikan (SMP dan SMA), di sisi lain Armeth dapat berbagi pengalaman betapa mahalannya untuk bisa sembuh dan tidak perlu ditiru. Dalam FGD ketua Armeth mengemukakan Kami Sedang dalam proses melakukan kegiatan

positif dan kami membutuhkan kerjasama dan jejaring dengan bapak dan ibu yang hadir di sini. Kami juga siap untuk sharing informasi tentang bahaya penyalahgunaan napza pada adik adik pelajar agar tidak terjerumus

3. Fasilitas RBM

Konsep penyelenggaraan kegiatan berbasis masyarakat adalah dilakukan oleh dan untuk masyarakat, termasuk di dalamnya adalah dukungan peralatan dan fasilitas yang digunakan. Sebagai lembaga yang baru tumbuh, fasilitas untuk menunjang kegiatan lembaga masih sangat minim. Sebagai ilustrasi, penggunaan rumah ketua RBM sebagai fasilitas untuk sekretariat/ perkantoran dan sekaligus sebagai domisili/ keberadaan RBM. Berbeda dengan RBM yang diinisiasi oleh Kementerian sosial melalui instansi sektoral provinsi dan RBM yang diinisiasi oleh Instansi sektoral kabupaten/kota. RBM Provinsi difasilitasi dengan salah satu ruang di perkantoran instansi tersebut, sedangkan RBM desa difasilitasi dengan salah satu ruang di kantor pemerintah Desa.

Penggunaan fasilitas yang disediakan instansi sektoral dan ruang kantor desa sebagai ruang sekretariat dan domisili RBM memberikan keuntungan untuk koordinasi baik secara intern (antar anggota) maupun ekstern (dengan instansi atau lembaga lain yang bisa dijadikan mitra RBM). Namun dari segi waktu, pemanfaatan fasilitas tersebut relatif terbatas (lebih banyak untuk kegiatan di siang hari sesuai dengan jam kerja). Terlebih lagi domisili (tempat tinggal) anggota RBM berjauhan dan pertemuan lebih banyak menggunakan waktu luang di luar jam kerja. Jika dibandingkan dengan penggunaan rumah ketua sebagai sekretariat (RBM Desa), fungsi rumah untuk sekretariat

akan mempermudah untuk koordinasi (domisili anggota ada di sekitar rumah ketua) dan memberikan keleluasaan untuk penyelenggaraan pelayanan. Waktu yang dialokasikan bisa lebih panjang, sepanjang ketua dan anggota mempunyai kesempatan untuk memberikan layanan. Keberadaan lembaga tersebut lebih mudah dikenal oleh warga masyarakat (desa).

Keterbatasan RBM tersebut juga dapat dilihat dari fasilitas peralatan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan. Peralatan yang digunakan sebatas peralatan penunjang (alat tulis kantor) yang dimiliki ketua dan anggota. Sedangkan untuk optimalisasi penyelenggaraan pelayanan seringkali menggunakan fasilitas masyarakat seperti: balai, ruang sekolah. Penggunaan fasilitas tersebut merupakan salah satu strategi untuk mengatasi keterbatasan RBM dalam penyelenggaraan kegiatan.

4. Peran RBM dalam Rehabilitasi Sosial

Konsep Rehabilitasi Sosial pada prinsipnya meliputi tiga aspek yakni: fisik, mental dan sosial. Dari aspek fisik, mungkin durasi proses pemulihan bisa relatif singkat, kecuali penyalahgunaan napza tersebut telah berdampak pada penyakit lain seperti TBC, HIV, Aids, Hepatitis C. Dari aspek mental dan sosial, ketergantungan Napza seringkali diikuti dengan persoalan sosial lainnya. Selama proses pemulihan, permasalahan yang selalu dihadapi korban penyalahgunaan Napza tidak hanya persoalan yang ada dalam dirinya untuk terbebas dari ketergantungan Napza (*intern*), tetapi mereka juga menghadapi persoalan dari luar (*ekstern*) terutama persoalan hukum dan stigma masyarakat.

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa optimalisasi rehabilitasi sosial bagi korban

napza diperlukan upaya yang komprehensif. Artinya pelayanan yang diberikan tidak hanya sebatas pelayanan kepada korban, tetapi termasuk di dalamnya adalah komunikasi edukasi kepada masyarakat. Persoalannya adalah, kontribusi apa yang perlu diberikan oleh RBM agar dalam pelayanan rehabilitasi sosial yang menyeluruh dapat mencapai hasil yang optimal?

Dalam kerangka rehabilitasi sosial yang menyeluruh (*holistik*), ruang lingkup rehabilitasi sosial sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 tahun 2012 tentang Standardisasi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Pasal 4 disebutkan bahwa Ruang lingkup Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan NAPZA meliputi: a. pencegahan; b. rehabilitasi sosial; c. pembinaan lanjut (*aftercare*); dan d. perlindungan dan advokasi sosial. sedangkan tugas RBM dalam Buku Pedoman Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Bagi Penyalahguna NAPZA yang diterbitkan Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Penyalahguna Napza Departemen Sosial RI, 2009, tugas RBM meliputi lima kegiatan yakni: (1) Pendampingan, yakni menjangkau dan mendampingi secara kontinyu kepada penyalahguna Napza; (2) Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada masyarakat; (3) advokasi pada penyalahguna Napza, pengidap HIV, Aids, Hepatitis C serta TBC dalam menangani permasalahannya; (4) Rujukan, yakni pengalihan pelayanan dari pendamping kepada pihak lain yang dianggap memiliki potensi untuk memberi layanan yang lebih tepat; dan (5) melaksanakan kelompok dukungan: merupakan pertemuan yang

biasanya dihadiri oleh mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari penyalahguna Napza, pengidap HIV, Aids, Hepatitis C serta TBC.

Telaahan terhadap kedua ketentuan dimaksud, idealnya RBM dapat masuk ke seluruh lingkup rehabilitasi maupun tugas yang dituangkan dalam panduan. Namun mengingat keterbatasan tenaga, dana, dan fasilitas yang dimiliki RBM, maka RBM dapat menentukan skala prioritas sesuai dengan kemampuan lembaga dan kemampuan dalam menterjemahkan peran tersebut.

Kegiatan RBM yang pada umumnya terkonsentrasi pada tindakan pencegahan (*preventive*). Dalam Permensos No 26/2012 Pasal 8 ayat (1) Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA meliputi: a. primer; b. sekunder; dan c. tersier. Ayat (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan NAPZA. Ayat (3) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna agar tidak mengalami ketergantungan terhadap NAPZA. Ayat (4) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih dari ketergantungan NAPZA setelah menjalani rehabilitasi sosial agar tidak mengalami kekambuhan. Kegiatan yang dilakukan RBM antara lain:

a. Kampanye penyadaran

Sasaran kampanye penyadaran dari RBM adalah generasi muda/pelajar (tingkat SLT dan dan SLTA) dan masyarakat. Tjuannya umum dari kampanye di sekolah adalah agar para siswa mempunyai informasi yang

cukup tentang bahaya penyalahgunaan Napza dan lebih waspada. Khususnya di lingkungan sekolah merupakan salah satu program aksi RBM untuk (1) pengembangan kepribadian (pendewasaan diri), (2) peningkatan kemampuan membuat keputusan untuk mengatakan “tidak” pada ajakan penyalahgunaan Napza, (3) mengetahui cara mengatasi tekanan mental secara efektif, dan (4) meningkatkan kemampuan komunikasi dalam pencegahan penyalahgunaan napza di lingkungan sekolah.

Materi tentang dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalah-gunaan Napza juga diselenggarakan oleh RBM di tingkat Desa/ Kelurahan. Tujuannya adalah (1) untuk peningkatan kewaspadaan dan kepedulian masyarakat sebagai kontrol sosial (2) membangun jejaring kerja RBM dengan lembaga yang ada di masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan Napza.

Kampanye penyadaran tersebut juga dilakukan dengan penyebaran stiker, pamflet, pema-sangan spanduk dan pesan moral yang ditulis secara semi permanen di tempat yang dipandang mempunyai posisi strategis. Tujuannya adalah untuk mengingatkan pada masyarakat secara terus menerus.

Dalam kerangka penyadaran tentang bahaya narkotika, RBM provinsi (Putra Mataram) bekerja-sama dengan kelompok pecandu dan mantan pecandu (*Armeth*). Dua sisi keuntungan yang diperoleh dengan kerjasama dalam penyadaran ini adalah pelajar memperoleh banyak informasi yang lebih jelas tentang bahaya narkotika dari pengalaman empirik korban (mantan pecandu), di sisi lain kerjasama ini

akan memberikan kontribusi pada pengurangan stigma masyarakat terhadap Korban Napza.

Pengalaman yang menarik dalam kampanye penyadaran yang perlu disimak adalah pengalaman pemuda yang memperoleh stigma masyarakat dan meragukan kemampuan pemuda kampung tersebut. Dalam penyelenggaraan RBM mereka memperoleh bimbingan Dinas Sosial dan dikukuhkan dengan nama RBM Bariton (Barisan Tolak Narkoba). Namun usaha pemuda kampung tersebut telah membawa Desa Sedayu yang sebelumnya memperoleh cap (*stigma*) sebagai Kampung Merah telah berhasil memenangkan lomba Kampung Bersih Narkoba di tingkat Provinsi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kampanye penyadaran tentang bahaya napza secara terus menerus memberikan kontribusi dalam penentuan sikap positif. Hasil penelitian Primantari VA dan Kahono GB (2013) mengungkap-kan bahwa kampanye anti penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan media komunikasi dapat membentuk sikap positif dan dapat dijadikan sebagai peringatan untuk selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba (*narkoba awareness*). Hal ini mengindikasikan bahwa Kampanye penyadaran merupakan unsur penting dalam proses pencegahan.

b. Pendampingan dalam Strategi Pencegahan

Pendampingan bagi mantan pecandu merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan atau mengurangi risiko (*harm reduction*) dalam proses penyembuhan. Pendampingan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan korban napza dalam mengatasi masalah. Tujuannya

adalah agar korban tidak mengalami ketergantungan terhadap NAPZA (pencegahan sekunder) dan pengguna yang sudah pulih dari ketergantungan NAPZA setelah menjalani rehabilitasi sosial tidak mengalami kekambuhan (pencegahan tersier).

Proses pemulihan bagi merupakan perjalanan panjang yang harus ditempuh. Meskipun mereka telah sampai pada masa recovery namun dorongan untuk menggunakan kembali seringkali bekecamuk dalam alam pikirannya. Berbagai hal (misalnya: situasi tidak menyenangkan, benda) dapat menstimuli munculnya *Lapse* dan *Relapse*. Gejala perilaku pecandu untuk kembali menggunakan napza sulit dideteksi sehingga dibutuhkan pendamping yang cukup peka untuk mengamati perilaku tersebut.

Dalam kerangka pendampingan ini, RBM (khususnya komunitas mantan pecandu) mempunyai pengetahuan dan pengalaman empirik dalam proses penyembuhan dan lebih siap. Dari pengalaman empirik (sebagai pecandu dan klien dalam proses penyembuhan), mereka lebih banyak memahami tentang kondisi pecandu yang didampingi dan bagaimana harus berbuat ketika sedang mengalami *relapse*. Di sisi lain mereka telah dipercaya (*trust*) sebagai orang “dekat” yang akan memberikan “pertolongan”.

Persoalan yang perlu dicermati yang seringkali dapat menimbulkan relapse pada pecandu selama dalam masa pemulihan dan mantan pecandu antara lain perjuangan untuk pemulihan nama baik dari stigma masyarakat, perlindungan hukum, dan pemulihan kondisi ekonomi keluarga yang selama ini telah habis digunakan untuk kebutuhan pemenuhan napza

dan pengobatannya. Banyak kasus yang dijumpai adalah korban Napza baru menyadari dirinya ketika kondisi ekonomi keluarganya sudah terpuruk. Informasi ini menunjukkan bahwa dalam pendampingan bagi korban napza yang komprehensif tidak hanya sebatas pada pendampingan untuk penyembuhan bagi korban, tetapi termasuk pemulihan kondisi perekonomian.

Dalam kerangka pemulihan perekonomian bagi korban napza, RBM telah dipercaya untuk menyelenggarakan program program pemberdayaan masyarakat dari lembaga pemerintah. Sebagai ilustrasi, Bariton dipercaya oleh Kementerian Pertanian untuk mengelola pengembangan sapi sebesar Rp.500.000.000,- untuk masyarakat. Sebagian dari hasil pengelolaan KUBE pengembangan sapi tersebut masuk kas lembaga untuk membiayai kegiatan organisasi. Program seperti ini juga dilakukan oleh Armeth Yogyakarta dalam Program Rumah Kreatif BNP Yogyakarta untuk pengembangan keterampilan otomotif, sablon, rehabilitasi Handphone (HP) selama satu bulan”. Sedangkan pendampingan hukum lebih banyak dilakukan oleh Armeth Yogyakarta.

5. Jejaring dan Mitra RBM

Dalam kerangka upaya mengatasi keterbatasan SDM dan untuk memperoleh hasil yang optimal, keberadaan jejaring kerja semakin diperlukan. Dalam hubungan antar individu, individu dengan lembaga, maupun antar lembaga, jaringan sosial dapat dipandang sebagai sebuah modal sosial yang mempunyai kekuatan untuk penyelesaian suatu masalah, Menurut Field (2010:18), jaringan sosial merupakan aset yang sangat bernilai. Jaringan memberikan dasar bagi kohesi sosial karena mendorong

orang-orang bekerja sama satu sama lain dan tidak hanya sekedar dengan orang yang mereka kenal secara langsung untuk memperoleh manfaat timbal balik. Namun untuk menilai apakah jaringan tersebut dapat dikategorikan sebagai modal sosial. Field (2010:230) menegaskan: Modal sosial bisa disebut dengan modal selama hal ini melahirkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan aktor individu dan kelompok untuk mencapai tujuan mereka lebih efektif dari pada mereka melakukan tanpa jaringan tersebut.

Dari hasil inventarisasi tentang jejaring kerja dalam rehabilitasi berbasis masyarakat di provinsi DIY dapat dikelompokkan dalam: (1) Lembaga Pemerintah yang terdiri dari Dinas Sosial Provinsi DIY, Badan Narkotika Kota Yogyakarta, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Sekolah Menengah Pertama dan Menengah Atas, Kepolisian, Pemerintah Desa; (2) Lembaga non pemerintah: RBM Putra Mataram, RBM Gerhana, RBM Bariton, Armeth, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), Karang Taruna. Informasi ini mengindikasikan bahwa RBM merupakan potensi besar dalam rehabilitasi sosial korban napza.

Dalam kerangka optimalisasi jejaring kerja ada beberapa kemungkinan yang dapat dikembangkan dalam penjangkauan pelayanan rehabilitasi korban napza sebagai berikut:

a. RBM Putra Mataram yang berkedudukan di Provinsi dapat berfungsi sebagai mediasi antara RBM Lokal dan RBM Komunitas dengan instansi sektoral yang mempunyai komitmen dalam penanggulangan penyalahgunaan napza dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Kegiatan bersama antara RBM Provinsi, RBM Lokal (desa) dan RBM Komunitas dalam peyadaran masyarakat akan lebih menyentuh dan dapat dipandang sebagai salah satu strategi dalam mengikis stigma di masyarakat.
- c. RBM Lokal (desa) dan RBM Komunitas dapat berfungsi sebagai penjangkauan pelayanan di lingkungannya yang selama ini masih tersembunyi
- d. RBM dapat berfungsi sebagai pendamping korban dan pecandu dalam penyelenggaraan program wajib lapor ke IPWL. Kerangka Penempatan RBM dalam penyelenggaraan Wajib Lapor Pecandu (WLP) dalam kerangka pengembangan jejaring kerja RBM, mendapat respon positif dari beberapa penyelenggara IPWL. RBM dapat diperankan dalam pengumpulan data namun untuk program pendampingan RBM perlu pelatihan pendampingan.

6. Keberlanjutan Kelembagaan RBM

Prinsip dasar dari para penggagas konsep partisipasi adalah masyarakat sebagai basis utama (subjek) dalam berbagai bentuk kegiatan (termasuk di dalamnya adalah rehabilitasi sosial bagi korban Napza) yang diselenggarakan di tingkat masyarakat (*bottom up*). Dalam konteks RBM, peran pemerintah (instansi yang mempunyai komitmen di bidangnya) bersifat sebagai inisiator dan fasilitator pembentukan lembaga tersebut.

Stimulan, baik dalam bentuk dana maupun program dari Pemerintah (instansi sektoral) dalam penyelenggaraan RBM telah memberikan kontribusi besar dalam menggugah partisipasi masyarakat. Dukungan yang diberikan masyarakat terhadap program aksi RBM pada saat awal memang sangat besar, terlebih lagi ketika

di DI Yogyakarta diselenggarakan Lomba Kampung Bersih Narkoba. Persoalannya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan dari program dan kegiatan RBM tersebut.

Dari segi jumlah, perkembangan lembaga (RBM) penampung partisipasi masyarakat sudah cukup banyak. Namun pengalaman dari banyak lembaga pelayanan berbasis masyarakat seringkali mengalami banyak persoalan keberlanjutan lembaga tersebut masih. Soetomo (2006) mengungkapkan, sebagaimana diketahui untuk keperluan pelaksanaan pembangunan, tidak jarang pemerintah menciptakan lembaga baru dalam masyarakat dengan harapan dapat berfungsi sebagai wadah dan media partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Walaupun demikian, kenyataannya jarang dari lembaga ini yang berhasil mengakar dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi tidak dapat berfungsi seperti yang diharapkan. Hikmat (2004: 194) mengungkapkan, banyak informasi yang menunjukkan bahwa organisasi pelayanan sosial yang tumbuh dalam masyarakat lokal baik muncul secara mandiri maupun yang diinisiasi oleh pemerintah mengalami masalah dalam hal kontinuitas kegiatannya.

Dalam kerangka menjamin keberlangsungan kegiatan lembaga (khususnya RBM Gerhana di desa Maguwoharjo Kec, Depok, Kab Sleman DI Yogyakarta), program RBM telah dijadikan sebagai program desa dengan biaya Alokasi Dana Desa (ADD). RBM tersebut juga didukung fasilitas (tanah dan lumbung desa) untuk pemberdayaan pemuda rawan penyalahgunaan napza. Persoalannya adalah bagaimana RBM lain yang masih tergantung pada program instansi pembina dan

harus menghimpun dana sendiri untuk menjamin keberlangsungan kegiatannya.

Bentuk partisipasi seperti yang dikemukakan oleh Ndraha (partisipasi buah pikiran, keterampilan, tenaga, harta benda, partisipasi uang) dalam menjaga keberlanjutan kegiatan pelayanan sosial berbasis masyarakat sangat diperlukan, bahkan partisipasi masyarakat merupakan basis. Namun RBM sebagai wadah partisipasi masyarakat belum berfungsi optimal dalam menampung partisipasi masyarakat luas. Partisipasi yang terjadi lebih banyak dari pengurus dan anggota RBM dan lingkungan yang terbatas. Uraian ini mengindikasikan bahwa dalam kerangka pengumpulan partisipasi masyarakat luas diperlukan sistem dan mekanisme penyaluran partisipasi. Hal yang menarik untuk dicermati dalam penyelenggaraan RBM adalah usaha ketua dan pengurus untuk menghidupi organisasinya. RBM tidak hanya berinteraksi dengan lembaga yang menginisiasi pembentukan lembaga, tetapi RBM juga berinteraksi dengan lembaga lain yang mempunyai program sampai di tingkat masyarakat. Sebagai ilustrasi beberapa instansi yang mempunyai program dan terkait dengan pemberdayaan korban napza antara lain: Dinas Pertanian, Dinas Sosial, BNNK, LSM.

Uraian di atas mengindikasikan, bahwa untuk menjaga keberadaan masyarakat sebagai basis masih perlu dukungan pemerintah. Dalam kerangka rehabilitasi sosial, RBM perlu didukung program pemberdayaan sosial ekonomi. Kerangka berpikirnya adalah permasalahan yang dihadapi oleh pencandu napza bukan masalah yang berdiri sendiri, tetapi masalah yang multi dimensi dan bersinggungan dengan penghidupan dan kehidupan

bermasyarakat, terutama berkaitan dengan masalah keamanan, kesehatan, sosial, ekonomi.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan napza telah tumbuh dan berkembang dalam bentuk lembaga yakni RBM, terutama di beberapa wilayah rawan napza. Keberadaan RBM beserta jaringan dan programnya merupakan salah satu pilar (basis) yang berpotensi besar dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban napza. Interpretasinya adalah RBM merupakan bagian penting dalam dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza di masyarakat. Keberadaan kader RBM dan suporting kegiatannya telah mendapat apresiasi dan dapat diintegrasikan pada beberapa program instansi sektoral yang mempunyai konsentrasi pada rehabilitasi sosial korban napza. Kegiatan yang diselenggarakan lebih banyak terkonsentrasi pada upaya penyadaran masyarakat (pencegahan primer), yakni menjalankan tugas komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, dan pendampingan, yakni menjangkau dan mendampingi secara kontinyu kepada korban dalam proses pemulihan.

SARAN

RBM sebagai sebuah strategi perluasan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial korban napza yang menempatkan masyarakat sebagai basis kekuatan. Masyarakat (khususnya RBM) telah dijadikan sebagai salah satu pilar dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi korban napza. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika Pasal 21 ayat (1) Terhadap Pecandu Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Ayat (2) Pembinaan

dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Badan Narkotika Nasional. Interpretasinya adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial mempunyai tanggung jawab terhadap pengembangan kapasitas RBM dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial, khususnya terkait dengan pendampingan pasca rehabilitasi. Dalam kerangka optimalisasi peran RBM ada beberapa hal yang menarik dan dijadikan pertimbangan, antara lain:

1. Dalam kerangka pengembangan kapasitas SDM RBM (desa/kelurahan), diperlukan program peningkatan kapasitas pengurus dan anggota RBM. Kegiatan dimaksud tidak hanya berdasar permintaan daerah, tetapi dijadikan sebagai program pendidikan dan pelatihan instansi sosial secara berkelanjutan.
2. Peningkatan kapasitas dimaksud dapat difasilitasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang ada pada instansi sektoral, atau lebih khusus di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta, Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta BNNK Yogyakarta, Anggraeni Primawati sebagai mitra di lokasi penelitian, Tim RBM Putra Mataram, Armeth, RBM Bariton, dan RBM Gerhana atas dukungan data, informasi dan diskusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- BNN. (2015). Laporan Akhir Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014, http://bnn.go.id/portal/_uploads/post/2015/03/11/Laporan_BNN_2014_Upload_Humas_FIX.pdf.

- BNN. (2015, 12 23). Executive Summary Press Release Akhir Tahun 2015. Dipetik 06 12, 2016, dari http://www.bnn.go.id/_multimedia/document/20151223/press-release-akhir-tahun-2015-20151223003357.pdf
- BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta. (2014). Laporan Tahunan Badan Nasional Narkotika ProVinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.
- Clark, J. (1995). NGO dan Pembangunan Demokrasi; (Judul asli: Democratizing Developmen The Role of Voluntary Organization: Godril Diby Yuono). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Davis, K. (1967). Human Relation at Work, The Dynamics of Organizational Behavior. Mc Grow Hill Book Company.
- Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Penyalahguna Napza Departemen Sosial RI, 2009, Pedoman Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Bagi Penyalahguna NAPZA, Jakarta.
- Field, J. (2010). Modal Sosial. Kasihan Bantul: Kreasi Wacana.
- Hikmat, H. (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Ibrahim, J. (2013). Opium dan Revolusi: Perdagangan dan Penggunaan Candu di Surakarta Masa Revolusi (1945-1950). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ife, J. dan Tesoriero, F. (2008). *Community development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Rea Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan, B. (tt). Faktor Faktor Yang Menjadi Penyebab Legitimasi Dalam Pelayanan Publik. Diambil kembali dari <http://www.stiami.ac.id/jurnal/download/80/faktor-faktor-yang-menjadi-basis-legitimasi-dalam-pelayanan-publik>
- Iskandar, J. (1993). Strategi Dasar Membangun Kekuatan Masyarakat. Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS.
- Kementerian Sosial, 2012, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 3 tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narko-tika. Jakarta: Republik Indonesia.
- Kompas. (2013, 03 7). Pengguna Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat. Dipetik 04 5, 2015, dari Kompas.com: <http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.Meningkat>
- Mardiah, A., Din, M., dan Nirzali, R. (2012). Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak. Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala Volume 1 Agustus, 1 - 15.
- Moleong, L. 2003, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ndraha, T. (1993). Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tingal Landas,. Jakarta: Rineka cipta.
- Poernamasasi, I. O. (2014, 07). Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan Semester I, hal. 16 -22.

- Pratama, H. M. (2015, 06 17). 5 Daerah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika. Dipetik 07 24, 2016, dari Indonesia Bergegas: <http://indonesiabergegas.bnn.go.id/index.php/en/component/k2/1039-5-daerah-rawan-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika>
- Primantari VA dan Kahono GB. (2013). Efektifitas Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Akan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba: Studi Terhadap Remaja di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. *Sociologie* Nomor 1 Volume 2, 93-97.
- Pusdatin Kemenkes RI. (2014, 07). Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan* semester 1 2014, hal. 1 - 15.
- Riza Sarasvita, & Rahardjo Budi. (2014, 07). Program Wajib Laporan Pecandu Narkotika. *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*, hal. 29 - 41.
- Rosarians, F. (2014, 06 `26). Tempo.com. Dipetik 04 05, 2015, dari 200 Juta Orang Meninggal Akibat Narkoba per Tahun: <http://www.tempo.co/read/news/2014/06/26/173588287/200-Juta-Orang-Meninggal-Akibat-Narkoba-per-Tahun>
- Republik Indonesia, (2009) Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, (2012), Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2011), Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu, Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia (2009). Undang Undang Nomor 35 tentang Narkotika. Jakarta: Republik Indonesia.
- Simanungkalit, P. (2011). Globalisasi Peredaran Narkobadan Penanggulangannya. Yayasan Wajar Hidup: Jakarta.
- Soetomo. (2012). Keswadayaan Masyarakat, Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. (2009). Pembangunan Masyarakat, Merangkai Sebuah Kerangka. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. (2006). Strategi Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PENGARUH DUKUNGAN ORGANISASI DAN KEMAMPUAN INDIVIDU TERHADAP KINERJA PENYULUH SOSIAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

THE ROLE OF ORGANIZATIONAL SUPPORT AND INDIVIDUAL CAPACITY ON SOCIAL EXTENSION WORKERS PERFORMANCE AND COMMUNITY PARTICIPATION

Subhan Kadir, Sunarru Samsi Hariadi, dan Subejo

Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada
Jl. Teknik Utara, Pogung, Sleman, Yogyakarta, Indonesia.

E-mail: subhan.kadir@mail.ugm.ac.id

Diterima: 12 April 2016; Direvisi: 16 Agustus 2016; Disetujui: 14 Desember 2016

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh dukungan organisasi dan kemampuan individu terhadap kinerja penyuluh sosial dan terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian diharapkan menghasilkan sebuah model untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam program kesejahteraan sosial melalui kinerja penyuluh, kemampuan individu dan dukungan organisasi. Penelitian menggunakan metode penelitian survey kuantitatif dan analisis data menggunakan pemodelan persamaan struktur dengan program AMOS. Pengumpulan data menggunakan angket kemampuan individu, dukungan organisasi, kinerja penyuluh sosial, dan partisipasi masyarakat. Responden yang berpartisipasi penelitian ini adalah sebanyak 124 penyuluh sosial dan calon penyuluh sosial yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyuluh ($r=0,623$; $p=0,012$), juga ditemukan pengaruh positif dan signifikan kinerja penyuluh terhadap partisipasi masyarakat ($r=0,644$; $p=0,021$), ditemukan juga adanya korelasi positif antara dukungan organisasi dengan kemampuan individu ($r=0,558$; $p=0,000$). Kinerja penyuluh sosial memoderasi hubungan antara dukungan organisasi dan partisipasi masyarakat. Model peningkatan partisipasi masyarakat juga telah diidentifikasi di dalam penelitian ini.

Kata kunci: dukungan organisasi, kinerja penyuluh sosial, partisipasi masyarakat.

Abstract

This quantitative research has intended to investigate the role of organizational support and individual capacity of social extension workers' performance. The successful of those performance has been measured on social participation on social development. The research has expected to gain a kind of model of social participation in social welfare programs, through social worker's performance, individual capacity and organizational support. The research is a quantitative survey. Data has been analyzed through AMOS program. Data were collected in a survey using four instruments measuring competence, organizational support, worker performance and community participation. The study found that organizational support has positive and significant association with social extension workers' performance. The association between social extension workers' performance and community participation was also found to be positive and significant. Performance of social extension workers was found to be a moderating factors as it mediate organizational support to community participation.

Keywords: organizational support, social extension workers' performance, community participation.

PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terorganisir untuk membantu masyarakat maupun individu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraannya. Kesejahteraan sosial merupakan cita-cita bangsa dan merupakan tanggung jawab negara kepada rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Kementerian Sosial merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan melaksanakan upaya kesejahteraan melalui program-program kesejahteraan sosial.

Untuk menjamin suksesnya program kesejahteraan sosial maka dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Sebagaimana dalam sistem demokrasi, masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Conyers (1992), menyatakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi penting karena tiga hal. Partisipasi merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Masyarakat akan lebih percaya pada program/proyek ketika mereka dilibatkan. Partisipasi merupakan hak demokrasi.

Melalui partisipasi tujuan akan mudah dicapai dan konflik dapat diredam dengan pola demokrasi setempat. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam sebuah program mengindikasikan adanya penolakan internal dikalangan masyarakat (Soetomo, 2006). Partisipasi bertujuan untuk membuat semua orang dalam masyarakat terlibat secara aktif dalam proses-proses dan kegiatan masyarakat. Semakin banyak orang yang terlibat secara aktif maka semakin ideal kepemilikan masyarakat dan proses-proses inklusif yang akan diwujudkan (Ife & Tesoriero, 2008).

Ada dua tenaga fungsional yang dibina langsung oleh Kementerian Sosial dan terlibat dalam berbagai program pembangunan sosial, yaitu: pekerja sosial dan penyuluh sosial. Fungsional pekerja sosial telah ada sejak lama dan memiliki basis pendidikan profesi yang sudah mapan. Sementara fungsional penyuluh sosial masih baru terbentuk pada 2008 dan personilnya direkrut dari berbagai latar belakang pendidikan sosial, pendidikan, psikologi, maupun eksakta. Oleh karenanya penyuluh sosial menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Output dari tugas pokok penyuluh sosial adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Sebagaimana konsep penyuluhan sosial sebagai suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan, dan kemauan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial (Permenpan nomor PER/ 06/ M.PAN/ 4/2008 dan peraturan bersama Mensos dan Kepala BKN nomor 41/ HUK-PPS/ 2008).

Van Den Ban & Hawkins memberikan definisi penyuluhan secara luas, "*involves the conscious use of communication of information to help people form sound opinions and make good decisions*" (penyuluhan melibatkan secara sadar komunikasi informasi untuk membantu orang-orang menyuarakan opini dan membuat keputusan yang baik) (Ray, 1998). Ray juga mengemukakan definisinya sendiri, penyuluhan sebagai "*the science of making people inovatif for sustainable improvement in their quality of life*" (ilmu yang membuat orang-orang berinovasi untuk peningkatan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan). Dengan demikian *outcome* penyuluhan sosial sesuai

definisi diatas adalah meningkatnya kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat.

Penyuluh sosial memiliki peran strategis sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Penyuluh melaksanakan program pemerintah kepada masyarakat (*top down*) dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah (*bottom up*) untuk evaluasi dan perbaikan program. Misalnya pada Program Home Care Direktorat Lanjut Usia yang dilaksanan di Panti Tresna Werdha, penyuluh sosial terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan, mulai sosialisasi program, merekrut dan mendidik pendamping, menetapkan lanjut usia sasaran, bersama dengan pendamping memberikan pelayanan, mengembangkan jejaring (*networking*) sampai evaluasi. Dengan demikian penyuluh sosial mengetahui persis bagaimana kondisi riil yang ada dilapangan, mengetahui keluhan-keluhan lanjut usia dan keluarganya serta mendapatkan masukan dari pendamping dan stake holder yang terlibat untuk disampaikan kepada pihak pengambil kebijakan (Direktorat Lanjut Usia) agar dilakukan perbaikan dan penyesuaian program.

Agar partisipasi masyarakat menjadi lebih baik, penyuluh sosial dituntut untuk meningkatkan kinerjanya melalui dua hal, yaitu kemampuan yang dimiliki meliputi minat, motivasi, kepribadian ekstraversi, dan etika kerja; serta adanya dukungan dari organisasi meliputi: pelatihan, peralatan dan teknologi, manajemen dan rekan kerja, serta standar kinerja.

Kinerja didefinisikan sebagai apa yang dilakukan dan tidak dilakukan karyawan dari elemen kuantitas dan kualitas hasil, ketepatan waktu dari hasil, kehadiran, dan kemampuan kerja sama (Mathis & Jackson, 2006). Kinerja sebagai catatan hasil yang diproduksi atau

dihasilkan dari fungsi pekerjaan atau aktifitas tertentu selama dalam periode waktu tertentu (Bernardin, 2003). Kinerja sebagai seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit tempat ia bekerja (Sudarmanto, 2009). Kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan diinginkan dapat tercapai dengan baik (Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 1997). Dari berbagai definisi yang dikemukakan maka dapat disimpulkan kinerja sebagai suatu set perilaku yang ditunjukkan melalui pencapaian hasil maksimal sesuai tujuan organisasi dalam waktu yang ditentukan.

Ada banyak teori tentang kinerja namun dalam penelitian ini mengacu pada teori dari Mathis & Jackson (2006) karena melibatkan variabel dukungan organisasi yang sangat sesuai dengan kondisi birokrasi. Menurut Mathis & Jackson (2006), kinerja dipengaruhi oleh *Ability* (kemampuan individu), *effort* (usaha yang dicurahkan), dan *support* (dukungan). Kemampuan individu terdiri dari unsur bakat, minat, dan kepribadian. Usaha yang dicurahkan terdiri dari: motivasi, etika kerja, kehadiran, dan rancangan kerja. Sedangkan dukungan organisasi terdiri dari: Pelatihan, standar kinerja, peralatan dan teknologi, serta manajemen dan rekan kerja.

Dalam penelitian ini kemampuan dan usaha digabung menjadi satu variabel yaitu kemampuan individu, sedangkan dukungan menjadi variabel dukungan organisasi. Dengan demikian kemampuan individu meliputi indikator: minat, motivasi, kepribadian, dan etika kerja. Sedangkan dukungan organisasi meliputi indikator: pelatihan, peralatan dan teknologi, standar kinerja, dan manajemen dan rekan kerja. Untuk kinerja penyuluh sosial menggunakan indikator yang sesuai

tupoksinya yaitu: persiapan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, pengembangan kualitas penyuluhan, pengembangan profesi, dan penunjang penyuluhan.

Minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu (Sugono, et al., 2008). Minat berawal dari adanya kesadaran yang menimbulkan ketertarikan yang dapat membangkitkan keinginan dan pada akhirnya merangsang tindakan (Walgito, 2009). Adanya minat yang tinggi memungkinkan seseorang melakukan pekerjaannya dengan perasaan senang (Witherington, 1991).

Motivasi merupakan keinginan dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak (Mathis & Jackson, 2006). Motivasi bisa berasal dari dalam diri maupun luar diri yang dapat membangkitkan antusiasme (Daft, 2006). Umstot (1988) dan Gibson et al. (1997), lebih menekankan pada proses bagaimana perilaku diberi energi dan diarahkan. Teori kebutuhan yang dipelajari David Mc. Clelland mengatakan bahwa seorang dengan kebutuhan yang kuat akan menggunakan tingkahlakunya untuk memuaskan kebutuhan dan kebutuhan tersebut dipelajari dari masyarakat atau kebudayaan, meliputi: kebutuhan pencapaian, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan (Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 1997). Motivasi pada banyak penelitian memiliki pengaruh positif pada kinerja (Arifin, 2011; Muliady, 2009; Syah & Prawitasari, 1998).

Kepribadian merupakan karakteristik yang mendefinisikan diri seseorang dan berguna dalam adaptasi serta interaksi dengan lingkungan sosialnya. Terdapat lima ciri kepribadian utama yang dikenal sebagai *the big five personality* (Mathis & Jackson, 2006; Santrock, 2004; Luthans, 2006), meliputi: berhati-hati / kesungguhan / kesadaran (*conscientiousness*), keramahmataman / sifat menyenangkan,

ekstrovert / ekstraversi, stabilitas emosional, dan keterbukaan pada pengalaman.

Etika kerja adalah seperangkat sikap atau pandangan dasar yang dipegang oleh sekelompok manusia untuk menilai kerja sebagai suatu hal yang positif bagi peningkatan kualitas hidup mereka (Walgito, 2009). Definisi ini lebih kompleks dalam menyatukan pemahaman yang berbeda antara etika kerja dan etos kerja. Penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara etika kerja dengan kinerja seseorang (Fauzi, 2011; Siswanto, 2013).

Elemen pertama dari dukungan organisasi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja penyuluh adalah pelatihan. Pelatihan memberikan karyawan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik yang dapat digunakan dalam pekerjaan mereka (Mathis & Jackson, 2006). Mali (2012) mencatat pengaruh positif pelatihan terhadap kinerja penyuluh pertanian lapangan. Untuk menjamin kinerja penyuluh sosial, mereka memerlukan peralatan dan teknologi. Peralatan berupa alat bantu penyuluhan dan sarana transportasi untuk menjangkau masyarakat. Termasuk juga media yang dibutuhkan untuk menjangkau sasaran penyuluhan secara efektif, baik dalam bentuk alat (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*). Agar pekerjaan yang dilakukan dapat efektif dan efisien maka diperlukan standar kinerja yang jelas dan terukur. Standar kinerja ditetapkan berdasarkan hasil analisis pekerjaan dan deskripsi pekerjaan. Kemudian dari itu dapat dibuat secara langsung standar kinerja yang dapat menunjukkan apa yang dicapai dan bagaimana kinerja diukur (Mathis & Jackson, 2006). Manajemen menekankan adanya peran manajer yaitu peran interpersonal, peran pengambil keputusan, dan peran informasi. Peran manajemen penting pada pekerjaan yang dispesialisasikan dan melibatkan banyak

orang seperti dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Penyuluh tidak hanya bekerja sendiri tetap melibatkan individu lain atau rekan kerja. Kehadiran rekan kerja dapat memfasilitasi kinerja tetapi juga dapat menghambat kinerja. Oleh karenanya peran manajer sangat penting dalam mengarahkan kinerja tim.

Belum ada penelitian tentang kinerja penyuluh yang menggunakan teori Mathis & Jackson (2006) secara utuh. Penelitian yang ada menganalisis unsur-unsur yang mempengaruhi kinerja secara terpisah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh berdasarkan pada penelitian terdahulu adalah karakteristik, kompetensi, dan motivasi penyuluh, besar pengaruh ketiganya terhadap kinerja adalah 45% (Muliady, 2009). Kinerja petani pemandu atau lebih akrab disebut sebagai penyuluh swadaya dipengaruhi oleh kompetensi, karakteristik lingkungan, dan dinamika belajar, ketiganya mempengaruhi kinerja sebesar 60% (Effendy, 2009). Kinerja penyuluh pertanian lapangan di Timor Leste dipengaruhi secara positif oleh sikap mereka (Mali, 2012). Kinerja penyuluh juga dipengaruhi oleh etos kerja; masa kerja, keterampilan, orientasi nilai budaya, dan progresifitas petani, pengaruhnya secara bersama-sama adalah sebesar 71,1% (Siswanto, 2013). Penelitian lainnya pada penyuluh pertanian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mereka adalah karakteristik; kompetensi; dan motivasi (Ilmawan & Romadi, 2012). Kinerja penyuluh pertanian juga dipengaruhi oleh kompetensi; karakteristik; motivasi; dan kemandirian (Sapar, Jahi, Asngari, Saleh, & Purnaba, 2011; 2012).

Berdasarkan pada konsep penyuluhan sosial, penyuluhan diarahkan untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Cohen & Uphoff (1977), memberikan definisi partisipasi secara komprehensif yaitu keterlibatan aktif

masyarakat dalam proses pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumber daya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, barbagi manfaat dari program dan evaluasi program pembangunan.

Hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh kinerja terhadap partisipasi adalah sebagai berikut. Ditemukan pengaruh positif dan signifikan kinerja kader pembedayaan masyarakat desa (KPMD) terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam program PNPM (Nur, 2015). Kinerja pengurus koperasi berpengaruh positif terhadap partisipasi anggota koperasi (Apriansyah, Syahrudin, & Utmomo, 2015; Robbi, Indrawati, & Haryana, 2016; Sulistyowati, Hadi, & Harmanik, 2015). Pada bidang pendidikan, kinerja tutor berpengaruh positif terhadap partisipasi belajar peserta didik (Nurdiana, 2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari hasil analisis pengaruh dukungan organisasi dan kemampuan individu terhadap kinerja penyuluh dan partisipasi masyarakat. Sehingga diperoleh model yang sesuai untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada konteks penyuluhan sosial.

METODE

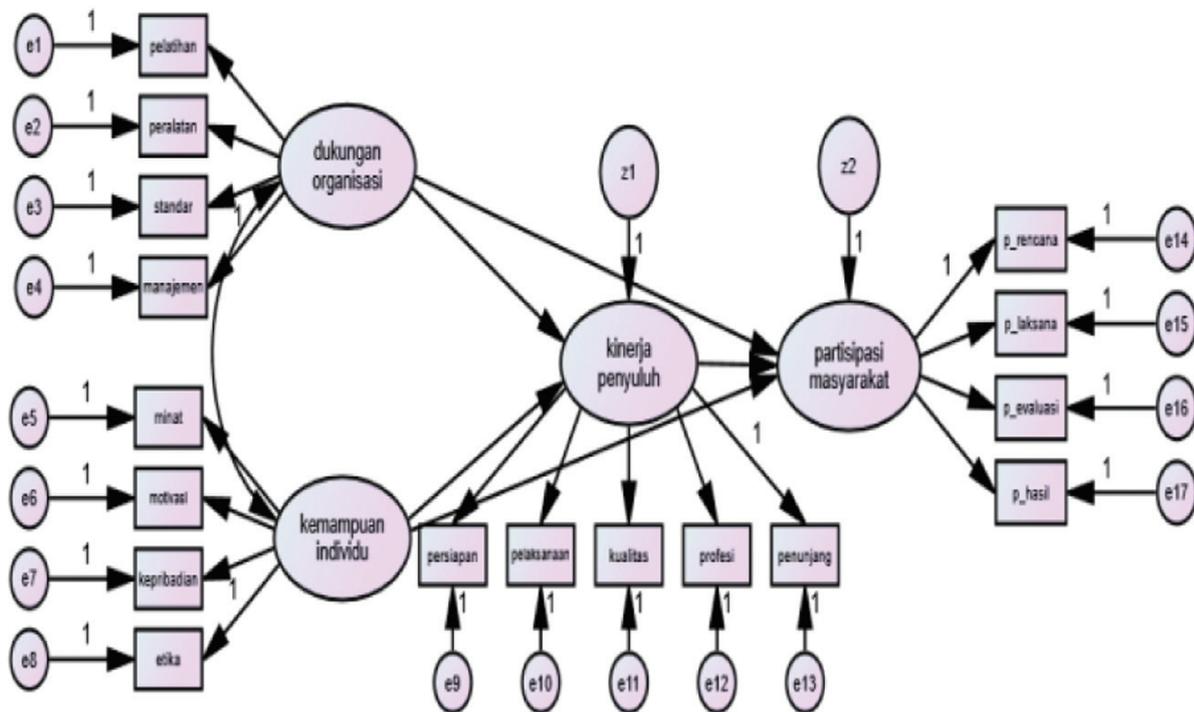
Penelitian ini melibatkan 149 penyuluh sosial dan calon penyuluh sosial sebagai responden. Mereka adalah peserta diklat calon fungsional penyuluh sosial angkatan pertama hingga angkatan ketiga. Sebagian diantaranya telah menjadi fungsional penyuluh sosial dan sebagian masih berstatus calon penyuluh sosial. Calon penyuluh sosial juga dilibatkan karena setelah mengikuti diklat mereka juga telah melaksanakan tugas-tugas penyuluhan sosial sebagaimana yang telah berstatus fungsional. Sebanyak 124 responden mengisi

dan mengembalikan kuisioner yang dikirim oleh peneliti (tingkat partisipasi 83,3%).

Pengumpulan data survey menggunakan angket untuk mengukur dukungan organisasi (meliputi indikator: pelatihan, peralatan, standar kinerja, manajemen dan rekan kerja), kemampuan individu (meliputi indikator: minat, motivasi, kepribadian ekstraversi, etika), kinerja penyuluh (meliputi indikator: persiapan, pelaksanaan, pengembangan kualitas, pengembangan profesi, pendukung), dan partisipasi masyarakat (meliputi indikator partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, menikmati hasil). Angket tersebut dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan teori dan konsep terkait. Pemberian skala menggunakan metode penskalaan Likert menurut Azwar (2012). Kemampuan individu dan partisipasi masyarakat menggunakan respon sangat tidak setuju (skala 0) hingga sangat setuju (skala 4).

Kinerja penyuluh dan partisipasi masyarakat menggunakan respon tidak pernah (skala 0) hingga sangat sering/konsisten (skala 4). Partisipasi masyarakat dinilai berdasarkan persepsi penyuluh.

Analisis data menggunakan analisis model persamaan struktur / SEM (structural equation modeling). Analisis ini dianggap lebih kompleks karena mengkombinasikan analisis faktor (*path analysis*) dan regresi dalam menguji hubungan antar variabel dalam model, baik itu antar indikator dengan konstraknya maupun hubungan antar konstruk (Santoso, 2011). Langkah pertama dalam melakukan analisis SEM adalah membuat model SEM. Model SEM dibuat berdasarkan teori dan konsep yang telah disusun sebelumnya. Model struktural yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1. Penelitian dilakukan pada tahun 2015.



Gambar 1. Model hipotesis penelitian

Gambar 1. memperlihatkan bahwa model terdiri dari empat konstruk laten atau variabel. Dua konstruk laten eksogenus (variabel bebas) yaitu dukungan organisasi dan kemampuan individu. Satu konstruk laten endogenus (variabel terikat) yaitu kinerja penyuluh sebagai mediator dan konstruk laten eksogenus partisipasi masyarakat. Konstruk laten tidak bisa diukur tanpa variabel manifes atau indikator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tabel 1. memperlihatkan karakteristik demografi responden.

Tabel 1. Karakteristik Demografi

Karakteristik Demografi	n	%
Jenis Kelamin		
◦ Laki-Laki	61	49,2
◦ Perempuan	63	50,8
Pendidikan		
◦ S1	107	86,3
◦ S2	17	13,7
Jurusan		
◦ Penyuluhan	2	1,6
◦ Pekerja Sosial	36	29,0
◦ Pendidikan	12	9,7
◦ Psikologi	4	3,2
◦ Sosiologi	32	25,8
◦ Lainnya	38	30,6
Unit kerja		
◦ Kementerian	45	36,3
◦ Pemprov/Pemkot	38	30,6
◦ Pemkab	41	33,1
Jabatan		
◦ Calon Penyuluh Sosial	59	47,6
◦ Penyuluh Sosial Muda	46	37,1
◦ Penyuluh Sosial Pertama	12	9,7
◦ Penyuluh Sosial Madya	7	5,6
Provinsi tempat bekerja		
◦ Bengkulu	1	,8
◦ DKI	34	27,4
◦ Jabar	17	13,7
◦ Jateng	16	12,9
◦ Jatim	14	11,3
◦ Jogja	4	3,2

◦ Kalsel	2	1,6
◦ Kalteng	6	4,8
◦ Maluku	1	0,8
◦ NTB	3	2,4
◦ NTT	2	1,6
◦ Riau	1	0,8
◦ Sulbar	5	4,0
◦ Sulsel	6	4,8
◦ Sulut	8	6,5
◦ Sumsel	1	0,8
◦ Sumut	3	2,4

	Mean	SD
Umur	38,84	7,277
Masa Kerja	3,31	1,588

Keterangan: N=124

Usia rata-rata responden adalah 38 tahun dengan jenis kelamin terbanyak adalah perempuan (50,8%). Sebanyak 86,3% responden berlatar belakang pendidikan S1. Jurusan pendidikan terbanyak adalah pekerja sosial sebanyak 29,0% dan sosiologi 25,8%. Hanya 1,6% yang memiliki latar belakang penyuluhan atau komunikasi (secara spesifik jurusan dakwah dan komunikasi).

Sebanyak 36,3% responden bekerja di Kementerian, selebihnya bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Jabatan terbanyak adalah sebagai calon fungsional Penyuluh Sosial yaitu sebanyak 47,6%, lainnya adalah Penyuluh Sosial Muda 37,1%, Penyuluh Sosial Pertama 9,7%, dan Penyuluh Sosial Madya 5,6%. Masa kerja sebagai Penyuluh Sosial atau calon fungsional Penyuluh Sosial rata-rata adalah 3,31 tahun. Lokasi tempat bekerja responden sebagian besar berada di pulau Jawa. Sebanyak 27,4% di DKI Jakarta; 142,9 % di Jawa Tengah; 11,3 % di Jawa Timur; 713,7 % di Jawa Barat; selebihnya tersebar di tiga belas provinsi Indonesia.

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan uji *measurement* model. Tujuannya adalah untuk menilai *degre*

of freedom, validitas konstruk, reliabilitas konstruk, *goodness of fit*, dan normalitas data. uji *measurement* dilakukan dalam dua tahap yaitu uji *measurement* parsial dan uji *measurement* model bersama. Uji *measurement* parsial difokuskan pada uji validitas dan reliabilitas konstruk. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 2.

Uji validitas konstruk bertujuan untuk mengetahui sejauhmana indikator menjelaskan konstruk. Nilai *loading factor* atau *coeficient standardized* 0,5 atau lebih menunjukkan indikator valid. Sedangkan reliabilitas konstruk dimaksudkan untuk mengukur konsistensi internal indikator sebuah bentukan yang menunjukkan sejauh mana derajat masing-masing indikator mengidikasikan sebuah variabel bentukan yang umum. Nilai yang ideal adalah 0,7 namun nilai 0,5 keatas sudah dapat diterima (Ghozali, 2011).

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk Pada Uji *Measurement* Parsial.

Konstruk	Indikator	KV	KR
Dukungan org.	Pelatihan	,801	,675
	Peralatan	,676	
	Standar kinerja	,712	
	Manajemen	,761	
Kemamp. Ind.	Minat	,626	,621
	Motivasi	,894	
	Kepribadian	,610	
	Etika kerja	,657	
Kinerja peny.	Persiapan	,746	,744
	Pelaksanaan	,876	
	Pengembangan	,738	
Partisipasi masy.	Perencanaan	,675	,704
	Pelaksanaan	,906	
	Evaluasi	,756	
	Menikmati	,688	

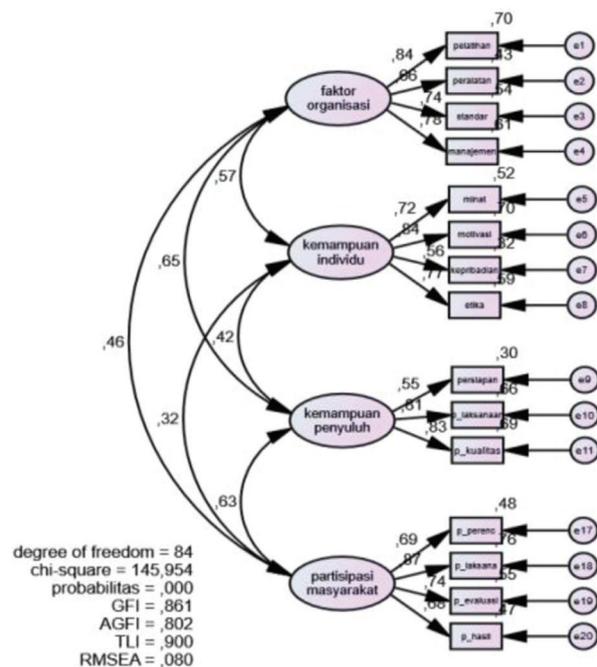
Sumber: Diolah dari data primer

Keterangan:

KV : *Konstruk Validitas*;

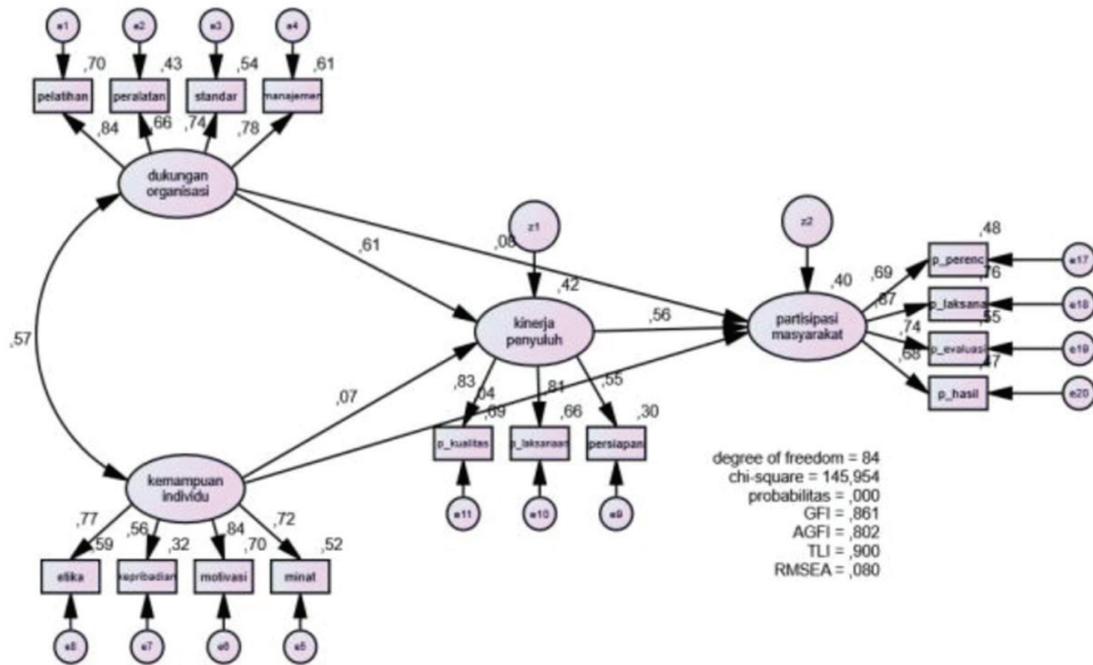
KR : *Konstruk Reliabilitas*.

Pada tabel 2. terlihat kinerja penyuluh kini menjadi tiga indikator dimana pada awalnya lima indikator. Indikator pengembangan profesi dan penunjang penyuluhan memiliki nilai *coeficient standardize* kurang dari 0,5 sehingga dikeluarkan dari model karena dianggap tidak valid. Semua indikator konstruk pada tabel 2. sudah menunjukkan nilai validitas dan reliabilitas konstruk yang baik.



Gambar 2. Uji *Measurement* model

Selanjutnya dilakukan uji *measurement* model secara bersama sebagaimana pada gambar 2. Hasil uji *measurement* model memperlihatkan model memiliki degree of freedom positif yaitu 84 yang berarti model dinyatakan overidentified. Nilai *goodness of fit* belum menunjukkan nilai yang ideal, angka probabilitasnya masih dibawah 0,05 sehingga masih perlu dilakukan *respecification* model. Untuk memperoleh normalitas data pada tahap ini, peneliti melakukan drop out tujuh kode responden karena memiliki data outlier. Hasil uji normalitas setelah data outlier dikeluarkan menjadi 2,272 (lebih rendah dari dari 2,58).



Gambar 3. Uji Struktural Model Standar

Tabel 3. Hasil Uji Struktural Model Standar

Variabel yang dihubungkan	koefisien regresi	R	R ²
do → kp	,296	,607 (***)	,421
ki → kp	,042	,068	
kp → pm	,463	,560 (**)	,400
do → pm	,003	,081	
ki → pm	,019	,036	
kovarians			
do ↔ ki	3,859	,574 (***)	

Sumber: diolah dari data primer

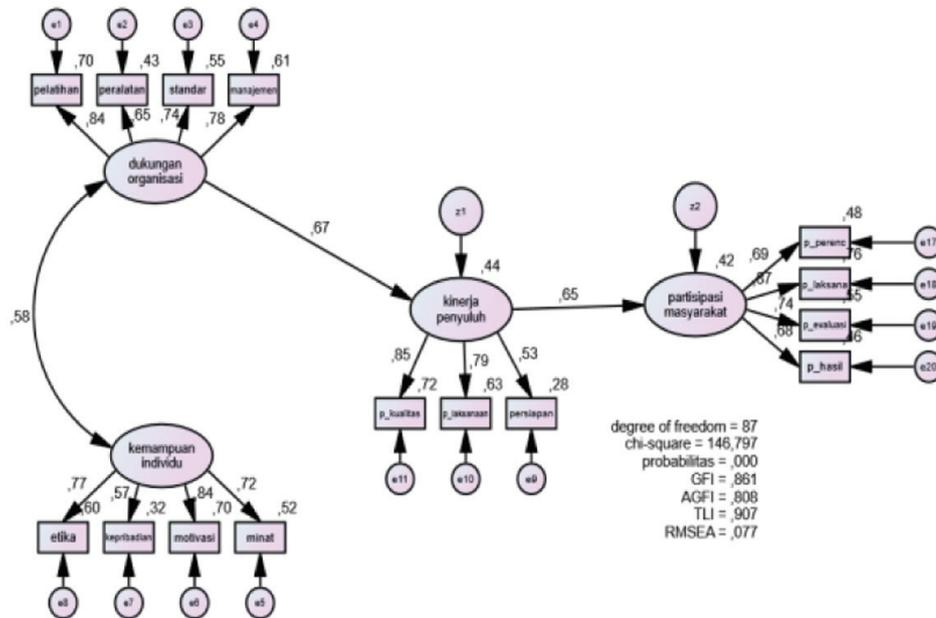
Keterangan:

(***) signifikan α 0,001; (**) signifikan α 0,01; do: dukungan organisasi; ki: kemampuan individu; kp: kinerja penyuluh; pm: partisipasi masyarakat

Analisis dilanjutkan dengan uji struktural model untuk melihat hubungan antar variabel. Tabel 3. memperlihatkan hubungan antar variabel penelitian. Dukungan organisasi berpengaruh terhadap kinerja penyuluh ($r=0,607$; $p=0,000$) tetapi tidak berpengaruh secara

langsung terhadap partisipasi masyarakat ($r=0,019$; $p=0,601$). Kemampuan individu tidak berpengaruh terhadap kinerja penyuluh ($r=0,042$; $p=0,581$) dan tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat ($r=0,036$; $p=0,763$). Kinerja penyuluh berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat ($r=0,560$; $p=0,001$). *Goodnes of fit* juga belum menunjukkan angka yang baik, nilai probabilitas chi-square masih menunjukkan angka 0,00 dibawah taraf 0,05. Dengan demikian model masih perlu dilakukan respecification dengan cara menghapus garis antar variabel yang tidak berpengaruh.

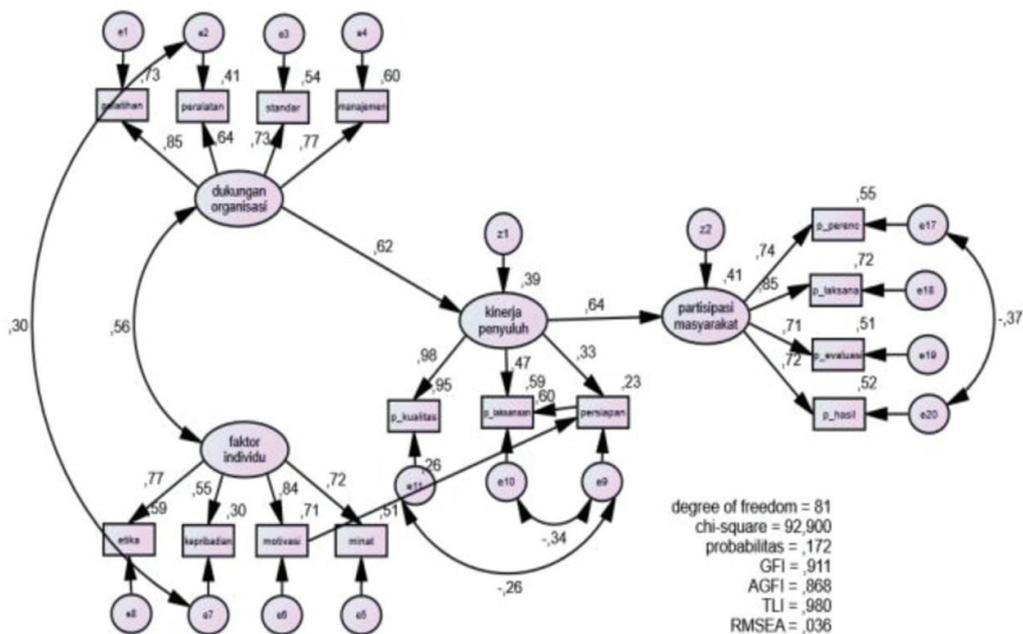
Perubahan spesifikasi model parsimony (pada gambar 4) belum membuat indikator goodness of fit menjadi signifikan. Probabilitas chi-square masih menunjukkan angka kurang dari 0,05. GFI, AGFI, dan TLI belum menunjukkan angka 0,9 dan RMSEA belum kurang dari 0,8. Dengan demikian model belum dinyatakan fit dengan data yang dimiliki.



Gambar 4. Hasil Uji Struktural Model Parsimony

Langkah selanjutnya adalah melihat *output* modification indices. Dalam *output* AMOS menyarankan kepada peneliti untuk menarik garis *variance* dan *covariance* antar indikator maupun antar indikator dengan konstruk. Apa yang disarankan oleh AMOS tidak serta merta diikuti apabila tanpa dasar teori yang bisa melandasi (Santoso, 2011; Ghozali, 2011). Model modifikasi yang telah dilakukan dapat dilihat pada gambar 5.

Setelah dilakukan modifikasi model parsimony maka diperoleh indikator *goodness of fit* yang diharapkan. Nilai probabilitas chi-square 0,172 telah lebih besar dari 0,05. Indikator GFI dan TLI telah menunjukkan nilai 0,9 mendekati angka 1 dan RMSEA 0,036 dibawah 0,08. Dengan demikian model telah dinyatakan fit.



Gambar 5. Uji Struktural Model Parsimony Modifikasi

Tabel 4. Hasil Uji Struktural Model Parsimony Modifikasi

Variabel yang dihubungkan	koefisien regresi	R	R ²
do → kp	,183	,623 (*)	,389
kp → pm	,934	,644 (*)	,415
mot → per	,175	,255 (**)	,226
per → Pel	,994	,603 (**)	,587
kovarians			
ki ↔ do	3,803	,558 (***)	

Sumber: diolah dari data primer

Keterangan:

(*) signifikan $\alpha 0,05$; (**) signifikan $\alpha 0,01$; (***) signifikan $\alpha 0,001$; do: dukungan organisasi; ki: kemampuan individu; kp: kinerja penyuluh; pm: partisipasi masyarakat; mot: motivasi; per: persiapan; pel: pelaksanaan

Sebagaimana dilihat pada tabel 4. pengaruh dukungan organisasi terhadap kinerja penyuluh adalah signifikan dengan nilai $p < 0,05$. Nilai koefisien regresi adalah positif sebesar 0,183 yang berarti jika dukungan organisasi mengalami peningkatan 1 poin maka terjadi peningkatan kinerja sebesar 0,183. Koefisien standardisasi dukungan organisasi sebesar 0,623 yang berarti kekuatan hubungan keduanya adalah sedang. Besarnya pengaruh dukungan organisasi terhadap kinerja penyuluh adalah sebesar 38,9%; 61,1% lainnya disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel.

Tidak ditemukan pengaruh kemampuan individu terhadap partisipasi masyarakat. Namun kemampuan individu memiliki korelasi positif dengan faktor individu dengan nilai p signifikan pada taraf 0,01. Nilai korelasi positif 0,558 berarti jika faktor individu mengalami peningkatan maka akan meningkatkan dukungan organisasi, begitupun sebaliknya.

Pengaruh kinerja penyuluh terhadap partisipasi masyarakat signifikan dengan nilai $p < 0,05$. Pengaruhnya positif dengan nilai

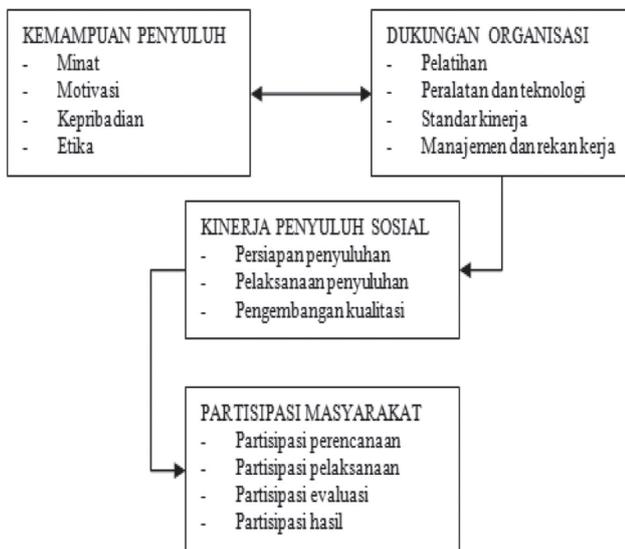
koefisien regresi sebesar 0,934 yang berarti jika kinerja penyuluh meningkat satu poin maka akan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat sebesar 0,934. Koefisien standardisasi sebesar 0,644 berarti kekuatan hubungan kinerja penyuluh dengan partisipasi masyarakat adalah sedang. Kekuatan pengaruh kinerja penyuluh terhadap partisipasi masyarakat adalah sebesar 41,5%.

Di dalam model ini juga ditemukan pengaruh motivasi terhadap persiapan penyuluhan signifikan pada taraf 0,01, berpengaruh positif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,175. Jika motivasi penyuluh meningkat satu poin maka akan terjadi peningkatan kinerja penyuluh dalam mempersiapkan penyuluhan sebesar 0,175 poin. Nilai koefisien standardisasi sebesar 0,255 yang berarti kekuatan pengaruh motivasi terhadap persiapan penyuluh lemah. Besarnya pengaruh motivasi terhadap kinerja penyuluh dalam melakukan persiapan penyuluhan sebesar 22,6%.

Sementara itu kinerja penyuluh dalam mempersiapkan penyuluhan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan penyuluhan. Nilai p signifikan pada taraf 0,05. Koefisien regresi sebesar 0,994 artinya jika persiapan penyuluhan mengalami peningkatan satu poin maka akan terjadi peningkatan pelaksanaan penyuluhan sebesar 0,994 poin. Koefisien standardisasi sebesar 0,603 yang berarti kekuatan pengaruh persiapan penyuluhan terhadap pelaksanaan penyuluhan berada pada taraf sedang. Besarnya pengaruh persiapan terhadap pelaksanaan penyuluhan sebesar 58,7%.

Model struktural juga menunjukkan pengaruh positif antara dukungan organisasi dengan kinerja penyuluh sosial dan pengaruh positif antara kinerja penyuluh sosial dengan partisipasi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kinerja penyuluh sosial adalah mediator

hubungan antara dukungan organisasi dengan partisipasi masyarakat. Model peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 6. Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Kesejahteraan Sosial Melalui Kemampuan Individu, Dukungan Organisasi dan Kinerja Penyuluh Sosial

Dukungan organisasi berpengaruh secara positif terhadap meningkatnya kinerja penyuluh sosial. Dukungan organisasi tersebut meliputi: pelatihan fungsional dan teknis penyuluhan; pengadaan peralatan dan teknologi yang diperlukan dalam penyuluhan langsung maupun tidak langsung; ditetapkannya standar kinerja yang terarah dan terukur; dan dukungan dari manajemen dan rekan kerja.

Pelatihan merupakan cara untuk memberikan kapabilitas (pengetahuan dan kempuan) kepada penyuluh (Mathis & Jackson, 2006). Pelatihan merupakan kegiatan yang sangat penting diberikan untuk menyuluh, mengingat penyuluh sosial direkrut dari berbagai latar belakang pendidikan dan belum ada pendidikan yang secara khusus yang mencetak tenaga penyuluh sosial. Oleh karenanya pelatihan menjadi sarana yang paling tepat untuk membekali penyuluh tentang keterampilan teknis dan kemampuan fungsional sebagai penyuluh. Beberapa

penelitian telah membuktikan pelatihan berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat baik pada area penyuluhan maupun area non penyuluhan (Agusta & Sutanto, 2013; Mali, 2012; Widyatmoko & Pramudi, 2011)

Penyuluh sosial dalam melaksanakan perannya membutuhkan peralatan dan teknologi yang sesuai. Untuk menjangkau masyarakat jauh mereka membutuhkan sarana transportasi. Untuk menjangkau audience yang lebih luas dibutuhkan media internet dan sosial media. Untuk melakukan penyuluhan langsung membutuhkan alat peraga khusus, pembesar suara, proyektor, laptop, DVD player, dan lain-lain. Singkat kata peralatan dan teknologi menjadi utama dalam menopang kinerja penyuluh sosial. Mufti (2013), telah membuktikan bagaimana peran media sosial mempengaruhi kinerja penyuluhan dalam menjangkau audiens.

Dukungan organisasi selanjutnya yang berpengaruh terhadap kinerja penyuluh sosial adalah standar kinerja. Standar kinerja yang realistis dan terukur serta dapat dipahami dengan jelas oleh penyuluh adalah hal yang mutlak. Tanpa adanya standar kinerja, penyuluh mungkin akan melaksanakan tugas tanpa target. Dalam kegiatan sehari-hari seorang penyuluh tidak hanya mengerjakan tugas utamanya saja sebagai penyuluh tetapi ia juga dibebankan tugas-tugas lain yang mungkin tidak relevan dengan tugas utamanya. Sehingga dengan adanya standar kinerja mengarahkan pekerjaan penyuluh agar dapat dicapai pada waktu yang ditargetkan. Hasil penelitian telah menunjukkan bagaimana penetapan standar kinerja dapat membantu karyawan untuk memahami harapan dari posisi mereka, departemen juga dapat menilai kinerja secara objektif, dan pada akhirnya perusahaan juga mampu menilai kinerja dan kegiatan departemen (Manifol, Erkkila, Jhonson, & Bayles, 1998).

Pekerjaan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh penyuluh selalu melibatkan banyak orang dan kegiatannya dilakukan lebih banyak diluar kantor. Dengan demikian diperlukan dukungan manajemen dan rekan kerja lainnya. Manajemen dalam hal ini peran menejer sangat besar dalam memberikan keleluasan dan kebijakan adiministrasi kepada penyuluh untuk melakukan kegiatan luar kantor. Manajer juga berperan besar dalam mengatur anggota tim yang terlibat. Fokus perhatian manajemen terutama bagaimana pembagian reward pada pekerjaan yang dilakukan bersama harus didasarkan pada besarnya kontribusi. Ketidakadilan dalam sistem reward mengakibatkan keterlibatan rekan kerja justru menurunkan kinerja (Baron & Byrne, 2005).

Kemampuan individu meliputi: minat, motivasi, kepribadian ekstra versi, etika kerja tidak ditemukan pengaruhnya secara signifikan terhadap kinerja penyuluh. Hal ini tentu bertolak belakang dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian Sardini (2013) dan Siagian (2013), menemukan hubungan positif minat terhadap kinerja. Kedua penelitian memiliki area yang berbeda, Sardini (2013) pada area pendidikan respondennya adalah siswa sedangkan Siagian (2013) meneliti pada responden staf administrasi yang tentu juga berbeda karakteristiknya dengan penyuluh sosial. Motivasi tinggi tidak menjamain tingginya kinerja dalam penelitian ini. Motivasi yang besar dari penyuluh perlu disokong oleh organisasi berupa kebijakan dan peralatan. Hasil penelitian tentang motivasi yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja penyuluh juga didukung oleh Effendy (2009) pada responden penyuluh swadaya.

Dalam model struktural juga ditemukan pengaruh positif motivasi (indikator atau variabel manifes dari kemampuan individu) secara signifikan terhadap persiapan penyuluhan

(indikator atau variabel manifes dari kinerja). Memulai sebuah pekerjaan adalah pekerjaan yang tidak begitu mudah, namun seorang yang memiliki motivasi tinggi akan lebih mudah mengatasi hal tersebut. Mengingat motivasi merupakan pendorong bagaimana perilaku diarahkan (Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 1997)

Kepribadian ekstrasversi dan etika kerja berguna bagi penyuluh dalam berinteraksi dengan masyarakat dan rekan kerja. Seseorang yang memiliki kepribadian ekstrasversi dan etika kerja yang baik akan sangat mudah bergaul dan mudah diterima dalam kelompok sosial. Namun dalam penelitian ini kepribadian dan etika kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja penyuluh. Hal ini karena indikator pencapaian kinerja penyuluh pada penelitian ini tidak diukur berdasarkan faktor sosial akan tetapi berdasarkan faktor administratif.

Walaupun kemampuan individu tidak memiliki pengaruh langsung terhadap partisipasi masyarakat namun ia memiliki korelasi positif yang signifikan dengan dukungan organisasi. Artinya untuk meningkatkan dukungan organisasi terhadap penyuluh, seorang penyuluh harus menunjukkan kemampuan individu yang lebih baik. Hal ini sangat realistis bahwa organisasi akan memberikannya jika penyuluh menunjukkan diri bahwa mereka bisa bekerja dengan baik. Begitupun sebaliknya jika penyuluh melihat dukungan organisasi cukup baik kepadanya maka ia akan menunjukkan kemampuan individu yang lebih baik pula.

Selanjutnya kinerja penyuluh berpengaruh positif secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan harapan dari tujuan utama penyuluhan sosial, yaitu agar masyarakat atau sasaran penyuluhan mau berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan. Temuan ini relevan dengan

penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kinerja terhadap partisipasi pada area pengembangan masyarakat (Nur, 2015), organisasi koperasi (Apriansyah, Syahrudin, & Utmomo, 2015; Robbi, Indrawati, & Haryana, 2016; Sulistyowati, Hadi, & Harnanik, 2015), dan pendidikan (Nurdiana, 2014). Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa kinerja penyuluh sosial memediasi hubungan antara dukungan organisasi dengan partisipasi masyarakat. Jika lembaga ingin program kesejahteraan sosial mendapat partisipasi aktif masyarakat maka lembaga harus mengupayakan peningkatan kinerja penyuluh sosial melalui dukungan organisasi karena melalui penyuluh sosial program dari lembaga akan diterima baik oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Kemampuan individu meliputi minat, motivasi, kepribadian, dan etika tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja penyuluh sosial. Kinerja penyuluh sosial secara signifikan dipengaruhi oleh dukungan organisasi meliputi: pemberian pelatihan, pengadaan alat dan teknologi yang diperlukan dalam penyuluhan, adanya standar kinerja yang realistis dan terukur, serta adanya dukungan dari manajemen dan rekan kerja. Meskipun kemampuan individu tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja penyuluh sosial namun ia memiliki korelasi positif dengan dukungan organisasi. Kinerja penyuluh sosial berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dan ia menjadi mediator antara dukungan organisasi dengan partisipasi masyarakat.

SARAN

Disarankan kepada lembaga yang mempekerjakan penyuluh sosial, memberikan dukungan berupa pelatihan, alat dan teknologi, membuat standar kinerja, dan dukungan yang

baik dari manajemen dan rekan kerja agar kinerja penyuluh sosial menjadi meningkat. Meningkatnya kinerja penyuluh sosial dapat pula meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesejahteraan sosial. Program kesejahteraan sosial yang dijalankan akan lebih baik jika selalu melibatkan penyuluh sosial karena kinerja mereka merupakan mediator yang baik antara lembaga/organisasi dan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para Penyuluh Sosial yang telah bersedia menjadi responden dan kepada Bapak Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial serta jajarannya yang telah membantu biaya untuk penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, L., & Sutanto, E. M. (2013). Pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan CV Haragon Surabaya. *Agora*, 1 (3), 1-9.
- Apriansyah, Syahrudin, H., & Utmomo, B. B. (2015). Pengaruh Kinerja Pengurus Terhadap Partisipasi Anggota Pada Koperasi Primkop Polda Kalbar. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4 (9), 1-11.
- Arifin, M. Z. (2011). Pengaruh faktor motivasi terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit Ciawi (Skripsi). Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen Intitut Pertanian Bogor.
- Azwar, S. (2012). *Penyusunan Skala Psikologi* (2nd ed.). Yogyakarta: Pustakan Pelajar.
- Baron, R. A., & Byrne, D. (2005). *Psikologi Sosial* (10th ed., Vol. II). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bernardin, J. (2003). *Human Resource*

- Management, An Experiential Approach, (3th ed.). Boston: Mc. Graw.
- Cohen, J. M., & Uphoff, T. (1977). Rural Development Participation: Concept and Measures for Projoct Design, Implementation and *Evaluation*. Newyork: Ithaca: Cornell University.
- Conyers, D. (1992). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Daft, L. R. (2006). Management Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
- Effendy, L. (2009). Kinerja Petani Pemandu dalam Pengembangan PHT dan Dampaknya pada Perilaku Petani di Jawa Barat (DISERTASI). Bogor: IPB.
- Fauzi, M. (2011). Pengaruh etika kerja terhadap terhadap kinerja karyawan pada Garuda Plaza Hotel Medan. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, I. (2011). Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS 19,0. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson, Ivancevich, & Donnelly. (1997). Oranizations; Behavior, Structure, Processes. Chicago: Irwin.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: *Community development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ilmawan, A. B., & Romadi, U. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Waringin Anom, Kabupaten Gresik. *Agriekstensia*, 11 (1), 19-30.
- Luthans, F. (2006). Perilaku Organisasi (10th Edition ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mali, C. G. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Distrik Liquicca, Timor Leste (Thesis). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Manifol, C., Erkkila, D. M., Jhonson, C., & Bayles, G. L. (1998). The depelopment of performance standard for medical communications personnel. *Therapeutic Innovation & Regulatory Science*, 32 (4), 1093-1107.
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2006). Human Resource Management Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi 10 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Mufti, A. (2013). Peran sosial media dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di tujuh daerah terpencil di Indonesia. *e-Indonesia Initiatives (e-II Forum)* (hal. 21-24). Bandung: Institut Teknologi Bandung ICT For Smart Society.
- Muliady, T. R. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Perilaku Petani Padi di Jawa Barat (Disertasi). Bogor: IPB.
- Nur, M. Z. (2015). Pengaruh Kinerja Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sumanda Kecamatan Pugung Kabupten Tanggamus Tahun 2015. Bandar Lampung: Fakultas Keguran Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
- Nurdiana, G. (2014). Hubungan kinerja tutor dengan partisipasi belajar peserta

- didik protrak kejar paket C di Sanggar Kegiatan Belajar Bondowoso tahun 2014 (Skripsi). Jember: Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.
- Permenpan nomor PER/ 06/ M.PAN/ 4/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan angka Kreditnya
- Peraturan Bersama Mensos dan Kepala BKN nomor 41/ HUK-PPS/ 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya
- Ray, G. (1998). *Extension Communication and Management* (3th ed.). Calcuta India: Naya Prokash.
- Robbi, A. A., Indrawati, H., & Haryana, G. (2016). Pengaruh Kinerja Pengurus Koperasi terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Bayduri Permai Kecamatan Mandau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3 (2), 1-10.
- Santoso, S. (2011). *Structural Equation Modeling (SEM) Konsep dan Aplikasi dengan AMOS 18*. Jakarta: PT. Alex Media Kompatindo.
- Santrock, J. W. (2004). *Psikologi Pendidikan* (2nd ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sapar, Jahi, A., Asngari, P. S., Amiruddin, & Purnaba, I. P. (2012). Kinerja penyuluh pertanian dan dampaknya pada kompetensi petani kakao di empat wilayah Sulawesi Selatan. *Jurnal Penyuluhan*, 8 (1), 29-41.
- Sapar, Jahi, A., Asngari, P. S., Saleh, A., & Purnaba, I. G. (2011). Faktor-faktor yang berpengaruh pada kinerja penyuluh pertanian dan dampaknya pada kompetensi petani kakao di empat wilayah Sulawesi Selatan. *Forum Pascasarjana*, 34 (4), 297-305.
- Sardini. (2013). Pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS MAN Pontianak (Laporan Penelitian). Pontianak: Pogram Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura.
- Siagian, R. E. (2013). Pengaruh minat dan kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar Matematika. *Jurnal Formatif*, 2 (2), 122-131.
- Siswanto, D. (2013). Pengaruh Ethos Kerja terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Klaten (Disertasi). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Soetomo. (2006). *Strategi-stretegi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugono, D., Sugiyono, Maryani, Y., Qodratillah, M. T., Sitanggang, C., Hardinawati, M., et al. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
- Sulistiyowati, T. Y., Hadi, S., & Harnanik. (2015). Pengaruh Pelayanan, Kinerja Pengurus Koperasi, dan Motivasi Berkoperasi Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Republik Indonesia

- (KPRI) Eka Karya Kabupaten Kendal.
Economic Education Analysis Journal,
4 (2), 496-508.
- Sumistar, E. A. (2011). Pengaruh minat pemanfaatan sistem informasi dan penggunaan sistem informasi terhadap kinerja individu (Skripsi). Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegor.
- Syah, M., & Prawitasari, J. E. (1998). Analisa Faktif-Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Bidan di Desa dalam Pelayanan Antenatal di Kabupaten Pati. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* Vol.01/no.02/1998, 77-85.
- Umstot, D. D. (1988). *Understanding Organizational Behavior* 2nd Edition. St. Paul: West Publishing Company.
- Walgito, B. (2009). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Widyatmoko, K., & Pramudi, Y. T. (2011). Pengaruh karakteristik individu, sikap, dan pelatihan penggunaan teknologi informasi dan kinerja pegawai kelurahan menuju terwujudnya e-government. *Jurnal Dian*, 11 (2), 109-119.
- Witherington, H. (1991). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Aksara Baru.

PERAN TARUNA SIAGA BENCANA DALAM MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN SERANG DAN SUKABUMI

THE ROLE OF YOUTH MITIGATE SQUAD IN DISASTER MITIGATION IN SERANG AND SUKABUMI

Aulia Rahman

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jalan Dewi Sartika No.200 Cawang III Jakarta Timur, Telp (021) 8017146, Fax (021) 8017126
E-mail: aulia.rahman@kemsos.go.id

Diterima: 30 Agustus 2016; Drevisi: 1 Nopember 2016; Disetujui: 14 Desember 2016

Abstrak

Penelitian mengenai peran Taruna Siaga Bencana (Tagana) pada mitigasi bencana belum banyak dilakukan. Pada umumnya mengkaji peran Tagana pada tahap kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran Tagana dalam mitigasi bencana di Kabupaten Serang dan Sukabumi, bagaimana koordinasi antara Tagana dan pemerintah daerah pada kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Serang dan Sukabumi dan manfaat partisipasi Tagana dalam mendukung ketahanan daerah di Kabupaten Serang dan Sukabumi. Metode wawancara dilakukan terhadap 9 narasumber yang terdiri dari Kementerian Sosial sebagai lembaga pembina pusat, Dinas Sosial, (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Anggota Tagana Kabupaten dan masyarakat. Studi dokumentasi dilakukan dengan melihat artikel, laporan kegiatan dan dokumentasi terkait mitigasi yang sudah dilakukan. Temuan lapangan memberikan kesimpulan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten secara kesinambungan bekerjasama dengan Tagana untuk kegiatan mitigasi bencana dan koordinasi yang dilakukan antar lintas instansi sering dilakukan pada tiga tahapan penanggulangan bencana serta dapat disimpulkan masyarakat memahami tentang kegiatan mitigasi bencana serta turut serta pada setiap kegiatan mitigasi sehingga masyarakat siap jika menghadapi bencana.

Kata Kunci: tagana; mitigasi, bencana.

Abstract

Study of Tagana in disaster mitigation are mostly examines about Tagana role in preparedness and disaster response. This study examines the role of Tagana in disaster mitigation in Serang regency and Sukabumi regency, in terms of their coordinative activities and their participate on regional resilience. Data has collected through Interview Method that covers 9 informants consisted of Ministry of Social Affairs, District Social Services, Regional Disaster Management Agency (BPBD), a Tagana district member and the community. The source of secondary data are from articles, reports of activities and documentation related to the mitigation. The research found that the local government through the District Social Services and BPBD have cooperated with Tagana for disaster mitigation activities. The coordination among those agencies was conducted in three phases of disaster management. Beyond that, the research found that the people have also contributed in any mitigation activities.

Keywords: tagana; mitigation; disaster.

PENDAHULUAN

Paska bencana tsunami Aceh dan Nias, semakin menegaskan bahwa pengurangan risiko dampak bencana tidak hanya dilakukan dengan program yang bersifat struktural namun juga harus disertai dengan program yang mendorong adanya inisiasi fungsional dari elemen masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengakomodir rencana itu.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008, telah ditetapkan program dan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana melalui pendayagunaan rencana tata ruang wilayah sebagai salah satu instrumen utama untuk mengurangi resiko bencana dan peningkatan kualitas informasi, data maupun peta wilayah rawan bencana yang memadai bagi analisa pola pemanfaatan ruang sekaligus menguatkan kelembagaan di tingkat daerah dalam pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang wilayah. Meskipun demikian, pencapaian di bidang penataan ruang wilayah pada tahun 2008 masih terkendala oleh beberapa hal pokok, diantaranya: (1) belum memadainya kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang wilayah di tingkat pusat dan daerah; (2) lemahnya dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang wilayah sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang tanggap terhadap bencana; (3) belum tersedianya Norma Standar Prosedur dan Manual (NSPM) penataan ruang wilayah yang tanggap terhadap risiko bencana; serta (4) belum optimalnya upaya penyediaan data dan informasi spasial (Presiden RI:2008).

Sementara itu, untuk mengurangi risiko bencana, pemerintah dalam RKP Tahun 2009 dengan mengintegrasikan beberapa kebijakan, antara lain: (Presiden RI:2008)

1. Penjabaran rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim global, kegiatan meliputi beberapa diantaranya: a) Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah dan implementasinya harus dilaksanakan oleh suatu institusi yang kuat dan bersifat koordinatif lintas sektoral; b) Mempersiapkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagai salah satu prioritas daerah dengan mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim global, serta dengan mengikutsertakan partisipasi dan konsensus serta komitmen berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah; c) Mengkaji termasuk mengembangkan Sistem Informasi Pengurangan Risiko Bencana serta peta multi rawan bencana yang terintegrasi antar institusi yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana; d) Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta mengembangkan sistem (prosedur dan teknologi) peringatan dini (*early warning system*); e) Mengurangi cakupan luasan dan dampak risiko bencana.
2. Pengembangan kemampuan kelembagaan dan SDM dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim global, kegiatan meliputi beberapa diantaranya: a) Penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan penanganan bencana di tingkat nasional dan daerah-daerah, dengan prioritas pada daerah-daerah yang rawan bencana; b) Pembentukan Forum Nasional (*National Platform*) Penanggulangan Bencana sebagai pelaksanaan kesepakatan internasional dalam Kerangka Aksi Hyogo; c) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana; d) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat untuk mampu memberikan tanggapan yang tepat dan efektif terhadap dampak bencana;

e) Penerapan sistem deteksi dini (*early warning system*) dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan dan dalam menghadapi bencana di tingkat daerah dan masyarakat; f) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM terkait dengan penyedia data dan informasi cuaca dan iklim dalam memprediksi iklim secara akurat dan menyebarkannya ke masyarakat secara langsung (*real time*);

3. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim global, kegiatan meliputi beberapa diantaranya: a) Memanfaatkan pendidikan dan menciptakan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun budaya dalam mengurangi risiko bencana, keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan; b) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim global dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta tokoh masyarakat dan tokoh agama; c) Penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam usaha pelaksanaan pengurangan risiko bencana; d) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan perubahan iklim global yang perlu diterapkan kedalam kegiatan mata pencaharian sehari-hari, seperti pertanian, perikanan dan lain-lain;
4. Pendayagunaan penataan ruang nasional dan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana kegiatan meliputi beberapa diantaranya: a) Konsolidasi dan penyediaan informasi dan data spasial rawan bencana; b) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota berbasis pengurangan risiko bencana; c) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan faktor mitigasi bencana; d) Penguatan dukungan

Sistem Informasi dan Monitoring Penataan Ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang; e) Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang di tingkat nasional dan daerah dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang; f) Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana, daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan.

Pemetaan daerah rawan bencana, pembangunan sistem deteksi dini, dan pemanfaatan penataan ruang nasional merupakan langkah-langkah struktural dalam mitigasi bencana. Namun, ketiga kegiatan itu wajib memberikan ruang pada masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam penyampaian informasi terkait daerah bencana dan juga sebagai penerima informasi terkait bencana dan cara untuk menghindari dampak dari bencana. Poin ketiga dari empat kebijakan di atas menunjukkan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam usaha pengurangan risiko bencana. Banyak usaha untuk mengajak masyarakat untuk berperan dalam usaha ini, salah satunya dengan membentuk Tagana.

Penelitian mengenai peran masyarakat dalam hal ini Tagana pada penanggulangan bencana, belum banyak dilakukan dan sebagian besar meneliti mengenai peran Tagana dalam proses kesiapsiagaan. Pada Siklus penanggulangan bencana, kesiapsiagaan dilakukan setelah dilakukan tahapan mitigasi. Gunawan et. al. (2009) menyimpulkan bahwa secara organisatoris, yang dilakukan Tagana belum menjangkau kegiatan kesiapsiagaan serta komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan Tagana baru sebatas kebijakan pembentukan Tagana. Sementara itu, Enditya (2013) menemukan kurangnya urgensi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam kesiapsiagaan, kurangnya dana dan sumber

daya manusia, sistem manajemen informasi yang kurang efektif dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah yang kurang berjalan. Penelitian Sari (2014) mengungkapkan bahwa peran Tagana masih terfokus pada kegiatan tanggap darurat dan pasca bencana. Idealnya kegiatan penanggulangan bencana lebih diarahkan pada kegiatan pencegahan/prabencana. Belum ditemukan penelitian secara khusus mengenai peran Tagana dalam siklus penanggulangan bencana khususnya pada tahapan mitigasi. Belum ada secara khusus penelitian yang meneliti tentang peran Tagana dalam tahapan mitigasi bencana.

Sementara itu, penelitian Fernandez dan Shaw (2013) yang berjudul “Youth Council Participation in Disaster Risk Reduction in Infanta and Makati, Philippines: A Policy Review” di Infanta dan Makati, Pulau Luzon Filipina. Istilah youth council hampir sama dengan Tagana di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Orang-orang muda di Filipina tidak diberi peran aktif dalam pengurangan terhadap risiko bencana; 2) Perlu melibatkan orang-orang muda dalam membantu membangun masyarakat yang tahan bencana melalui kebijakan pemerintah yang secara tegas mampu mendorong pemuda untuk aktif dalam usaha pengurangan resiko bencana. Pemuda di Filipina merupakan seperlima dari populasi dan merupakan potensi yang signifikan untuk berkontribusi dalam usaha pengurangan resiko bencana; 3) Program baru “Pemuda Pembangunan Filipina”, kebijakan eksplisit yang mendorong partisipasi pemuda dalam Pengurangan Resiko Bencana (PRB), kita bisa berharap inisiatif PRB lebih melibatkan anak muda di Filipina waktu dekat, terutama melalui dewan pemuda di masing-masing yang barangay (desa/daerah) di negara ini.

Melalui fenomena yang dijabarkan di atas dan melalui pengamatan serta data yang

dikumpulkan, dapat beberapa permasalahan, antara lain 1) Koordinasi yang kurang terjalin baik antara pelaksana penanggulangan bencana dengan masyarakat dan dengan pelaksana penanggulangan bencana lainnya; 2) Dukungan yang belum maksimal dari pemerintah daerah dan unsur masyarakat lain dalam peningkatan kapabilitas, fasilitas dan jumlah personil Tagana.

Rumusan masalah dari penelitian ini, yakni bahwa Peran Tagana dalam kegiatan mitigasi belum maksimal. Melalui rumusan permasalahan yang telah disimpulkan, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian, antara lain: 1) Bagaimana peran Tagana dan Pemerintah Daerah dalam mitigasi bencana di Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi? 2) Bagaimana koordinasi Tagana dengan pemerintah daerah terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi? 3) Manfaat partisipasi Tagana dalam mendukung ketahanan daerah di Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi? Tujuan penelitian ini, antara lain: 1) Mengetahui peran Tagana dalam mitigasi bencana di Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi; 2) Mendeskripsikan Koordinasi yang dilakukan Tagana dengan pemerintah daerah terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi; 3) Menjelaskan manfaat partisipasi Tagana dalam mendukung ketahanan daerah di Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi.

Kegiatan penanggulangan bencana alam tidak hanya menjadi tanggung jawab suatu bangsa atau negara tertentu tetapi merupakan tanggung jawab seluruh umat manusia karena penanggulangan bencana alam merupakan bagian dari tanggung jawab kemanusiaan atau kehumanitarian sehingga hal ini mendorong beberapa negara untuk melakukan gerakan untuk bersama-sama proaktif terhadap

penanggulangan bencana melalui Deklarasi Hyogo atau dikenal juga dengan kerangka kerja Hyogo (*Hyogo Framework for Action/HFA 2005-2015*). Berikut ini adalah 5 prioritas aksi utama aksi Hyogo (APEC:2009), 1) Make Disaster Risk Reduction as Priority; 2) Know The Risk and Take Action; 3) Build Understanding and Awareness; 4) Reduce Risk; 5) Be Prepared and Ready to Act. Kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi Sendai yang menghasilkan kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana (2015-2030) dengan 4 prioritas aksi (BNPB:2015), antara lain: 1) Memahami risiko bencana; 2) Penguatan tata kelola risiko; 3) Investasi PRB untuk Resiliensi; 4) Meningkatkan manajemen risiko.

Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional mengenai penanggulangan bencana, dimulai dengan membuat payung hukum dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini menyebutkan bahwa komponen pelaksana penanggulangan bencana memiliki 3 (tiga) tahapan tugas yang secara terintegrasi meliputi, yaitu: a) prabencana, b) tanggap darurat, c) pasca bencana. Pasal 26 ayat 1e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Bab V Hak dan Kewajiban Masyarakat, khususnya Pasal 26 bagian d, e, dan f, yakni: (d) berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial; (e) berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan (f) melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Sedangkan pada bagian “kewajiban masyarakat” yakni Pasal 27 Undang-Undang Penanggulangan Bencana: Setiap orang berkewajiban: (b). melakukan kegiatan penanggulangan bencana dan (c). memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana dan berkonsultasi dengan masyarakat setempat. Perlu tetap diimbangi juga dengan jaminan hukum pada pasal 26 (bagian c) yakni bahwa mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Di sini bisa diperluas juga tentang peran pemerintah dalam memberikan data dan informasi tentang bencana itu sendiri secara proaktif (Jonatan Lassa et.al.: 2009).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat merupakan faktor penting dalam penanggulangan bencana alam. Departemen Sosial melalui Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial berupaya meningkatkan peran masyarakat ini dengan membentuk Taruna Siaga Bencana (Tagana). Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI (Permensos RI) No. 29 Tahun 2012 tentang Tagana, menyebutkan bahwa Tagana adalah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana. Tagana dibentuk pada tanggal 23 Maret 2004. Adapun fungsi Tagana menurut Departemen Sosial (2006), terdiri dari: a) Fungsi Pencegahan, yaitu menghambat dan atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah atau kebutuhan yang dialami oleh korban dan lingkungan sosialnya; b) Fungsi Pengembangan atau

pemberdayaan, yaitu menumbuhkembangkan kemampuan, motivasi, serta peranan korban dan lingkungan sosialnya; c) Fungsi Rehabilitasi, yaitu memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan serta memulihkan dan meningkatkan status dan peran sosial korban dan lingkungan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat; d) Fungsi Perlindungan, yaitu menjamin setiap warga negara agar terhindar dari aneka peristiwa bencana yang menyebabkannya, mengalami berbagai permasalahan; e) Fungsi Penunjang, yaitu mendukung keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan bencana sektor/bidang terkait lainnya.

Pada Pasal 7 Permensos RI No. 29 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pada fase prabencana, Tagana memiliki fungsi, antara lain: a) Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana; b) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana; c) Pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana; d) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana; e) Fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana; f) Pendeteksian dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana; g) Evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; h) Pengurangan risiko dan kesiapsiagaan lainnya.

Carter (2008) mendefinisikan pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat, pemulihan dan pembangunan kembali. Selanjutnya, Carter menyebutkan bahwa tujuan dari manajemen bencana di antaranya, yaitu mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh

perorangan, masyarakat negara, mengurangi penderitaan korban bencana, mempercepat pemulihan, dan memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

Pearce (Djalante et al., 2011) mengemukakan bahwa perencanaan dan pengelolaan bahaya bencana yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana. Pada sistem manajemen penanggulangan bencana, masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dengan komponen bangsa lainnya. Oleh karena itu, masyarakat harus punya andil dalam proses ini. Salah satu upaya pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses penanggulangan bencana yakni dengan membentuk Taruna Siaga Bencana (Tagana) sehingga Tagana menjadi manifestasi dari partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan bencana.

Carter (2008) mendefinisikan mitigasi sebagai tindakan yang bertujuan mengurangi dampak dari bencana alam atau bencana buatan manusia pada suatu bangsa atau masyarakat. Dengan definisi ini, asumsi dasarnya adalah bahwa kegiatan mitigasi itu sementara mencegah beberapa efek bencana, sedangkan efek lain jelas akan bertahan atau terjadi. Kemudian, Carter (2008) membagi ke dalam dua metode, yakni mitigasi fisik dan mitigasi nonfisik. Mitigasi fisik (*Structure Mitigation*) merupakan keseluruhan upaya yang bertujuan meminimalisir risiko bencana dan dampaknya melalui pembangunan infrastruktur. Mitigasi nonfisik (*Non Structure Mitigation*) merupakan keseluruhan upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya dengan cara meningkatkan kemampuan baik fisik maupun teknik melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

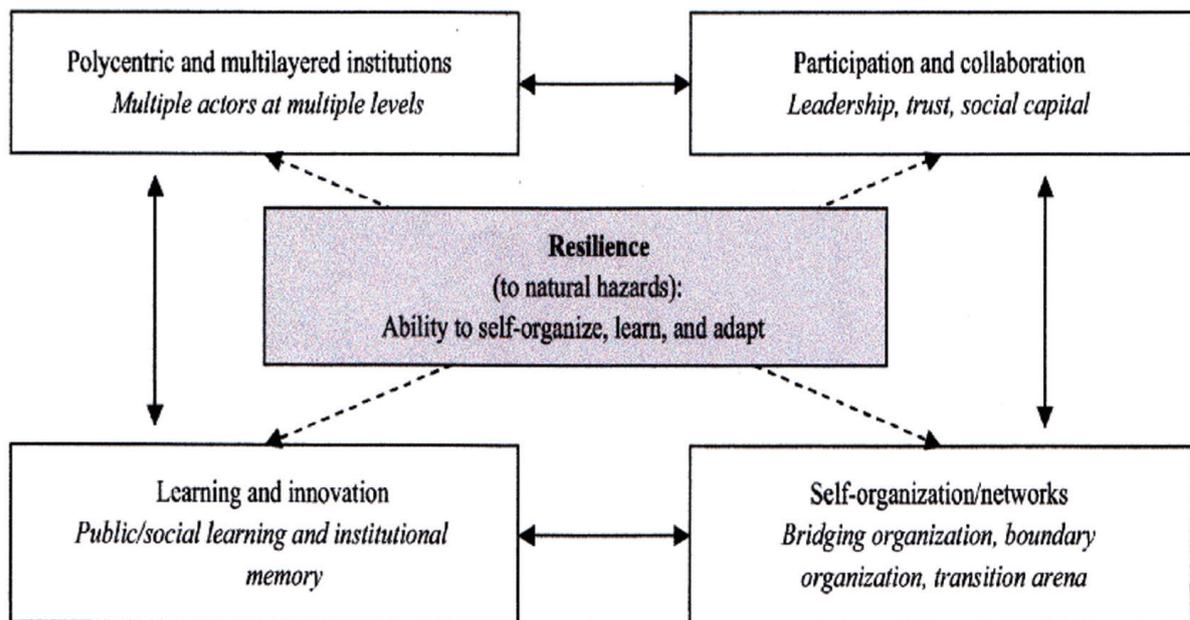
Keterlibatan pihak swasta/LSM dalam penanggulangan bencana, menurut Carter (2008), sebagai sumber non-pemerintah dapat dengan mudah dikoordinasikan ke dalam sistem. Hal ini dapat dilakukan, misalnya melalui dewan bencana nasional, melalui kantor manajemen bencana nasional (dengan adanya link penghubung LSM). dan melalui kelompok pengontrol operasi dan tim penasehat teknis (pada keduanya bisa ada perwakilan LSM). Selanjutnya keterlibatan masyarakat, Carter (1991) menjelaskan bahwa komunitas masyarakat tertentu dapat mempengaruhi beberapa komunitas di satu waktu yang sama dan komunitas ini disebut “*disaster front*”. Oleh karena itu, setiap organisasi penanggulangan bencana harus memenuhi partisipasi atau keterlibatan masyarakat yang sesuai. “*Disaster front*” dapat dijelaskan sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pada tingkat masyarakatlah yang paling terdepan pada sistem manajemen bencana karena masyarakat yang paling mengetahui karakter tempat tinggal dan keadaan sosial yang ada. Hal ini penting dalam manajemen bencana terutama pada level mitigasi.

Rangkaian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen penanggulangan bencana membutuhkan partisipasi dan adanya kolaborasi dari berbagai organ yang termasuk dalam sistem penanggulangan bencana. Kolaborasi menurut Parker dan Braithwaite (Djalante et al., 2011) dapat didefinisikan sebagai proses di mana sekelompok *stakeholder* yang beragam, termasuk aktor pemerintah dan non pemerintah, individu dan masyarakat memberikan

pengetahuan dan sumber daya mereka secara nyata untuk memecahkan secara bersama tentang dilema sumber daya lingkungan atau alam.

Ketahanan daerah memiliki keterkaitan erat dalam mendukung ketahanan nasional. Ketahanan daerah merupakan implementasi dari terwujudnya ketahanan nasional yang diukur melalui 8 gatra (bidang). Menurut Soedarsono (1997), ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik akan suatu kekuatan nyata dan efektif jika dibina secara bertahap melalui adanya ketahanan daerah, di mana ketahanan daerah di bina melalui ketahanan rumah tangga/keluarga dan pada akhirnya ketahanan keluarga akan bertumpu pada kekuatan unsumnya yaitu manusia yang harus memiliki ketahanan individu/pribadi.

Pada kaitannya dengan penanggulangan bencana, kemampuan suatu negara dalam meminimalisir risiko dari bencana menunjukkan ketangguhan negara dalam menghadapi bencana dan hal ini di mulai dari tingkatan daerah sehingga pada akhirnya mendukung ketahanan nasional. Skala besar negara, ketahanan sebuah negara terhadap bencana alam menurut Djalante et al. (2011) dipengaruhi oleh pemerintahan yang adaptif terhadap bencana dan memiliki 4 (empat) karakteristik kunci yang saling berkaitan, antara lain sistem polisentris dan *multilayered institution*, partisipasi dan kolaborasi, organisasi mandiri serta pembelajaran dan inovasi (*learning and innovation*). Keterkaitan antar 4 karakteristik kunci ini digambarkan dalam gambar 1. di bawah ini:



Gambar 1. Interlinkages between Key Characteristics of Adaptive Government in Relation to Building Resilience sumber: *Djalante et al., 2011*.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan merupakan data-data yang berasal dari data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan informan dari unsur pemerintah pusat, yakni dari Direktorat Jaminan Sosial sebagai pembina Tagana Pusat, dari unsur pemerintah daerah yakni dari dinas sosial sebagai pembina Tagana daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai penanggungjawab kegiatan penanggulangan bencana di daerah, dari unsur Tagana daerah yakni koordinator Tagana daerah, dan tokoh masyarakat yang mengetahui tentang Tagana. Keseluruhan berjumlah 9 (sembilan) informan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur buku, jurnal, laporan hasil penelitian, materi seminar, peraturan perundang-undangan yang didapat melalui bahan tercetak atau bahan yang bersifat elektronik yang mengkaji tentang penanggulangan bencana, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dan yang mengkaji tentang Taruna Siaga Bencana (Tagana). Unit analisis dalam penelitian

ini adalah Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi.

Adapun alasan kedua daerah ini dipilih menjadi lokasi penelitian, yakni: 1) Status kedua daerah sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi sesuai data dari Indeks Rawan Bencana Indonesia (BNPB:2011). Dalam Indeks Rawan Bencana Indonesia, Kabupaten Sukabumi berada di peringkat 6 (enam) sedangkan Kabupaten Serang di peringkat 170 (seratus tujuh puluh) secara nasional; 2) Data bencana yang terjadi di Kabupaten Serang dan Sukabumi selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari Januari 2010 sampai dengan Maret 2015 yang cukup sering dan memiliki karakteristik berbeda. Kabupaten Serang memiliki data bencana banjir yang cukup sering dan Kabupaten Sukabumi yang memiliki data bencana longsor cukup signifikan; 3) Rasio Jumlah anggota Tagana kedua daerah yang tidak sebanding dengan luas wilayah, dimana Kabupaten Serang lebih banyak dibandingkan dengan anggota Tagana di Kabupaten Sukabumi, tetapi luas daerah kabupaten

Sukabumi lebih luas dari Kabupaten Serang; 4) Persebaran anggota Tagana Kabupaten Serang dibagi berdasarkan wilayah, yakni Timur, Barat, Selatan dan Utara sedangkan persebaran anggota Tagana Kabupaten Sukabumi secara umum terpenuhi untuk seluruh wilayah namun tidak merata jumlahnya karena lebih banyak pada satu kecamatan tertentu.

Data yang sudah didapatkan dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan model analisis interaktif dari Mathew Milles dan Huberman (1992) dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Profil Tagana Kabupaten Serang

Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Serang mulai terbentuk melalui koordinasi antara Dinas Sosial Provinsi Banten dengan Dinas Sosial Kabupaten Serang. Dinas Sosial Kabupaten Serang sebagai pembina Tagana daerah mengumpulkan anggota masyarakat yang berminat dengan kegiatan sosial dan anggota masyarakat yang sudah sejak lama berkecimpung sebagai relawan ataupun penggiat kegiatan sosial khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Jumlah anggota Tagana Kabupaten Serang sampai saat ini berjumlah 164 orang yang tersebar di beberapa kecamatan.

Tabel 1. Data Penyebaran Tagana Kabupaten Serang

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Cinangka	6
2.	Anyer	2
3.	Ciomas	4
4.	Bojo Negara	11
5.	Pamarayan	9
6.	Bandung	2
7.	Cikande	5
8.	Tunjung Teja	13

9.	Kragilan	22
10.	Kopo	4
11.	Ciruas	15
12.	Binuang	3
13.	Carenang	12
14.	Kragilan	9
15.	Baros	4
16.	Petir	39
17.	Kibin	2
18.	Lebak Wangi	2
Jumlah		164

Sumber: Dinas Sosial Kab. Serang, 2014

Sekilas Profil Tagana Kabupaten Sukabumi

Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat di bawah pembinaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang melalui Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Tagana Kabupaten Sukabumi sampai saat ini berjumlah 52 orang yang tersebar di beberapa daerah yang berada di Kabupaten Sukabumi.

Anggota Tagana Kabupaten Sukabumi memiliki latar belakang yang berbeda-beda namun memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga sesuai dengan jati diri Tagana yang merupakan relawan sosial yang berasal dari masyarakat dan sangat peduli pada kegiatan sosial khususnya tentang penanggulangan bencana.

Tabel 2. Data Penyebaran Tagana Kabupaten Sukabumi

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Palabuhan Ratu	24
2.	Cibadak	2
3.	Cikidang	5
4.	Nyalindung	2
5.	Kadudampit	1
6.	Cimanggu	2
7.	Kabandungan	2
8.	Kalapanunggal	2
9.	Cisaat	3

10. Gunung Guruh	1
11. Tegal Buleud	1
12. Pabuaran	1
13. Bojonggenteng	1
14. Curug Kembar	1
15. Sukalarang	1
16. Purabaya	1
17. Cicantayan	1
18. Sukaraja	1
19. Geger Bitung	1
Jumlah	52

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, 2015

Peran Tagana Dalam Mitigasi Bencana

Tagana yang berasal dari unsur masyarakat memiliki peran yang sangat besar jika dioptimalkan secara baik dan Tagana dapat menjadi pengaruh besar terhadap masyarakat lain untuk berperilaku yang tepat dalam menanggulangi bencana sehingga Tagana dapat juga dikatakan sebagai “*disaster front*” dalam penanggulangan bencana. Kerjasama dan hubungan antara Tagana dengan pemerintah akan menciptakan kolaborasi yang sangat penting terutama jika dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengurangan terhadap risiko dan dampak bencana atau yang sering disebut dengan mitigasi bencana. Pola mutualisme antara pemerintah memiliki program yang berkelanjutan dan sistemik dibantu oleh masyarakat melalui Tagana yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus terkait penanggulangan bencana.

Pada satu sisi, banyaknya sungai besar membuat daerah Kabupaten Serang subur namun pada sisi yang lain rawan bencana banjir jika terjadi curah hujan yang tinggi dan panjang. Keadaan di atas membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Serang memiliki persiapan untuk menanggulangi bencana banjir yang suatu saat dapat terjadi. Dinas Sosial Kabupaten Serang mempersiapkan peralatan terkait penanggulangan bencana agar suatu saat siap

untuk digunakan. Salah satu kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Serang, yakni dengan menginisiasi kegiatan mitigasi bencana. Biasanya kegiatan mitigasi bencana ini dilakukan bersama-sama dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan instansi lainnya dan dilaksanakan di kecamatan yang rawan bencana.

Kegiatan mitigasi yang dilakukan biasanya berbentuk penyuluhan, simulasi dan bakti sosial pada daerah-daerah yang rawan bencana serta daerah yang menjadi wilayah Kampung Siaga Bencana (KSB). Setiap kegiatan mitigasi yang dilakukan selalu melibatkan masyarakat dan anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana). Peralatan komunikasi yang sudah diberikan kepada koordinator Tagana pada beberapa kecamatan di Kabupaten Serang mempermudah komunikasi dan pengerahan anggota Tagana beserta unsur masyarakat lainnya. Tidak hanya Dinas Sosial Kabupaten Serang yang turut menginisiasi kegiatan mitigasi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang sebagai koordinator kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Serang memiliki satu tugas pokok dan fungsi yakni mitigasi bencana sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencana.

Pada sisi yang lain, BPBD Kabupaten Sukabumi sebagai organisasi yang memiliki tupoksi dalam penanggulangan bencana memiliki kegiatan yang termasuk kedalam tahapan mitigasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana alam. BPBD Kabupaten Sukabumi selalu melibatkan organ-organ yang tergabung di dalam sistem penanggulangan bencana, seperti dinas sosial, TNI-Polri, SAR Daerah, Pramuka, PMI dan juga masyarakat di setiap tahapan penanggulangan bencana. Pada tahapan mitigasi bencana ini unsur masyarakat seperti Tagana dilibatkan melalui rekomendasi dinas sosial. Hal ini selain

untuk menambah pengalaman dan kapasitas anggota Tagana, kegiatan mitigasi juga dapat menjadi landasan munculnya kekompakan dan kerjasama antar organ-organ yang berada di dalam sistem manajemen penanggulangan bencana.

Apa yang telah dilakukan Tagana dan pemerintah daerah di atas bila dikaitkan dengan mitigasi bencana, kegiatan yang sudah dilakukan sudah mencerminkan kegiatan mitigasi yang bersifat mitigasi nonfisik atau fungsional, seperti yang dijelaskan Carter (2008) bahwa salah satu kegiatan mitigasi dapat berbentuk mitigasi nonfisik atau fungsional (Nonstructure Mitigation) yang merupakan keseluruhan upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya dengan cara meningkatkan kemampuan baik fisik maupun teknik melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Tagana Kabupaten Serang juga bekerjasama dengan pihak sekolah melalui Gerakan Pramuka untuk memberikan penyuluhan terkait kebencanaan, pada kesempatan ini anggota Tagana sebagai narasumber. Selain itu BPBD Kabupaten Serang bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Tagana akan membuat buku tentang kebencanaan yang nantinya dapat diaplikasikan penggunaannya bagi siswa SD, SMP dan SMA.

Menurut keterangan eksplisit informan dari BPBD Kabupaten Sukabumi (Usman Susilo,

15 Mei 2015), “tidak jarang anggota Tagana menjadi instruktur atau narasumber dalam kegiatan mitigasi yang diinisiasi oleh BPBD karena pengalaman dan kemampuan anggota Tagana Kabupaten Sukabumi yang sudah diakui oleh BPBD. BPBD memberikan dukungan yang bersifat fasilitasi standar dalam kegiatan mitigasi seperti peralatan dan perlengkapan serta kendaraan bagi anggota Tagana yang ikut serta dalam kegiatan. Informan dari Tagana mengatakan bahwa kegiatan mitigasi yang telah dilakukan selalu bersama-sama dengan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem manajemen penanggulangan bencana seperti BPBD, TNI-Polri, SAR daerah dan melibatkan juga masyarakat. Bahkan kegiatan yang dilakukan tidak hanya pada masyarakat pada kawasan tertentu namun juga sering melakukan kegiatan mitigasi berupa simulasi dengan siswa sekolah” (YR, Tagana Kab. Sukabumi, 14 Mei 2015), hal ini penting sebagai proses mitigasi yang bersifat edukasi. Maka, dapat dikatakan kegiatan edukasi ini sangat penting sebagai salah satu cara atau media untuk menumbuhkan partisipasi sosial masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Berdasarkan pengamatan dan pengumpulan informasi di lapangan, dapat diketahui bagaimana peran Tagana dan pemerintah daerah khususnya pada tahapan mitigasi bencana di Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi dapat dipilah pada Tabel 3. di bawah ini:

Tabel 3. Karakteristik Pelaksanaan Mitigasi Bencana

No.	Indikator Karakteristik	Kabupaten Serang	Kabupaten Sukabumi
1.	Bentuk Mitigasi Bencana	Penyuluhan, simulasi dan bakti sosial untuk bencana banjir.	Kegiatan mitigasi yang sering dilakukan merupakan kegiatan mitigasi yang berkaitan dengan bencana longsor.

2.	Peran Pemda	Dinas Sosial Kabupaten Serang memiliki dana untuk menjalankan kegiatan mitigasi bencana sehingga berusaha mengoptimalkan dana yang ada dengan melibatkan instansi mitra lainnya serta masyarakat dan anggota Tagana untuk mensukseskan kegiatan mitigasi bencana.	Kegiatan mitigasi mutlak merupakan tugas pokok BPBD Kabupaten Sukabumi. Dinas Sosial merupakan instansi pendukung dan banyak berperan dalam fase tanggap darurat dan pascabencana.
3.	Peran Tagana	<p>a. Kehadiran Tagana membuat informasi mengenai bencana cepat tersampaikan dan masyarakat juga menjadi mengetahui tentang kebencanaan.</p> <p>b. Tagana menjadi media pembantu pemerintah daerah dalam menyampaikan program-program atau kebijakan pemerintah mengenai penanggulangan bencana.</p>	<p>a. Anggota Tagana selain menjadi peserta kegiatan juga menjadi instruktur atau narasumber dalam kegiatan mitigasi yang diinisiasi oleh BPBD karena pengalaman dan kemampuan anggota Tagana Kabupaten Sukabumi yang sudah diakui.</p> <p>b. Tagana selalu koordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi lain serta wartawan dengan cara bertukar informasi terkait kebencanaan melalui alat komunikasi atau media sosial.</p>
4.	Partisipasi masyarakat dalam Tagana	<p>3. Anggota Tagana selalu siap untuk ikut berpartisipasi baik itu bersifat mitigasi struktural maupun mitigasi nonstruktural.</p> <p>4. Anggota Tagan ikut serta dalam kegiatan mitigasi bencana dengan cara penyuluhan dan simulasi bencana sebagai narasumber dan pendamping teknis di sekolah-sekolah</p>	<p>5. Anggota Tagana selalu ikut serta dalam kegiatan mitigasi melalui rekomendasi Dinas Sosial.</p> <p>6. Anggota Masyarakat sebagai penyambung komunikasi masyarakat di daerah rawan bencana dengan pemerintah daerah.</p>

Koordinasi Tagana dengan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Pada sistem manajemen penanggulangan bencana, koordinasi sangat diperlukan karena seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, sistem manajemen penanggulangan bencana bekerja dengan banyak organisasi yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu koordinasi diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat tujuan

utama dari penanggulangan bencana yakni pengurangan dampak dari bencana. Selain organisasi yang kompleks, sumber daya manusia dan peralatan juga mutlak dimiliki dengan kuantitas yang banyak dan berkualitas sehingga dapat tercipta efektifitas.

Bagaimana koordinasi yang telah dilakukan oleh Tagana dan pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 4. di bawah ini:

Tabel 4. Kondisi Koordinasi Tagana dengan Pemerintah Daerah

Lokasi	Kondisi Terkait Koordinasi Tagana dengan Pemda
Kabupaten Serang	Koordinasi berjalan dengan baik. Setiap kegiatan penanggulangan bencana baik yang diinisiasi oleh BPBD maupun Dinas Sosial selalu mengikutsertakan lembaga-lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana. Tagana selalu diikutsertakan dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Tagana selalu hadir pada setiap kegiatan penanggulangan bencana. Tagana selalu mengkomunikasikan kejadian bencana yang terjadi dengan pihak-pihak terkait dan menyampaikan kebutuhan masyarakat pada saat bencana serta mendistribusikan bantuan bencana.

Wilayah Kabupaten Serang yang luas menjadi tantangan lebih bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk mampu melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dengan baik dan terstruktur. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dan koordinasi antar organ yang berada dalam sistem manajemen penanggulangan bencana termasuk juga pelibatan masyarakat. Kolaborasi dan koordinasi antara Tagana dengan komponen lainnya sudah berjalan dengan baik bahkan kolaborasi dan koordinasi yang baik itu memudahkan dalam penanggulangan bencana. Perlu adanya rapat-rapat koordinasi untuk memperbaharui informasi terkini terkait kesiapan dan ketersediaan personil, logistik dan peralatan dan juga informasi terkini terkait kebencanaan. Pelibatan dunia usaha untuk ikut dalam kegiatan penanggulangan bencana menjadi hal yang mutlak dilakukan karena dunia usaha memiliki tanggungjawab yang sama dalam kegiatan penanggulangan bencana. Tentu hal ini diperlukan komitmen khusus antara pihak dunia usaha dengan pemerintah daerah terkait kegiatan penanggulangan bencana ini.

Dinas Sosial Kabupaten Serang memiliki dana untuk menjalankan kegiatan mitigasi bencana sehingga berusaha mengoptimalkan dana yang ada dengan melibatkan instansi mitra lainnya serta masyarakat dan anggota Tagana untuk mensukseskan kegiatan mitigasi bencana. Pelibatan anggota Tagana dalam kegiatan yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Serang melalui dinas sosial menunjukkan koordinasi dan saling menghormati antar instansi penanggulangan bencana. Bagaimanapun Tagana merupakan tanggung jawab dinas sosial sebagai pembina

teknis di daerah. Kadangkala, permasalahan koordinasi dipicu oleh hal-hal yang tidak terlalu substansi seperti permintaan ijin pelibatan personil, surat-menyurat dan lain sebagainya.

Seperti yang disampaikan oleh informan dari BPBD Kabupaten Serang (ADQ, BPBD Kab. Serang, 16 April 2015): “setiap kegiatan selalu koordinasi dan kerjasama dengan tagana melalui dinsos, setiap terjadi bencana selalu dilibatkan, tagana selalu hadir dalam setiap bencana di kabupaten Serang. Setiap kegiatan mitigasi fungsional seperti sosialisasi atau pelatihan selalu mengundang tagana”. Tagana Kabupaten Serang juga menginformasikan bahwa koordinasi antar aktor penanggulangan bencana sudah terjalin baik, seperti yang disampaikan oleh ASR (Tagana Kab. Serang, 16 April 2015): “sering komunikasi terkait kegiatan penanggulangan bencana, baik dengan dinas, BPBD maupun dengan TNI dan Polisi”. Amsar juga mengatakan: “pada kegiatan prabencana sering dilakukan bakti sosial pembersihan bendungan pamarayan dan pembersihan kali ciujung. Penyuluhan mengenai kebencanaan dengan berkoordinasi dengan masyarakat, kelurahan, kecamatan, dinas sosial dan instansi terkait lainnya. Saat bencana: melakukan pelaporan terkait bencana yg terjadi kepada koordinator dan atau pembina tagana di kabupaten, kemudian memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk siap-siap mengungsi ke tempat yang lebih aman jika akan terjadi banjir. Koordinasi dengan Dinsos terkait lokasi untuk tempat evakuasi, tempat logistik, dapur umum. Membantu mempersiapkan logistik di lapangan. Pasca bencana: membantu distribusi logistik kepada masyarakat, advokasi

kebutuhan masyarakat yang menjadi pengungsi dalam bencana. Trauma healing yang dilakukan anggota Tagana yang perempuan”. Keterangan di atas menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan antar aktor penanggulangan bencana beserta Tagana di Kabupaten Serang sudah terjalin dengan baik.

Wilayah Kabupaten Sukabumi yang lebih luas daripada Kabupaten Serang memerlukan perhatian yang intensif. Hal ini juga dipengaruhi oleh ketersediaan personil dan kualitas personil. “Ketersediaan dan kualitas personil Tagana yang belum terpenuhi seutuhnya” (YR, Tagana Kab. Sukabumi, 14 Mei 2015). BPBD Kabupaten Sukabumi sebagai koordinator dalam kegiatan penanggulangan bencana memiliki peran yang cukup sentral dan berpengaruh. BPBD memiliki peran sentral namun BPBD tetap memerlukan instansi lain untuk menutupi kekurangan yang dimiliki oleh BPBD begitu juga sebaliknya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sistem polisentris yang terdapat banyak organisasi dalam sistem manajemen penanggulangan bencana.

Menurut NJ (Dinas Sosial Kab. Sukabumi, 15 Mei 2015), “koordinasi sangat terjalin dengan baik, sering komunikasi antar instansi terkait seperti BPBD, SAR, TNI dan melibatkan tagana tentunya. Sering ada Rapat koordinasi yang dilakukan oleh BPBD dengan instansi terkait selain jika terjadi bencana. Koordinasi terkait kegiatan mitigasi pernah dilakukan bersama-sama dengan instansi lainnya ketika di daerah Cisaat ada pergerakan tanah yang dilaporkan tagana dan instansi penanggulangan bencana mengambil langkah bersama-sama untuk mengevakuasi masyarakat”. YR (Tagana Kab. Sukabumi, 14 Mei 2014) juga mengatakan “Tagana selalu koordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi lain serta wartawan dengan cara bertukar informasi terkait kebencanaan melalui alat komunikasi atau media sosial”.

Keterangan-keterangan di atas menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan antar aktor penanggulangan bencana Tagana di Kabupaten Sukabumi sudah terjalin dengan baik bahkan koordinasi juga terjalin dengan media massa melalui wartawan.

Review Djalante et al. (2011) menunjukkan bahwa lembaga polisentris dan berlapis-lapis memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mempengaruhi kapasitas dalam mengelola ketahanan terhadap bencana. Berjalannya sistem manajemen bencana dapat secara baik berjalan melalui sistem pemerintahan yang polisentris seperti yang dikemukakan oleh McGinnis (Djalante et al., 2011).

Kerjasama dan koordinasi juga dilakukan dengan pihak dunia usaha namun kerjasama yang dilakukan masih pada tahap tanggap darurat dengan memberikan bantuan logistik bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan penerjunan relawan-relawan dari dunia usaha. Koordinasi dan kerjasama pada kegiatan penanggulangan bencana yang sudah berjalan dengan baik di Kabupaten Sukabumi tercermin dalam proses tanggap darurat dan pascabencana longsor yang terjadi pada akhir Maret 2015 di Desa Cimerak Kecamatan Cireunghas yang dilakukan dengan waktu singkat, dimulai dari evakuasi masyarakat dan korban sampai dengan pascabencana, dimana masyarakat akan ditempatkan pada daerah yang aman dengan dana yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Setiap kegiatan penanggulangan bencana yang melibatkan Tagana, anggota Tagana selalu hadir untuk membantu terlaksananya kegiatan dengan baik dan lancar, bahkan beberapa anggota Tagana sering diamanatkan untuk menjadi instruktur pada pelatihan yang diselenggarakan oleh BPBD (US, BPBD Kab. Sukabumi, 15 Mei 2015). Informasi mengenai kebencanaan

tidak hanya berasal dari masyarakat saja namun juga dapat melalui wartawan atau media massa. Hal ini menjadi simbiosis mutualisme sehingga Forum Tagana Kabupaten Sukabumi tetap menjalin komunikasi dengan wartawan karena tidak semua masyarakat ataupun Tagana mampu secara luas menyebarkan informasi.

Oleh karena itu, penting bagi komponen-komponen seperti komunikasi, sistem peringatan dan fasilitas yang ada di dalamnya harus berfungsi secara efisien pada tingkat tertinggi dan harus dijaga sejauh mungkin dari efek bencana. Hal ini juga penting bahwa pemerintah harus mengatur organisasi non-pemerintah untuk memperluas peran pada penanggulangan bencana sehingga mereka dapat mengatasi gangguan tambahan, dan tekanan yang terdapat di dalamnya.

Manfaat Partisipasi Tagana Bagi Ketahanan Daerah

Kehadiran Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Kabupaten Serang sangat bermanfaat bagi masyarakat, dengan kehadiran Tagana

membuat informasi mengenai bencana cepat tersampaikan dan masyarakat juga menjadi mengetahui tentang kebencanaan. NK, salah satu tokoh pemuda Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang, mengatakan bahwa “adanya Tagana sangat membantu masyarakat, tagana membantu informasi terkait kebencanaan. Masyarakat menjadi memahami tentang kebencanaan sehingga dapat mengurangi jatuhnya korban dan mengurangi kerugian”. (21 April 2015)

Bagi Pemerintah Kabupaten Serang, kehadiran Tagana menjadi media pembantu pemerintah daerah dalam menyampaikan program-program atau kebijakan pemerintah mengenai penanggulangan bencana sehingga yang paling utama masyarakat menjadi mengetahui bagaimana cara yang dilakukan untuk meminimalisir dampak dari bencana alam.

Manfaat partisipasi Tagana terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 5. di bawah ini:

Tabel 5. Kondisi Manfaat Partisipasi Tagana

Lokasi	Kondisi Terkait Koordinasi Tagana dengan Pemda
Kabupaten Serang	Bagi Pemerintah Kabupaten Serang, Kehadiran Tagana menjadi media pembantu pemerintah daerah dalam menyampaikan program-program atau kebijakan pemerintah mengenai penanggulangan bencana. Tagana membantu informasi terkait Kebencanaan. Bagi masyarakat, tagana sangat membantu masyarakat, masyarakat menjadi memahami tentang kebencanaan sehingga dapat mengurangi jatuhnya korban dan mengurangi kerugian.
Kabupaten Sukabumi	Bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Tagana sering memberikan info tentang kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan bencana kepada instansi terkait dengan maksud untuk menjadi kewaspadaan. Bagi masyarakat, Tagana menambah pengetahuan masyarakat tentang bencana dan menjadi penyambung informasi masyarakat kepada pemerintah

Partisipasi dan kolaborasi masyarakat diperlukan dalam manajemen penanggulangan bencana. Partisipasi dan kolaborasi masyarakat ini dipengaruhi oleh kepemimpinan baik dalam masyarakat dan pemerintahan, faktor kepercayaan dan adanya modal sosial/social

capital. Modal sosial menurut Sharma dan Patt (Djalante et al., 2011) merupakan norma dan hubungan sosial dalam struktur sosial masyarakat yang memungkinkan adanya koordinasi dan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan juga telah diidentifikasi

sebagai elemen penting untuk membantu masyarakat menjadi lebih kuat menghadapi bencana. Tagana sebagai salah satu aktor dalam struktur sosial masyarakat harus mampu menjadi bagian dari modal sosial yakni sebagai penjaga hubungan sosial masyarakat dan juga pemerintah daerah khususnya terkait dengan penanggulangan bencana.

Jumlah anggota Tagana yang ada di Kabupaten Sukabumi lebih sedikit jumlahnya dari Kabupaten Serang dan persebaran anggota Tagana di Kabupaten Sukabumi tidak sepenuhnya terwakili di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi karena ada penumpukan anggota Tagana pada satu kecamatan tertentu (YR, Tagana Kab. Sukabumi, 14 Mei 2015). Namun hal ini tidak mempersurut partisipasi Tagana dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Sukabumi khususnya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana alam. Selain itu, NJ (Dinas Sosial Kab. Sukabumi, 15 Mei 2015) mengatakan “anggota Tagana sering memberikan info tentang kegiatan pertambangan yang berpotensi bencana kepada Dinsos dan instansi terkait agar menjadi kewaspadaan”.

Upaya yang dilakukan Tagana di atas, menunjukkan bahwa Tagana bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pihak terkait atas kerawanan suatu daerah akan bencana. Carter (2008) menegaskan bahwa komunitas masyarakat tertentu dapat mempengaruhi beberapa komunitas di satu waktu yang sama dan komunitas ini disebut “*disaster front*”. Oleh karena itu, setiap organisasi penanggulangan bencana harus memenuhi partisipasi atau keterlibatan masyarakat yang sesuai. Pemberian informasi kepada pihak terkait dan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi

masyarakat ini juga dapat didorong dengan adanya sosialisasi penilaian terhadap bencana dengan menggunakan kearifan lokal sehingga pengetahuan yang diberikan ke masyarakat tidak hanya bersifat teori dan praktek formal masa sekarang namun juga teori dan praktek yang sudah berjalan dari sejak dahulu. Kearifan lokal merupakan bagian dari norma sosial masyarakat dan ini menjadi bagian dari modal sosial masyarakat dalam menghadapi bencana alam.

Manfaat Tagana terhadap ketahanan daerah dapat jabarkan sebagai berikut, salah satu indikator dari ketahanan daerah adalah masyarakat yang memiliki kemandirian dan inisiatif dalam menghadapi bencana alam. Seperti yang disampaikan salah satu anggota masyarakat Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi, TN (16 Mei 2015), “Tagana bagus, masyarakat menjadi tahu tentang bencana, jika terjadi bencana harus tahu berbuat apa dan harus menghubungi siapa”.

Kemandirian dan inisiatif masyarakat tentunya diperoleh melalui pelatihan, penyuluhan dan simulasi dalam menghadapi bencana alam secara berkelanjutan. Seperti yang diungkapkan Djalante et al. (2011) bahwa faktor partisipasi masyarakat dan kolaborasi masyarakat dengan pemerintah merupakan salah satu faktor dalam mendukung ketahanan suatu bangsa. Oleh karena itu selain partisipasi masyarakat (Tagana) diperlukan juga persiapan anggaran oleh pemerintah untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi risiko dan dampak dari bencana alam.

Ketahanan suatu daerah terhadap bencana alam dapat dilihat melalui indikator adanya sistem manajemen penanggulangan daerah, partisipasi masyarakat dan LSM, dan adanya inovasi dan transfer pengetahuan tentang bencana. Jadi, Pengetahuan masyarakat

atas kegiatan penanggulangan bencana dan partisipasi dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana khususnya pada fase prabencana seperti kegiatan mitigasi menjadi indikator yang diharapkan berjalan sehingga dapat mendukung ketahanan daerah.

KESIMPULAN

Peran Tagana dalam kegiatan mitigasi bencana sangat signifikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada Kabupaten Serang kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan dinas sosial merupakan inisiasi dari anggota Tagana di lapangan, meskipun memiliki dana yang kecil namun kegiatan mampu dilaksanakan dan melibatkan instansi lain. Pada Kabupaten Sukabumi, kegiatan mitigasi mutlak merupakan tugas BPBD Kabupaten Sukabumi. Dinas sosial merupakan instansi pendukung dan banyak berperan dalam fase tanggap darurat dan pascabencana. Namun, BPBD tetap melibatkan dinas sosial dan Tagana dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana tidak terkecuali mitigasi bencana.

Pada umumnya, terkait koordinasi penanggulangan bencana pada kedua daerah sudah berlangsung dengan baik dan lancar. Hal ini dibuktikan dengan sering dilakukan rapat koordinasi baik pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Sering melibatkan instansi lain pada saat kegiatan penanggulangan bencana terutama pada kegiatan mitigasi bencana sehingga dapat memupuk kekompakan dan menjalin komunikasi secara optimal dan hal ini terindikasi juga dengan cepatnya pemberlakuan tanggap darurat dan pascabencana.

Masyarakat mengetahui tentang kebencanaan, yakni mulai dari penilaian terhadap bahaya, informasi bencana bahkan sistem manajemen penanggulangan bencana pada level komunitas masyarakat. Masyarakat sebagai “*disaster front*” memiliki peran sentral

dalam sistem manajemen penanggulangan bencana karena tidak mungkin pemerintah mampu memenuhi kesiapan sumberdaya dalam kegiatan penanggulangan bencana. Pada masa saat ini, masyarakat sudah mampu melakukan kegiatan minimal pada tahap prabencana yakni, mitigasi dan kesiapsiagaan. Keseluruhan kemampuan itu tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan mitigasi yang dilakukan Tagana bersama pemerintah daerah. Kedua hal, mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi menjadi dampak langsung peran masyarakat melalui Tagana dalam mendukung ketahanan daerah terhadap bencana alam.

SARAN

Partisipasi Masyarakat melalui Tagana harus ditingkatkan dengan kemampuan yang tidak hanya berkisar pada saat tanggap darurat dan pascabencana namun juga pada tahap prabencana. Melalui ketersediaan dana yang memadai dapat meningkatkan program-program untuk melatih anggota Tagana dan masyarakat agar dapat mengurangi dampak bencana alam. Permasalahan ketersediaan dana, pemerintah dapat menggandeng lembaga-lembaga filantropi yang memiliki dana dan program untuk mitigasi bencana.

Koordinasi merupakan unsur yang sangat mendukung dalam manajemen penanggulangan bencana. Oleh karena itu perlu sosialisasi dan latihan bersama secara terus menerus dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana untuk menjaga terjalannya koordinasi antar aktor penanggulangan bencana. Tidak hanya pemerintah, TNI/Polri dan pihak swasta bahkan komunitas masyarakat harus dapat menginisiasi kegiatan penanggulangan bencana khususnya mitigasi bencana dan harus menjadikan salah satu program penting dalam hubungannya dengan manajemen penanggulangan bencana. Perlu ada jobdesk yang jelas antara lembaga-

lembaga dalam manajemen penanggulangan bencana. Terlebih yang terkait dengan kegiatan mitigasi struktural, dengan geliat pembangunan saat ini perlu mengutamakan unsur manajemen bencana. Oleh karena itu, pemimpin daerah dapat menggunakan pengaruhnya dalam usaha ini dengan melakukan perencanaan pembangunan yang berdasarkan pengurangan risiko bencana. Pemimpin daerah dapat melakukan koordinasi lintas sektoral terkait dengan hal ini dan bisa menunjuk lembaga tertentu yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas lembaga itu dalam manajemen penanggulangan bencana. Misalnya untuk pembangunan gedung yang berada dekat dengan jalur hijau atau dekat dengan daerah yang rawan terjadi bencana, pemimpin daerah dapat meminta pendapat lembaga-lembaga yang bisa menilai model gedung yang tepat dibangun di daerah itu. Bisa juga pemerintah membuat pemetaan wilayah yang rawan akan terjadinya bencana.

Konsistensi dan partisipasi masyarakat melalui Tagana harus terus terjaga dengan mengikutsertakan Tagana dalam berbagai tahapan penanggulangan bencana terutama pada proses mitigasi bencana. Hal ini penting, mengingat Tagana merupakan salah satu elemen masyarakat yang berperan dalam penanggulangan bencana yang diakui oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus mampu menyiapkan program untuk dapat meningkatkan peran Tagana dalam tahapan penanggulangan bencana sehingga menjadi poin penting menjaga ketahanan daerah khususnya dalam manajemen penanggulangan bencana. Tidak tertutup kemungkinan ada kerjasama “segitiga” antara pemerintah daerah, lembaga filantropi dan Tagana untuk membangun peran masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Margaretha Hanita, Drs. Gunawan yang memberikan tanggapan dan masukan dalam proses penelitian ini. Kepada narasumber-narasumber yang telah bersedia memberikan informasi serta Prof. Carunia M. Firdausy (Profesor Riset LIPI) atas masukan dan tanggapan terhadap artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- APEC. (2009). *Strategy for Disaster Risk Reduction and Emergency Preparedness and Response in the Asia Pacific region : 2009 to 2015*. Lima: APEC.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. (2011). *Indeks Rawan Bencana Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, BNPB RI.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. (2015). *Kerangka Kerja Sendai. Kerangka Kerja Sendai (2015-2030) Untuk Pengurangan Risiko Bencana*. Jakarta: BNPB RI.
- Carter, W. N. (2008). *Disaster Management: “A Disaster Managers Handbook*. Manila: Asian Development Bank.
- Departemen Sosial RI. (2006). *Taruna Siaga Bencana (Youth Disaster Preparedness Unit), sebagai Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas*, Jakarta: Depsos RI.
- Djalante, R., Holley, C., & Thomalla, F. (2011). Adaptive governance and managing resilience to natural hazards. *International Journal of Disaster Risk Science*, 2(4), 1–14. <http://doi.org/10.1007/s13753-011-0015-6>

- Enditya, R. (2013). Peran Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Dalam Kesiapsiagaan Bencana Di DKI Jakarta (Studi Kasus Terhadap Taruna Siaga Bencana Jakarta Barat). Universitas Indonesia.
- Fernandez, G., & Shaw, R. (2013). Youth Council participation in disaster risk reduction in Infanta and Makati, Philippines: A policy review. *International Journal of Disaster Risk Science*, 4(3), 126–136. <http://doi.org/10.1007/s13753-013-0014-x>
- Gunawan, Sugianto, A. D. A. (2009). Peran Tagana Dalam Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Untuk Mengurangi Resiko Bencana Alam. Jakarta: P3KS Press.
- Lassa, J., Pujiono, P., Pristiyanto, D., Paripurno, E. T., Magatani, A., & Purwati, H. (2009). Pengelolaan Resiko bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Menteri Sosial RI. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Tagana).
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009.
- Sari, D.P. (2014). Analisis Peran Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanggulangan Bencana di Kota Bengkulu, Universitas Bengkulu.
- Soedarsono, S. (1997). Ketahanan Pribadi & Ketahanan Keluarga Sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional (Cet. 2.). Jakarta: Intermedia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

PENGEMBANGAN KETERAMPILAN SOSIAL DAN KEWIRAUSAHAAN PADA ORGANISASI PEMUDA KEAGAMAAN DI DEPOK

DEVELOPING OF SOCIAL SKILLS AND ENTREPREUNERSHIP IN FAITH BASED ORGANIZATION IN DEPOK

Sari Viciawati Machdum et.al, Kania Saraswati Harisoesyanti, Ni Luh Putu Agastya, Getar Hati, Lucky Kusuma Wardani, dan Sri Daryanti

Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia, 16424
E-mail: sari.viciawati@ui.ac.id

Diterima: 7 April 2016; Direvisi: 5 Oktober 2016; Disetujui: 14 Desember 2016

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kelompok pemuda dalam organisasi Muhammadiyah sebagai *Faith Based Organization* (FBO) menjadi agen perubah dalam pengembangan masyarakat lokal di Kelurahan Cinangka, Depok, Jawa Barat. Penelitian ini membahas tentang proses intervensi kelompok pemuda dengan mempergunakan strategi penelitian aksi (*participatory action research*). Tahapan penelitian aksi terdiri dari tiga tahap, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi (*look*), merancang program intervensi (*think*), dan mengimplementasikan program intervensi (*act*). Berdasarkan identifikasi masalah dan kebutuhan pada tahap *look*, penelitian ini menemukan potensi masyarakat dalam upaya penyelesaian permasalahan lingkungan. Selain pemuda yang tergabung dalam FBO, ada juga kelompok ibu yang terlibat. Tahap *look* memperlihatkan bahwa potensi pemuda dari FBO dapat maksimal apabila mendapatkan dukungan dari elemen lain, terutama orang tua di dalam komunitas sasaran. Kemudian melalui proses perencanaan kegiatan dalam tahap *think* bersama komunitas sasaran, terdapat beberapa kegiatan yang diimplementasikan dalam penelitian ini, yaitu pengembangan keterampilan sosial dan kewirausahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi kelompok pemuda dalam pengembangan komunitas melalui pengembangan keterampilan kewirausahaan, tidak dapat menanggalkan urgensi keterampilan sosial guna memperkuat peran pemuda dari FBO di komunitas.

Kata Kunci: *pengembangan masyarakat, intervensi kelompok pemuda, pengelolaan lingkungan, Faith Based Organization, keterampilan mikro.*

Abstract

This study examines the youth groups in the Muhammadiyah organization as an Faith Based Organization (FBO) as agents of change in community development at Cinangka Village, Depok, West Java. By using a Participatory Action Research, this study discusses the process of youth group intervention in three stages, which covers needs and potencies assessment (look), action plan (think) and implementation (act). Based on 'look' phase, this study found people's potential at their community which are youth in FBO and groups women. In this phase has identified that youth's potencies in FBO could be maximized if supported by parents. In the next stage through planning process, there were some activities that are implemented in this study which are development of social skills and entrepreneurship. This study has found that youth group intervention should also recognize social skills on strengthen the role of youth in FBO.

Keywords: *community development, youth groups intervention, environmental management, Faith Based Organization, micro skills.*

PENDAHUHAN

Pemuda memiliki karakteristiknya dan keunikannya tersendiri. Dalam konteksnya di Indonesia, pemuda dapat dilihat sebagai potensi karena jumlahnya mencapai 62 juta. Hal ini berarti 26% dari total jumlah penduduk di Indonesia adalah pemuda yang berusia antara 15 tahun s.d. 29 tahun (BPS, dalam Harmadi, 2013) Upaya-upaya yang dapat mengelola potensi pemuda penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi berbagai perubahan sosial dalam proses pembangunan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fatusi & Hindin (2010), benturan nilai di masyarakat dapat menghambat persiapan pemuda menjadi anggota masyarakat yang produktif. Padahal potensi yang ada pada generasi muda sangat penting untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya, (Gallagher, Stanley, Shearer, & Mosca, 2005) mengungkapkan youth development penting bagi pemuda dalam menemukan potensi dirinya sehingga keberadaannya di masa kini dan yang akan datang memberikan manfaat bagi mereka dan juga lingkungan yang lebih luas.

Keterlibatan pemuda dalam pembangunan dapat dilihat dari berbagai kegiatan dan aktifitas mereka yang dapat memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri maupun lingkungannya. Salah satu wadah yang dapat memfasilitasi keterlibatan pemuda yaitu organisasi kepemudaan.

Dari berbagai bentuk organisasi pelayanan kemanusiaan atau dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial disebut dengan *Human Service Organization* (HSO), *Faith Based Organization* (FBO) memiliki peran penting dalam proses pembangunan (Canda & Furman, 1999; Christens, Jones, & Speer, 2008; Conrad, 1999; Graddy & Ye, 2006; Hamilton, 2011; McLeigh, 2011; Payne, 2005; Wuthnow, Hackett, & Hsu, 2004). Penelitian yang membahas mengenai

FBO pun telah ada dalam yang beragam dari keterkaitannya dengan kegiatan ekonomi mikro, manajemen, kesehatan, dan lain-lain (Ebaugh, Pipes, Chafetz, & Daniels, 2003; Ferguson, Wu, Spruijt-Metz, & Dyrness, 2007; Gusfahmi, 2009; Kaiser, 2010; Mintarti, Kurniadi, & Utomo, 2009; Siena, 2005).

Penelitian yang membahas mengenai peran pemuda dalam FBO juga telah ada sebagaimana yang tuliskan oleh Ruiz, dkk (2006). Namun Penelitian tersebut lebih terkait dengan pemuda dalam kegiatan pengambilan data semata. Oleh karenanya pembahasan mengenai peran dalam *Faith Based Organization* bersama masyarakat dalam pengembangan lingkungan di komunitas adalah suatu hal yang menarik. Terutama pada gambaran mengenai bagaimana peran pemuda memiliki potensi sebagai salah satu kelompok perubah untuk peduli dalam mengelola sampah di lingkungannya sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan komunitas seperti yang dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah di RW 08, Kelurahan Cinangka, Depok, Jawa Barat. Dinamika dalam proses pemberdayaan masyarakat menjadi unik karena keterlibatan orang lebih dewasa terutama tokoh masyarakat dan kelompok PKK (Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak, & Hawkins, 2004).

Penelitian ini mengkaji bagaimana pemuda yang aktif berorganisasi dalam *Faith Based Organization* melakukan kegiatan bersama masyarakat sekitar dalam mengelola lingkungannya. Partisipasi para pemuda tersebut dibangun dalam sebuah proses perubahan terencana yang dilaksanakan dalam proses pemberdayaan yang menekankan peran serta pemuda dan elemen lainnya yang ada di komunitas. Upaya memunculkan partisipasi masyarakat terutama pemuda juga memiliki tantangan. Untuk meminimalisir hambatan yang kerap terjadi dalam proses pemberdayaan masyarakat, proses perubahan terencana

yang dilakukan pun mempergunakan *direct provision of services: group work services* dan *educator* yang lebih mengarah pada pelaksanaan peran sebagai *enabler*; dan *system maintenance role: facilitator, team member*, dan *supervisor* (Hepworth, Rooney, Gottfried, & Larsen, 2006; Hepworth, 2006). Peran-peran dipergunakan untuk intervensi sosial di komunitas yang bersifat *bottom up* (Ife, 1997) pun memperlihatkan kebermanfaatannya dalam membantu proses kegiatan yang bersifat berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah Participatory Action Research karena salah satu karakteristik dari penelitian ini adalah untuk pemberdayaan dengan mempergunakan tiga tahapan umum: *look* (wawancara mendalam, diskusi kelompok, observasi, dan *pre-test*), *think* (wawancara mendalam, diskusi kelompok, dan observasi) dan *act* (wawancara mendalam, diskusi kelompok, observasi, dan *pre-test*) (Stringer, 2014). Baum, MacDougall, & Smith, (2006), menyatakan bahwa *Participatory Action Research* dapat mempergunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Selain kualitatif, penelitian ini mempergunakan *pre-test* dan *post-test* untuk memperkuat proses tahapan *look, think* dan *act*.

Melalui metode tersebut, tujuan yang diharapkan adalah adanya perubahan perilaku dari komunitas yang lebih baik. Menurut (Salame, 2014) dalam *theory of change: from input to impact*, terdapat empat elemen penting didalam perubahan tersebut, yaitu *input, output, outcome* dan *impact*. *Outputs* adalah segala sesuatu yang bisa dipengaruhi langsung oleh intervensi yang dilakukan, sedangkan *outcomes* adalah segala sesuatu yang tidak bisa secara langsung dipengaruhi oleh intervensi.

Pengukuran perubahan input menjadi *output* bertujuan untuk memahami mengenai implementasi kegiatan yang dilakukan, disebut sebagai *process evaluation*. Sedangkan pengukuran *outcome* menjadi *impact* digunakan untuk memahami *impact evaluation*.

Evaluasi perubahan tersebut dapat berada dalam dua skema tersebut: *inputs-output (process evaluation)* dan *outcome-impact (impact evaluation)*. Penelitian ini menitikberatkan pada ruang lingkup skema *inputs-output (process evaluation)* dengan menggunakan beberapa metode diantaranya adalah *pre-post test*, dan observasi yang dilakukan selama kegiatan dilakukan.

Adapun evaluasi disini hanya mengambil kasus dari dua komunitas saja, yaitu pemuda Muhammadiyah Cinangka Depok dan ibu-ibu PKK di Cinangka Depok, dan tidak menggunakan *control group* sebagai pembanding. Aktivitas input yang dievaluasi pada penelitian ini diantaranya adalah kegiatan sosialisasi mengenai sampah dan pentingnya pengelolaan sampah menjadi bank sampah, pelatihan komunikasi yang baik serta pelatihan kewirausahaan, dan sosialisai up-scaling sampah menjadi produk yang berdaya guna dan bernilai ekonomis.

Jumlah partisipan dalam penelitian ini berjumlah 33 orang. 21 orang merupakan pemuda yang bergabung dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah Cinangka dan 12 orang adalah para ibu dari PKK yang memberikan dukungan penuh terhadap terwujudnya kegiatan pengolahan sampah di RW 08, Kelurahan Cinangka, Depok, Jawa Barat. Data diambil secara kualitatif dengan mempergunakan wawancara mendalam, diskusi kelompok, observasi dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran kelompok pemuda dalam FBO dalam pengembangan lingkungan di komunitas dan peran masyarakat (orang tua) dalam mendukung pemuda untuk peduli terhadap lingkungan. Ketika potensi pemuda dan FBO melebur, tentu hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana pemuda yang tergabung dalam Pemuda Muhammadiyah Ranting Cinangka, Depok, Jawa Barat. Dengan adanya permasalahan lingkungan, terutama sampah yang belum terkelola dengan baik di lingkungannya, pemuda yang tergabung dalam salah satu bentuk FBO tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusinya. Untuk itu, ada beberapa tema besar yang akan diangkat dalam proses pemberdayaan yang dikemas dalam action research ini. Tema yang dimaksudkan adalah pemberdayaan pemuda dalam FBO dan pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah di komunitas.

Terkait dengan pemberdayaan pemuda, Lerner et al. (2005) mengulas tentang model yang mengedepankan 5 faktor dalam konsep positive youth development (pengembangan pemuda yang positif). Faktor tersebut terdiri dari kompetensi, kepercayaan diri, koneksi, karakter dan kepedulian. Namun pembahasannya masih bersifat teoritis. Sedangkan artikel ini membahas aplikasi pengembangan kelima faktor tersebut pada pemuda, sehingga keberadaan pemuda dapat dirasakan kebermanfaatannya pada masyarakat yang lebih luas. Setidaknya di lingkungan di mana mereka tinggal. Dalam kaitannya dengan kajian ini, Pemuda Muhammadiyah Ranting Cinangka difasilitasi untuk dapat berkontribusi secara positif di lingkungannya.

Hasil Identifikasi Potensi Dan Masalah Komunitas (Tahap *Look*): Permasalahan

Lingkungan dan Potensi Pemuda Muhammadiyah Cinangka

Para pemuda yang tergabung dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah Cinangka melakukan identifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang ada di wilayah mereka. Potensi dan permasalahan tersebut tidak hanya terkait dengan diri mereka dan organisasi yang mereka geluti di komunitas saja, tetapi juga potensi dan permasalahan yang ada di lingkungan mereka.

Permasalahan Sampah Rumah Tangga yang Belum Terkelola

Permasalahan sampah menjadi prioritas utama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat karena beberapa alasan. Pertama, komunitas Cinangka telah mendapatkan bantuan pemerintah berupa sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah rumah tangga dengan alokasi biaya cukup besar. Namun, modal tersebut belum dapat dioptimalkan dengan baik karena tidak diiringi dengan pengembangan kesadaran, pengetahuan bagi komunitas untuk melakukan pengelolaan sampah rumah tangga. Kedua, adanya potensi sampah yang dikelola dengan baik akan memberikan keuntungan yang besar baik secara sosial maupun ekonomi.

Permasalahan sampah rumah tangga di komunitas ini terus meluas bersamaan dengan karakteristik wilayah Cinangka sebagai daerah sub-urban sehingga pembangunan perumahan sangat berkembang. Pembangunan tersebut memberikan dampak pada semakin meningkatnya jumlah penduduk pendatang, terbatasnya ketersediaan lahan untuk mengelola sampah di level rumah tangga, dan juga semakin meningkatnya jumlah sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya. Salah seorang Informan (Tp) mengatakan bahwa warga di wilayahnya memang belum terbiasa untuk mempergunakan sistem pengelolaan sampah.

Sampah-sampah rumah tangga dibuang di sebuah lahan yang memang masih banyak tersedia di lokasi kegiatan (Januari, 2014). Padahal, informan tersebut menambahkan bahwa komunitas di lingkungannya sudah mendapatkan fasilitas untuk pengelolaan sampah. Namun fasilitas tersebut belum dipergunakan semestinya.

Bahkan pemuda lain yang menjadi informan dalam diskusi kelompok juga ada yang mengatakan bahwa tempat pengelolaan sampah (gambar 1) di Kelurahan mereka akan dipergunakan sebagai sarana olah raga. Sehingga pada akhirnya permasalahan kebersihan lingkungan menjadi pembahasan utama dalam diskusi kelompok dengan Pemuda Muhammadiyah Ranting Cinangka.

Apa yang dikemukakan oleh informan juga terlihat dari hasil observasi. Di lokasi penelitian masih ditemukan kebiasaan dari komunitas, yaitu kebiasaan untuk membuang atau menimbun sampah di pekarangan rumah, serta kebiasaan membakar sampah di tengah pemukiman. Menanggapi permasalahan tersebut, 21 pemuda yang mengadakan diskusi kelompok mengungkapkan permasalahan dan kebutuhan yang menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Salah satu dari mereka mengatakan:

“Kita coba bareng-bareng. Kita manage dari kita sebar ke lainnya... Kalau ada nilai ekonomisnya, alhamdulillah... Kalau kita buat mainannya juga bisa kan? Saya belum tahu jenis limbahnya.. Apa kita kasih tempatnya.. Apa kita terima bersih?” (S, Januari, 2014).

Apa yang dikemukakan oleh informan tersebut disepakati oleh peserta diskusi kelompok lainnya. Di antara mereka mengatakan:

“sekilas tentang sampah ngadain di SD namanya ban sampah. Ada 12 ada plastik, dijual ada penadahnya. Di lingkungan kita buat bank sampah, RT 1 dulu, lalu diperluas.. Kita buat plastik ke rumah-rumah... “ (K, Januari, 2014).

Hal tersebut menunjukkan bahwa para pemuda yang tergabung dalam diskusi kelompok memiliki kesadaran akan adanya permasalahan lingkungan di komunitas mereka. Mereka pun memiliki gagasan mengenai apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Potensi Kelompok Pemuda dan Komunitas Cinangka dalam Proses Transisi

Berdasarkan keterangan informan, ada berbagai potensi di komunitas Cinangka. Salah satunya adalah Pemuda Muhammadiyah Ranting Cinangka. Salah seorang informan, Tp (Januari 2014) mengatakan Pemuda lebih solid dari pada NA (Nasyiyatul ‘Aisyiah). Hal ini juga didukung oleh informan lain bahwa Pemuda memiliki berbagai kegiatan yang membuat mereka solid. Selain pengajian, mereka juga masih bermain sepak bola untuk mengisi waktu luang. (Cs (Januari 2014); Ks (Januari 2014)).

Pemuda Muhammadiyah Ranting Cinangka adalah organisasi kepemudaan yang terletak di wilayah Kelurahan Cinangka, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Organisasi kepemudaan ini dikategorikan sebagai *Faith Based Organization* karena bekerja di bawah dukungan organisasi keagamaan yakni Muhammadiyah. *Faith Based Organization* (FBO) merupakan salah satu bentuk organisasi pelayanan. Gibelman (2003) mengatakan FBO memiliki kekhasannya sendiri dibandingkan dengan bentuk organisasi pelayanan yang lain karena bekerja di bawah naungan atau dukungan keuangan dari organisasi keagamaan atau yang berorientasi untuk melayani kelompok agama tertentu. Meskipun

penjelasan tersebut memasukkan FBO pada lingkup yang lebih sempit yaitu pada persoalan relasi religius. Wuthnow (2004), mengutip pernyataan Bush yang mengatakan bahwa kelompok atau kegiatan yang bersifat sukarela berbasisan religi dapat mengisi kekosongan pada sistem kesejahteraan. Terutama pada saat krisis dimana masyarakat tidak bisa memenuhi peraturan birokrasi dan lebih membutuhkan pertolongan lingkungan di sekitarnya. Pernyataan Bush tersebut menyiratkan bahwa kontribusi yang dapat diberikan oleh kelompok keagamaan sebagaimana yang dilakukan oleh FBO perlu dimaksimalkan untuk perbaikan kualitas hidup komunitas di sekitar.

FBO memiliki kontribusi besar dalam sistem kesejahteraan karena beberapa alasan. Pertama, religi yang menjadi nilai dasar organisasi dapat dipergunakan dalam proses perubahan terencana. Manfaatnya tidak hanya berguna bagi penerima layanan saja, tetapi juga bagi pemberi layanan (Adi, 2013; Canda & Furman, 1999; Wuthnow, 2004). Itulah mengapa komitmen personil organisasi pada FBO menjadi keunikan FBO yang patut diperhitungkan (Graddy & Ye, 2006).

Kegiatan yang dilakukan oleh para Pemuda yang tergabung di dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah Ranting Cinangka salah satunya adalah kegiatan pengajian yang dilakukan setiap pekan. Pengajian ini membahas materi yang beragam dan tidak hanya terbatas pada kajian hubungan antara manusia dengan Allah SWT., tetapi juga mengkaji hubungan antara manusia dengan manusia dan juga lingkungannya. Isu mengenai kondisi lingkungan di wilayah Cinangka, yakni adanya sampah rumah tangga yang belum terkelola dengan baik, juga telah lama menjadi perhatian para Pemuda Muhammadiyah Cinangka, sekitar dua tahun sebelum kegiatan penelitian ini dilaksanakan.

Terlepas dari permasalahan yang muncul karena sampah rumah tangga yang belum terkelola dengan baik, RW 08 di Kelurahan Cinangka memiliki berbagai potensi. Potensi yang dapat dilihat antara lain adanya lahan-lahan kosong yang luas dan tidak terpakai.

Pemuda sebagai salah satu potensi juga dapat berperan lebih banyak di masyarakat dan menjadi motor penggerak dalam merubah kondisi masyarakat.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan kebutuhan pada tahap *look*, penelitian aksi yang dilakukan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan November 2014 ini pun bertujuan untuk mengembangkan kegiatan pemuda yang aktif bergerak di Pemuda Muhammadiyah Ranting Cinangka dan memfasilitasi mereka untuk mengubah kondisi lingkungannya dengan mengelola sampah rumah tangga, sehingga kegiatan tersebut tidak hanya memberikan dampak yang menguntungkan secara sosial, tetapi juga secara ekonomi.

Kemudian hasil wawancara mendalam dan diskusi kelompok yang dilakukan bersama Pemuda juga menunjukkan bahwa Pemuda Muhammadiyah Ranting Cinangka memiliki kesadaran atas berbagai potensi yang ada di wilayah tempat tinggalnya. Potensi yang mereka sampaikan antara lain ketersediaan lahan kosong yang luas, waktu luang yang dimiliki oleh pemuda, kegiatan PAUD yang dapat merangkul potensi masyarakat seperti ibu-ibu, anak-anak dan pemuda di lingkungan sekitar, dan lain-lain.

Selain adanya potensi di komunitas Cinangka, pemuda Muhammadiyah Cinangka juga memahami adanya permasalahan yang ada di komunitas. Permasalahan yang dimaksudkan adalah bantuan pemerintah untuk melakukan composting sampah tidak terpakai dan terbengkalai, peralatan lainnya untuk

pengelolaan sampah seperti tempat sampah yang membedakan sampah organik dan non organik atau gerobak pengangkut sampah rumah tangga juga tidak terpakai, sampah di lingkungan yang dihasilkan oleh rumah tangga juga tidak terkelola dengan baik, profesi petani di sekitar lingkungan yang belum dikembangkan secara optimal, kesulitan warga yang membutuhkan dana pinjaman usaha, belum terdapat taman bacaan bagi warga, dan organisasi kepemudaan yang belum optimal.

Dari berbagai permasalahan yang diidentifikasi oleh pemuda, permasalahan sampah yang dihasilkan oleh setiap rumah tangga di Komunitas menjadi permasalahan yang diprioritaskan untuk ditangani terlebih dahulu. Sedangkan permasalahan lainnya dilihat komunitas sasaran belum mendesak seperti halnya sampah. Permasalahan yang terkait dengan taman bacaan dipandang telah dapat dipenuhi oleh kegiatan PAUD. Sedangkan permasalahan pertanian dan koperasi simpan pinjam juga dipandang dapat dilaksanakan apabila masalah sampah dapat terkelola dengan baik.

Selain pemuda yang solid dan berkomitmen untuk melakukan kegiatan yang positif dilingkungannya, para ibu-ibu yang tergabung di dalam PKK juga memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan para ibu tersebut dapat dilihat dari kegiatan mereka dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah menjangkau anak-anak disekitarnya, kegiatan POSYANDU, dan kegiatan POSBINDU.

Perencanaan Program (Tahap *Think*): Pemetaan Program Pemberdayaan Pemuda yang Terintegrasi dengan Skema Kegiatan Kelompok Ibu)

Dari hasil pemetaan masalah dan potensi yang ada di komunitas, kelompok pemuda

Muhammadiyah Cinangka menyadari bahwa permasalahan yang ada di wilayah komunitas mereka perlu diperbaiki melalui kegiatan yang nyata. Namun keberadaan mereka sebagai bagian dari komunitas juga memerlukan dukungan yang riil dari elemen masyarakat yang lain seperti para orang tua. Tanpa ada keterlibatan orang tua, keberadaan pemuda juga menjadi kurang bermakna. Salah seorang pemuda pada saat diskusi kelompok juga mengungkapkan bahwa kegiatan pemuda perlu mendapatkan izin dari orang tua (Tp, Januari 2014) Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh (Catalano, 2004), peran orang tua sangat penting dalam mengoptimalkan potensi pemuda. Dukungan orang tua, terutama para ibu yang memegang peran kunci di rumah tangga sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, proses perubahan terencana yang bersifat sistemik dapat dilakukan.

Proses pelibatan orang tua di dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat. Berdasarkan diskusi kelompok dengan tokoh masyarakat, kegiatan pemuda dalam penelitian aksi ini perlu melibatkan kaum ibu yang juga memiliki potensi dalam proses pemberdayaan masyarakat. Salah seorang informan yang ikut dalam diskusi kelompok dengan tokoh masyarakat juga mengungkapkan bahwa keberadaan kelompok ibu sebagai bagian dari komunitas yang telah memperlihatkan kontribusi positifnya di komunitas juga perlu dihargai (R, Juni, 2014). Machdum et.al (2015) pun telah mendeskripsikan partisipasi ibu dalam pengelolaan sampah di komunitas juga sangat diperlukan mengingat peran penting mereka di rumah tangga. Dalam alur proses pengolahan sampah rumah tangga, kelompok ibu-lah yang pertama kali berperan memisahkan sampah organik dan non organik dari dalam rumah tangganya masing-masing.

Perencanaan program yang dikembangkan mensinergikan potensi dari kelompok pemuda dan kelompok ibu yang ada di komunitas untuk mencapai satu tujuan kegiatan, yaitu terkelolanya sampah rumah tangga di komunitas. Dengan mempertimbangkan perbedaan usia dan karakteristik kedua kelompok tersebut juga perlu dibangunnya persepsi positif untuk meningkatkan relasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan pemasaran sosial yang dapat merekatkan potensi ibu dan pemuda (Machdum et.al, 2014)

Pengembangan Program Pemasaran Sosial dan Kewirausahaan dalam Meningkatkan Peran Kelompok Pemuda (Tahap Act)

Berdasarkan proses wawancara, diskusi kelompok dan observasi yang dilakukan dalam tahap *look*, ada kegiatan utama yang menjadi kebutuhan dalam proses intervensi kelompok pemuda. Kegiatan tersebut adalah pengembangan keterampilan sosial dan kewirausahaan. Hasil akhir dari penelitian aksi ini memperlihatkan *output* yang positif, yaitu perubahan pengetahuan dan perilaku pada pemuda. Tidak hanya itu, kaum ibu yang dilibatkan dalam penelitian aksi ini juga memperlihatkan perubahan perilaku. Mereka tidak hanya memilah sampah rumah tangga saja, tetapi juga melakukan *up cycling* terhadap sampah rumah tangga.

Pengembangan Keterampilan sosial

Sebelum mengarah pada kegiatan utama, pengolahan sampah, upaya mensinergikan potensi kelompok pemuda dan kelompok ibu di komunitas membutuhkan perekat yang bisa menjadikan dua potensi besar tersebut mampu memaksimalkan perannya guna mencapai tujuan yang bersifat jangka panjang. Materi yang dimaksudkan adalah keterampilan sosial dan kewirausahaan (Machdum et.al, 2014, 2015a, 2015b).

Keterampilan sosial sebagai salah satu perekat dua potensi komunitas sangat dibutuhkan karena terdiri dari berbagai materi dasar yang dinilai bisa meminimalisir berbagai permasalahan yang terjadi pada saat berinteraksi satu sama lain. Beberapa materi yang dibutuhkan antara lain sikap asertif dan komunikasi. Kirst-Ashman & Hull (2006) menjelaskan bahwa dua keterampilan dasar tersebut sangat penting dalam proses menjalin relasi antar individu yang dapat terjadi dalam level apapun, baik di level mikro, mezo maupun makro.

Keterampilan sosial juga penting menjadi perekat setiap individu yang ada di dalam kelompok pemuda Muhammadiyah Cinangka, terutama dalam proses pengembangan kerja tim (*work team*). Bentuk proses komunikasi yang ingin dikembangkan tentu saja berupa *work team* dan bukan *work group* (Robbins, 2011; Machdum et.al, 2015a). Namun untuk mencapai kerjasama antar individu dalam bentuk *work team* tentu diperlukan pemimpin kelompok yang pandai dalam menggunakan keterampilan berkomunikasi. Seperti yang dikatakan Robbins (2010), riset telah menunjukkan bahwa terdapat beberapa karakteristik pada tim yang efektif. Delapan karakteristik dari tim yang efektif adalah tujuan yang jelas, keterampilan yang relevan, adanya komitmen, komunikasi yang baik, keterampilan bernegosiasi, kepemimpinan yang baik, dan dukungan eksternal serta internal.

Selain keterampilan sosial yang terkait dengan *micro skill*, pemuda juga membutuhkan materi yang terkait dengan materi dasar untuk memahami kewirausahaan. Materi kewirausahaan juga penting karena tujuan jangka panjang dari penelitian aksi ini juga terkait dengan kebermanfaatan pengelolaan sampah untuk kegiatan ekonomi. Sedangkan menjadi proses menjadi seorang wirausaha juga tidak sederhana (Machdum et.al, 2015b)

Keterampilan sosial yang dikembangkan dalam skema pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan ini juga diperlukan untuk memperkuat sinergitas berbagai elemen di dalam komunitas dalam berjejaring.

Jejaring dari lingkungan tidak hanya membuat pemberdayaan menjadi lebih kuat karena ada penopang keberlangsungan program seperti fasilitas yang bersifat tangible berupa peralatan pengolahan sampah yang bisa didapatkan dari pemerintah. Aspek intangible juga sangat diperlukan dalam proses penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Para pelatih yang datang dari wilayah yang dekat dengan komunitas sasaran memiliki pengalaman yang dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran bagi komunitas sasaran. Proses berbagai pengalaman, para pelatih tersebut dapat dijadikan *role model* sehingga visi mengenai peningkatan nilai sampah secara ekonomis dapat lebih terlihat oleh komunitas sasaran.

Pengembangan Keterampilan Kewirausahaan

Keterampilan kewirausahaan dikembangkan untuk memampukan kelompok sasaran dalam meningkatkan kembali daya guna sampah yang dihasilkannya. Peningkatan nilai sampah pun dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mendirikan bank sampah. Oleh karenanya, materi mengenai manajemen dan pengembangan bank sampah menjadi suatu hal yang penting dalam proses pemberdayaan pemuda dalam pengelolaan sampah di komunitasnya.

Pengembangan bank sampah sebagai salah satu materi pokok dalam pengelolaan sampah di lingkungan dapat merujuk pada potensi yang ada di lingkungan komunitas sasaran. Narasumber yang menjadi fasilitator akan jauh lebih efektif bila direkomendasikan dari

komunitas sasaran sendiri dan juga narasumber yang terkait dengan sistem komunitas. Narasumber yang direkomendasikan dari komunitas sasaran sangat membantu dalam proses engagement karena proses peningkatan rasa percaya (*trust*) dari komunitas sasaran menjadi terjalin. Sedangkan narasumber dari sistem komunitas sangat membantu dalam mengembangkan jejaring yang sangat dibutuhkan dalam memperkuat proses pengembangan masyarakat. Melalui kedua fasilitator tersebut, komunitas mendapatkan berbagai kebermanfaatannya antara lain terbangunnya struktur organisasi bank sampah, mengetahui apa saja yang bisa dikembangkan dari sampah yang beragam, mengetahui apa saja yang diperlukan untuk mengelola bank sampah dan jejaring yang bisa diakses di wilayahnya untuk mengembangkan bank sampah (Machdum et.al, 2015b).

Jejaring yang diperoleh dari potensi yang ada di lingkungan komunitas juga memperkuat proses pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang telah terjadi dalam proses penelitian aksi ini, komunitas sasaran dapat memperoleh narasumber lain dari komunitas terdekat yang telah sukses dalam mengembangkan bank sampah dan daur ulang sampah (Machdum et.al, 2015b).

Perubahan Pengetahuan dan Perilaku Komunitas Sasaran

Proses pengembangan masyarakat yang berangkat dari proses identifikasi masalah sampai dengan implementasi kegiatan bertujuan untuk memberikan perubahan. Kegiatan yang dilakukan di RW 08, Kelurahan Cinangka, Depok, Jawa Barat ini memiliki beberapa sasaran, antara lain terjadinya perubahan pengetahuan dan perilaku dari komunitas sasaran. Perubahan pengetahuan dan perilaku komunitas ini dievaluasi melalui beberapa metode.

Salah satu hal mendasar yang ingin diperoleh dari komunitas adalah keterampilan komunikasi yang baik. Melalui keterampilan komunikasi yang baik, proses pengembangan masyarakat diharapkan dapat berkelanjutan. Dari 13 orang partisipan yang mengikuti pelatihan keterampilan sosial, 6 orang diantaranya mengatakan bahwa mereka tidak memiliki keterampilan berkomunikasi dengan individu, kelompok, maupun komunitas yang lebih luas. Setelah mengikuti pelatihan, 12 partisipan dari 13 orang partisipan mengatakan bahwa mereka mengetahui hal-hal mendasar yang perlu dilakukan dalam melakukan komunikasi.

Pelatihan yang ditujukan kepada para pemuda sebagai komunitas sasaran yang utama menunjukkan adanya perubahan. Namun perubahan yang diharapkan melalui kegiatan pemasaran sosial tidak hanya terhenti pada pengetahuan, tetapi juga perilakunya. Hal ini dapat dilihat pada hasil pre test dan post test berikut ini:



Grafik 1. Kebiasaan Mengelola Sampah
 Sumber: Dokumen Penelitian CEGS (2014)

Hasil observasi juga memperlihatkan adanya perubahan perilaku dari komunitas sasaran. Tidak hanya pemuda, kelompok ibu juga terlihat mau berkerja sama untuk memilah sampah rumah tangga.

Kemudian melalui kegiatan penelitian yang dilakukan dari sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan November 2014, keterampilan sosial yang ditujukan sebagai alat perekat antar individu dan kelompok diupayakan untuk bisa memiliki dampak yang aplikatif pada pemuda dalam mengorganisir dirinya. Berdasarkan hasil observasi, para pemuda kerap tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang yang lebih tua. Keterampilan berkomunikasi dan keterampilan sosial lainnya pun menjadi kebutuhan dasar bagi kelompok pemuda sebagai untuk memperteguh 5 faktor dalam konsep positive youth development (pengembangan pemuda yang positif), yang terdiri dari kompetensi, kepercayaan diri, koneksi, karakter dan kepedulian (Lerner, 2005).

Hasil nyata dari penelitian aksi ini adalah memaksimalkan potensi kelompok pemuda sebagai pelaku penggerak perubahan di masyarakat melalui bank sampah. Berbeda dengan keadaan sebelum intervensi dilaksanakan, para pemuda cenderung tidak mendapatkan peran aktif dalam masyarakat. Kini para pemuda tersebut memiliki peran yang penting dalam upaya pemecahan masalah pengolahan sampah yang sempat membuat warga RW 08 menjadi resah. Peran kelompok pemuda ini memperlihatkan kemampuannya dengan adanya dukungan dari kelompok ibu-ibu sebagai pendukung komunitas sasaran melalui upaya daur ulang sampah yang dikelola oleh kelompok pemuda. Dimana produk daur ulang tersebut dapat menjadi hasil produk kreatif yang bernilai ekonomis (Machdum et.al, 2014).

Dalam monitoring pertama yang dilakukan, para pemuda antusias untuk mencoba dan melakukan simulasi pengelolaan bank sampah. Simulasinya terdiri dari beberapa tahapan, antara lain melakukan penyetoran sampah sampai dengan pencatatannya. Selain itu, setiap partisipan (pemuda) juga mencoba bagaimana cara menggunakan dari masing-masing jenis timbangan yang ada. Pada saat dilaksanakannya monitoring implementasi Bank Sampah RW 08 yang ke dua, para pemuda terlihat bersemangat dalam melaporkan kegiatan bank sampah yang telah berjalan. Ada peningkatan rasa kepercayaan diri. Pada awalnya tidak muncul namun kemudian mereka terlihat lebih antusias dalam mengelola bank sampah. Pada pelatihan pertama mengenai pengelolaan sampah dan pengenalan bank sampah, para pemuda bersikap pesimis dalam menanggapi partisipasi masyarakat RW 08 terhadap kehadiran bank sampah. Pada saat pelatihan tersebut, para pemuda juga masih merasa khawatir apabila mereka gagal dalam mengelola bank sampah dan bank sampah tidak seperti yang diharapkan. Namun pada saat penelitian aksi ini berakhir, partisipan sebagai para pengurus bank sampah menjadi lebih percaya diri. Kepercayaan diri mereka juga terlihat pada saat mengenalkan Bank Sampah ke masyarakat sekitar. Skema penyimpanan saldo tabungan sampah telah disosialisasikan.

Rasa kepemilikan terhadap program ini juga terlihat dari kemauan partisipan sebagai pengurus bank sampah untuk mencari nama dan membuat logo bagi bank sampah. Dimana log tersebut disampaikan oleh peneliti ditujukan untuk membuat kaos sebagai seragam saat bertugas. Pada akhirnya mereka memutuskan nama Komunitas Peduli Nilai Sampah (KPNS) sebagai nama bank sampahnya. Rasa kepemilikan ini merupakan salah satu pendukung bagi terciptanya perubahan perilaku

dan kesadaran terhadap pentingnya pengolahan sampah yang berkelanjutan (Machdum et.al, 2014).

Keterampilan dasar kewirausahaan juga memberikan perubahan pada komunitas sasaran pemuda. Dalam prosesnya, dampak kasat mata secara ekonomi belum terlihat secara materiil, karena proses kegiatan pengembangan masyarakat ini baru dimulai. Terlepas hasil pre test dan post test yang dilakukan dalam pemberian pelatihan, pemberian wawasan mengenai kewirausahaan untuk pemuda merupakan suatu hal yang penting karena kegiatan kewirausahaan yang ingin diusahakan dalam jangka panjang bukan suatu hal yang sederhana. Sebagai pondasi, pelatihan kewirausahaan menjadi suatu kebutuhan untuk dilakukan tergantung pada kebutuhan komunitas sasaran.

Namun di luar dampak yang diharapkan terjadi pada pemuda sebagai sasaran, rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan juga telah membawa dampak yang positif terhadap perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dapat membawa perubahan pada kualitas lingkungan hidup. Keberadaan kelompok pemuda yang kini menjadi aktif sebagai agen perubahan juga membawa dampak bagi pengembangan kemampuan sosial pemuda dalam berorganisasi, berelasi, dan sebagai warga lingkungan yang aktif. Peningkatan ketrampilan para ibu dalam membuat produk daur ulang sampah dalam jangka panjang diharapkan dapat juga meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pendapatan dari hasil penjualan barang-barang yang diproduksi oleh para ibu-ibu PKK (Machdum et.al, 2014).

KESIMPULAN

Permasalahan lingkungan di lokasi penelitian terlihat sederhana, namun akan

berdampak negatif jika tidak ditangani sedini mungkin. Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan berencana dengan melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk perencanaan kegiatan pengelolaan lingkungan yang mengena kebutuhan dan permasalahan masyarakat yang sebenarnya. Penelitian aksi dalam proses intervensi sosial dapat menjadi alternatif dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan para praktiksi kesejahteraan sosial dan pekerja sosial dalam mengembangkan sebuah program pelayanan.

Pemuda memiliki potensi yang besar dalam proses pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan pengajian yang telah menjadi kegiatan rutin dari kelompok Pemuda Muhammadiyah Ranting Cinangka dapat dijadikan sebagai titik masuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun, kegiatan organisasi pemuda tersebut diperlukan intervensi yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan yang kebermanfaatannya lebih luas pada komunitas sasaran.

Sinergi Pemuda, Para Ibu dan Jejaring Komunitas sebagai tahap *act* memperlihatkan bahwa pengembangan potensi kelompok pemuda dalam kegiatan pengembangan masyarakat nyatanya membutuhkan dukungan elemen lain di komunitas sasaran karena meskipun kelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi ini memiliki karakteristik FBO serta potensi besar, keberadaan mereka dalam proses pemberdayaan masyarakat tetap membutuhkan penguatan peran kelompok lain seperti kelompok ibu dan juga tokoh-tokoh masyarakat lain di komunitas.

Penguatan potensi yang ada dalam rangka merengkuh potensi yang lebih luas sangat penting untuk pengembangan kegiatan sosial yang berkelanjutan karena mempertimbangkan kapasitas elemen masyarakat sebagai agen perubah utama Artinya, program pemberdayaan

masyarakat pun bisa terjamin keberlanjutannya karena elemen-elemen dasar di komunitas dapat berperan sebagai pondasi program yang kuat.

SARAN

Keterampilan Sosial sangat penting dalam intervensi kelompok pemuda sebagai perekat hubungan antar individu dan kelompok. Apalagi pemuda dengan kekhasannya tersendiri membutuhkan pendampingan yang bisa memberikan mereka keleluasan untuk bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Untuk itu, dukungan berbagai pihak, terutama orang tua sangat dibutuhkan. Sinergi antara kelompok pemuda dan elemen lainnya di masyarakat perlu di dukung berbagai “keterampilan mikro” yang kerap luput dalam proses intervensi kelompok pemuda. Untuk penelitian yang akan datang, pengembangan intervensi sosial yang mengembangkan keterampilan sosial bagi penerima layanan sangat dibutuhkan untuk pengayaan ilmu kesejahteraan sosial.

Keterampilan dasar kewirausahaan merupakan pondasi dasar menuju perubahan yang lebih besar karena kewirausahaan pada dasarnya merupakan pekerjaan besar. Pelaksanaannya perlu disertai dengan komitmen untuk melibatkan berbagai macam pihak dan tidak hanya elemen komunitas sasaran saja. Lebih jauh dari itu, pengembangan masyarakat yang dilaksanakan juga perlu melibatkan elemen sistem sosial yang lebih luas seperti sektor privat, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. Oleh karenanya, pekerjaan besar tersebut perlu diiringi dengan langkah sederhana dengan menyampaikan hal-hal dasar yang selama ini luput dari pelatihan kewirausahaan yang instan, bahwa konsep dasar dari kewirausahaan pada hakikatnya merupakan jalan panjang yang berliku, butuh konsistensi dan kerja keras.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini ditulis berdasarkan kegiatan Pengabdian Masyarakat berjudul “Pengembangan Keterampilan Sosial dan Ekonomi Mikro Pemuda melalui Pemasaran Sosial” dari program *Community Engagement Grants* yang dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengembangan Masyarakat Universitas Indonesia (CEGs DRPM UI) Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Divisi Pengabdian Masyarakat, Pusat Kesejahteraan Sosial, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UI di salah satu wilayah binaannya. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan data penelitian aksi ini, antara lain *Community Engagement* Direktorat Riset dan Pengembangan Masyarakat Universitas Indonesia (CEGs DRPM UI), Ibu Dra. Djoemeliarasanti, M.A. sebagai Ketua Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Pengurus dan para pelatih dari Ibu Ratu (Ikatan Ibu Pitara RT Satu), Ibu Decy Widhiyanti (Pimpinan Lembaga Kursus Ketrampilan “FEBRIN Karya Pratama”), Bapak H. Daud Maulana (Koordinator Bank Sampah Sawangan, Depok, Jawa Barat), Bapak Sofyan Cholid, S.Sos., M.Si., Bapak Cece Sutisna, para tokoh masyarakat di Kelurahan Cinangka dan pemuda yang telah berpartisipasi, serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Depok: Rajawali Pers.
- Canda, E. R., & Furman, L. D. (1999). *Spiritual Diversity in Sosial Work Practice: The Heart of Helping*. New York: The Free Press.
- Catalano, R. F., Berglund, M. L., Ryan, J. A., Lonczak, H. S., & Hawkins, J. D. (2004). Positive youth development in the United States: Research findings on evaluations of positive youth development programs. *The Annals of the American Academy of Political and Sosial Science*, 591(1), 98–124.
- Christens, B., Jones, D. L., & Speer, P. W. (2008). *Power, conflict, and spirituality: A qualitative study of faith-based community organizing* (Vol. 9). Presented at the Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Sosial Research.
- Clemson University, Ann Arbor. Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses Global. (919007537)
- Conrad, A. (1999). Professional tools for religiously and spiritually sensitive sosial work practice. *Human Behavior Theory and Sosial Work Practice*, 63–71.
- Ebaugh, H. R., Pipes, P. F., Chafetz, J. S., & Daniels, M. (2003). Where’s the Religion? Distinguishing Faith-Based from Secular Sosial Service Agencies. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 42(3), 411–426.
- Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2010). Participatory action research. *Journal of Epidemiology and Community Health*. 60, 854–857. doi: 10.1136/jech.2004.028662
- Fatusi, A. O., & Hindin, M. J. (2010). Adolescents and youth in developing countries: Health and development issues in context. *Health and Development of Young People in Lower Income*

- Countries, 33(4), 499–508. <http://doi.org/10.1016/j.adolescence.2010.05.019>
- Ferguson, K. M., Wu, Q., Spruijt-Metz, D., & Dyrness, G. (2007). *Outcomes evaluation* in faith-based sosial services: Are we evaluating faith accurately? *Research on Sosial Work Practice*, 17(2), 264–276.
- Graddy, E. A., & Ye, K. (2006). Faith-based versus secular providers of sosial services—differences in what, how, and where. *Journal of Health and Human Services Administration*, 309–335.
- Gusfahmi. (2009). Rekonstruksi prakrek zakat dan pajak untuk menanggulangi kemiskinan. *Zakat & Empowering*, 39–46.
- Hamilton, M. (2011). *The impact of organizational culture on communities of practice within a faith-based organization* (Ph.D.). Southern Illinois University at Carbondale, Ann Arbor. Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses Global; ProQuest Sociology. (876935413)
- Hepworth, D., Rooney, R., Rooney, G. D., Gottfried, K. S., & Larsen, J. (2006). *Direct Sosial Work Practice*. Singapore: Thomson Brooks/Cole.
- Ife, J. (1997). *Rethinking Sosial Work*. South Melbourne: Longman.
- Kaiser, A. A. (2010). *Bridging sosial capital formation in a faith-based organization* (Ph.D.). Wayne State University, Ann Arbor. Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses Global. (305232864)
- Kirst-Ashman, K., & Hull, G. (2006). *Generalist Practice with Organizations and Communities*. Belmont: Thomson Higher Education.
- Lerner, R. M., Lerner, J. V., Almerigi, J. B., Theokas, C., Phelps, E., Gestsdottir, S., ... Ma, L. (2005). Positive Youth Development, Participation in community youth development programs, and community contributions of fifth-grade adolescents findings from the first wave Of the 4-H study of Positive Youth Development. *The Journal of Early Adolescence*, 25(1), 17–71.
- Machdum, S. V., Harisoesyanti, K. S., Daryanti, S., Agastya, N. L. P., Hati, G., Sutisna, C., & Wardani, L. K. (2015a). Pengembangan keterampilan sosial pemuda: urgensi sikap asertif dan kerja tim. Depok: Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Machdum, S. V., Harisoesyanti, K. S., Daryanti, S., Agastya, N. L. P., Hati, G., Sutisna, C., & Wardani, L. K. (2015b). Pengembangan potensi ekonomi pemuda: daur ulang sampah dan kewirausahaan. Depok: Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- McLeigh, J. D. (2011). *Does faith matter? A comparison of faith-based and secular international nongovernmental organizations engaged in humanitarian assistance* (Ph.D.).
- Mintarti, N., Kurniadi, A. R., & Utomo, P. U. (2009). *Kajian Perumusan Performance Indicator Bagi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat*. *Zakat Dan Empowering*, 19–31.

- Payne, M. (2005). *Modern sosial work theory*. New York: Palgrave Macmillan.
- Robbins. S. P. (2011). *Management.*: 12 edition. Prentice Hall.
- Robbins, S.P. (2010). *Organizational Behavior*. USA: Pearson.
- R. (Juni 2014). Diskusi kelompok
- S.(Januari, 2014). Diskusi kelompok
- Salame, H.. (2014, November). *Measuring Community participation*. Presented at the Asia Engage Conference, Bali.
- Siena, I. (2005). *Analisis Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), Tingkat Pendidikan dan Lama Usaha Mustahiq Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha (Studi Kasus Para Peserta Program Ikhtiar Peramu Periode 1999-2004)*. Universitas Indonesia, Depok. Retrieved from <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/>.
- Stringer, E. T. (2014). *Action Research*. London: Sage.
- Wuthnow, R., Hackett, C., & Hsu, B. Y. (2004). *The Effectiveness and Trustworthiness of Faith-Based and Other Service Organizations: A Study of Recipients' Perceptions*. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 43(1), 1–17.

**PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERSPEKTIF
INDEKS KEPUASAN PUBLIK DI RIAU**

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN PUBLIC SATISFACTION
INDEX PERSPECTIVE IN RIAU**

Meyzi Heriyanto, Adianto dan Hasim As'ari

Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

E-mail: Meyzi2000@yahoo.com

Diterima: 26 September 2016; Dorevisi: 30 Nopember 2016; Disetujui: 14 Desember 2016

Abstrak

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu kebutuhan dan di Indonesia merupakan suatu kewajiban dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana pada pasal 74 menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial merupakan suatu kegiatan yang diwajibkan dan dilaksanakan berdasarkan pada kepatutan dan kewajaran sesuai dengan peraturan pemerintahan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dikenal dengan istilah CSR oleh perusahaan merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama *stakeholders* terkait, terutama masyarakat disekitar perusahaan tersebut berada. Karena peran CSR ternyata saat ini semakin penting bagi masyarakat di sekitar perusahaan dalam upaya menyeimbangkan pembangunan, baik ekonomi, sosial dan lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan secara komprehensif mengenai implementasi dan prioritas program CSR di PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Tapung, Minas dan Rumbai Provinsi Riau. Metode penelitian dilakukan dengan metode campuran (*mixed methods*) yaitu mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket, in-dept interview dan observasi terhadap multistakeholders. Hasil penelitian yang ditemukan implementasi program CSR oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Provinsi Riau masih berjalan dengan kurang baik. Sedangkan prioritas program CSR yang dibutuhkan berdasarkan indeks kepuasan publik di PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Tapung, Minas dan Rumbai Provinsi Riau adalah program yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: pemberdayaan, program *Corporate Social Responsibility*, indeks kepuasan publik.

Abstract

Corporate Social Responsibility program (CSR) is seen as an urgent thing on social development. Its supported by regulation that stated in Act No. 40 year 2007 about Limited Company. In the article number 74 stated that social responsibility is one among activities that should be conducted by the companies. The companies should have committed for surround people quality of life, in terms of social and economic perspective. The sample of this research covers the implementation of the priority programmes and corporate social responsibility (CSR) PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai and PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) at Tapung, Minas and Rumbai Riau Province. Data has been collected by questionnaire, in-depth interview and observation. Results of the study found implementation of programs of corporate social responsibility by PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai and PT Cevron Pacific Indonesia (CPI) in Riau Province is still inadequate. The CSR program of the sample have been emphasized on social-economy empowerment.

Keywords: empowerment, *Corporate Social Responsibility* program, public satisfaction index.

PENDAHULUAN

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah dikenal sejak awal 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. CSR tidak hanya merupakan kegiatan kreatif perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum semata. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dikenal dengan istilah CSR oleh perusahaan merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama *stakeholders* (pemerintah dan masyarakat) terkait, terutama masyarakat disekitar perusahaan tersebut berada. Karena peran CSR ternyata saat ini semakin penting bagi masyarakat di sekitar perusahaan dalam upaya menyeimbangkan pembangunan, baik ekonomi, sosial dan lingkungan.

Program CSR pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu: Pertama, program CSR ke dalam adalah program untuk meningkatkan kinerja karyawan, memperhatikan sumber daya manusia, memberikan fasilitas kepada karyawan dan keluarga karyawan. Kedua, program CSR ke luar yaitu berupa *community development* yang berpola pikir kepada pengembangan masyarakat khususnya masyarakat sekitar perusahaan.

Di Indonesia, program CSR diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial merupakan suatu kegiatan yang diwajibkan dan dilaksanakan berdasarkan pada kepatutan dan kewajiban sesuai dengan peraturan pemerintahan. Fokus utama penjelasan

undang-undang terdapat pada pasal 74 yang menerangkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai upaya perseroan yang biaya pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan keputusan dan kewajiban. Oleh karena itu industri berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup, sehingga dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi ekonomi, sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut (*triple bottom line*) sinergi tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Implementasi otonomi yang dilakukan oleh daerah memberikan peluang kepada daerah untuk mengelola SDA sendiri atau berkolaborasi dengan pihak lain. Fakta ini juga terjadi di Provinsi Riau dalam mengelola sumber daya minyak yang dimiliki, dimana ada perusahaan negara yaitu PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Tapung, Minas dan Rumbai Provinsi Riau. Dalam upaya mengelola dan mengoperasional perusahaan minyaknya, PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Tapung, Minas dan Rumbai Provinsi Riau tentunya beroperasi di sekitar lingkungan masyarakat. Realitas ini menuntut PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Tapung, Minas dan Rumbai Provinsi Riau memberikan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasionalnya. Tanggung jawab sosial yang diberikan oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific

Indonesia (CPI) di Tapung, Minas dan Rumbai Provinsi Riau dituangkan melalui program CSR. Program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Tapung, Minas dan Rumbai Provinsi Riau merupakan bentuk kepedulian dan rasa tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar wilayah

kerjanya yang terkena dampak operasional perusahaan. Dari data yang diperoleh, melalui observasi yang dilakukan bahwa PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Tapung, Minas dan Rumbai Provinsi Riau memiliki program CSR sebagai berikut:

Tabel 1. Program CSR Pada PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) Riau

Program Corporate social responsibility (CSR) PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai	Output Program	Program Corporate social responsibility (CSR) PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) Riau	Output Program
1. Pertamina dan pendidikan	Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa-siswa yang tidak mampu dalam pembiayaan belajarnya dan memberikan bantuan infrastruktur terhadap kebutuhan pendidikan di wilayah operasional perusahaan	1. Bidang pendidikan dan pelatihan	Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan infrastruktur dan fasilitas pendidikan serta beasiswa cerdas bagi masyarakat di wilayah operasionalnya.
2. Pertamina dan kesehatan	Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terhadap upaya peningkatan kesehatan dan pembiayaan pengobatan bagi balita dan ibu hamil.	2. Bidang kesehatan	Program ini bertujuan untuk membantu infrastruktur kesehatan bagi masyarakat dan pembiayaan kesehatan bagi penyakit-penyakit tertentu.
3. Pertamina dan Society	Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang infrastruktur dan peduli bencana alam.	3. Bidang infrastruktur	Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan infrastrukturnya dalam hal fasilitas umum.
4. Pertamina dan Lingkungan	Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan lingkungan hidup dan pelestarian alam.	4. Bidang ekonomi kerakyatan	Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan pelatihan dan modal usaha kepada masyarakat dalam meningkatkan ekonominya.
5. Pertamina program kemitraan dan bina lingkungan	Program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pola kemitraan dan pembinaan.	5. Bidang pengembangan usaha tempatan	Program ini bertujuan untuk membina masyarakat suku pedalaman dalam memberdayakan diri dan ekonominya.

Sumber: PT. Pertamina (Persero) dan PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI), 2016

Tabel 1. ini menjelaskan bahwa PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Tapung, Minas dan Rumbai Provinsi Riau sudah menyusun program CSR dalam upaya untuk menunjukkan kepedulian dan rasa tanggung jawabnya kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasionalnya. Bentuk kepedulian dan rasa tanggung jawab ini merupakan wujud pertanggungjawaban sosialnya kepada masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Program CSR milik PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Tapung, Minas dan Rumbai Provinsi Riau yang menjadi prioritas adalah program pendidikan dan program infrastruktur. Program CSR di bidang pendidikan fokus memberikan bantuan beasiswa kepada siswa berprestasi dan siswa tidak mampu, dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah atau Kepala Sekolah penerima bantuan pendidikan siswa. Selaian beasiswa yang diberikan program CSR bidang pendidikan PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Tapung, Minas dan Rumbai Provinsi Riau juga memberikan bantuan infrastruktur pendidikan kepada setiap sekolah yang membutuhkannya. Kemudian program CSR bidang infrastruktur di PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Tapung, Minas dan Rumbai Provinsi Riau, umumnya pembangunan yang bersifat eksidental dari kebutuhan infratraktur masyarakat. Misalnya bantuan pembangunan gorong-gorong jalan, pembangunan rumah ibadah, pembangunan jembatan, pembangunan jalan dan sebagainya. Dimana terkadang pembangunan infrastruktur yang diberikan melalui program CSR sering tumpang tindih dengan program pembangunan infrastruktur milik Pemerintah Daerah/Kota. Fakta ini disebabkan tidak adanya koordinasi dan sinergitas antara implementor program CSR bidang infrastruktur di PT. Pertamina (Persero)

RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Tapung, Minas dan Rumbai Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah setempat. Akibatnya pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang dilakukan sering berbenturan dan sering terjadi di wilayah yang sama. Apalagi pihak PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Tapung, Minas dan Rumbai Provinsi Riau lebih cenderung memberikan bantuan yang menjadi prioritasnya dalam program CSR bidang pendidikan dan bidang infrastruktur kepada masyarakat yang berada di *ring/cluster* 1 wilayah operasionalnya. Sedangkan wilayah atau *ring/cluster* 2 dan 3 tidak menjadi prioritas dalam implementasi program CSR yang dimilikinya.

Implementasi program CSR yang tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasional PT. Pertamina (Persero) dan PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI), tentunya sangat diharapkan. Oleh karena dari latar belakang dan realitas implementasi yang ditemukan di lapangan, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah prioritas program CSR PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Tapung, Minas dan Rumbai Provinsi Riau di Provinsi Riau yang harus dilaksanakan berdasarkan perspektif indeks kepuasan publik?

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Amanah ini memberikan pemahaman ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritual nya. Kebutuhan material dapat kita

hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup. Mosher (1987) mengatakan hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera.

Beberapa penelitian tentang kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat memiliki ukuran yang berbeda-beda. Seperti Suryadarma, dkk (2005) menetapkan indikator kesejahteraan keluarga CBMS (*Community Based Monitoring System*) atau sistem pemantauan kesejahteraan oleh masyarakat yaitu: kepemilikan aset, kepemilikan binatang ternak, status perkawinan, jenis kelamin kepala keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga dan pasangan, anggota keluarga yang bekerja, sektor pekerjaan, akses terhadap lembaga keuangan, konsumsi makanan dan indikator kesehatan, partisipasi politik dan akses informasi. Hendrik (2011) menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan Danau Pulau Besar dan Danau Bawah dilihat dari: kondisi rumah, sumber penerangan, tingkat pendidikan, aset rumah tangga dan tingkat pendapatan berdasarkan UMR.

Wijayanti dan Ihsannudin (2013) memaparkan kesejahteraan masyarakat nelayan

Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dilihat dari: kondisi perumahan, tingkat pendidikan, sumber nafkah, tingkat pendapatan dan tingkat kemiskinan. Sugiharto, Salmani, Indratno (2013) menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, terlihat dari: pemukiman yang ditempati, sarana dan prasarana penunjang, tingkat pendidikan, peralatan untuk bekerja, akses modal dan tingkat pendapatan. Imron (2012) menerangkan ada beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, diantaranya: adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif, adanya kesehatan keluarga yang lebih baik dan adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan.

Program CSR merupakan salah satu program yang ditujukan untuk memperhatikan kondisi lingkungan sosial masyarakat yang ada di wilayah operasional perusahaan, termasuk memperhatikan masalah kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karenanya program CSR yang disusun oleh perusahaan, biasanya ada yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berada di wilayah operasionalnya. Untuk itu CSR telah menjadi hal yang diperbincangkan dalam berbagai diskusi yang terkait dengan kebijakan publik. CSR adalah sesuatu yang berkaitan dengan governance perusahaan dan prosedur etika bisnis (Wise dan Ali, 2009). Menurut *World Business Council on Sustainable Development* (WBCSD) CSR adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk berperilaku etis (*behavioral ethics*) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*). CSR merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholders*, termasuk didalamnya adalah pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah,

supplier, bahkan competitor. Tentunya tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi tetapi juga dalam hal lingkungan hidup.

Oyama dalam Tauginiene (2010) menyatakan bahwa CSR merupakan kegiatan khusus bagi perusahaan besar dan tidak bagi perusahaan kecil. Dengan pelayanan CSR akan membuat klien perusahaan lebih tertarik, meningkatnya profit, dan membuat perusahaan lebih berbeda dipandang masyarakat. Selanjutnya *Positive Outcome website* mendefinisikan CSR adalah kontribusi perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan bisnis mereka. Hal tersebut berupa investasi sosial dan bagian program bantuan dari kebijakan publik. Definisi lain dari CSR adalah kegiatan yang terdiri dari unilateral dan voluntir, kebijakan lingkungan sosial dengan alternatif instrumen dengan perjanjian kerja sama bukan legislasi atau penawaran tapi *partnership* dengan berbagai pihak (Fanteneau, 2003).

CSR menurut Carrol adalah konsep keterlibatan perusahaan dalam menjaga dan atau meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Atau dengan kata lain CSR adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, baik dalam hal etika, hukum, komersial, maupun public interest, untuk memenuhi bahkan melampaui harapan *stakeholder* terhadap perusahaan bersangkutan. (Djalil, 2003)

Substansi keberadaan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan atau CSR adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan *stakeholder* yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Didalam implementasinya diharapkan agar unsur-unsur perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling

berinteraksi dan mendukung, supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif. Sehingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama. Melakukan program CSR yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar baik kepada perusahaan itu sendiri maupun para *stakeholder* yang terkait. Memang pada saat ini di Indonesia, praktek CSR belum menjadi suatu keharusan yang umum, namun dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi, maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR akan semakin besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa CSR menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi.

Ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan mengimplementasikan CSR, yaitu: (Effendi, 2010) Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan serta perusahaan mendapatkan citra positif dari masyarakat luas. Hal ini maksudnya melalui implementasi CSR perusahaan mendapat penilaian dan nama yang baik dari para masyarakat yang ada di sekitar perusahaan dan masyarakat pada umumnya. Sehingga program CSR yang diimplementasikan telah mampu membangun image baik perusahaan dimata masyarakat. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal). Hal ini maksudnya melalui implementasi CSR perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat di sekitar perusahaan sebagai bentuk modal sosial. Dimana perusahaan dan masyarakat harus terlibat aktif dalam kegiatan CSR yang dapat membentuk modal sosial di lingkungan sekitar perusahaan. Sebab membangun modal sosial seperti *trust*, *value or norms* dan *networks*, perlu dilakukan perusahaan untuk tetap menjaga image baik dimata masyarakat yang

ada di sekitar wilayah operasionalnya. Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. Hal ini maksudnya melalui implementasi CSR, perusahaan dapat mengembangkan SDM yang dimiliki dalam kegiatan sosial masyarakat di sekitar lingkungan operasionalnya. Sehingga SDM yang mengimplementasikan CSR dapat menjalin hubungan silaturahmi yang baik dengan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Hubungan silaturahmi yang dikembangkan akan menjadi formula bagi perusahaan untuk mengatasi konflik-konflik yang timbul antara perusahaan dengan masyarakat. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko. Hal ini maksudnya melalui implementasi CSR perusahaan dapat lebih bisa mengambil keputusan dalam pengelolaan konflik yang timbul di sekitar wilayah operasional perusahaan. Apalagi perusahaan sudah mengembangkan SDM-nya untuk dapat menjalin hubungan silaturahmi yang baik kepada masyarakat. Sehingga setiap konflik yang muncul dapat segera diatasi dengan baik tanpa menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan.

Di dalam implementasinya, menurut Wahyudi dan Azheri (2011) bentuk-bentuk CSR dapat digolongkan ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Pengelolaan lingkungan kerja secara baik
Kategori ini mencakup penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak, serta perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Hal ini merupakan bentuk CSR ke dalam yaitu pengembangan SDM (*human resources development*) perusahaan.
2. Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat (khususnya masyarakat lokal)

Secara umum, kemitraan tersebut diwujudkan dalam program *community development* untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat jangka panjang. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat menerima manfaat keberadaan perusahaan guna menopang kemandiriannya, bahkan ketika perusahaan sudah berhenti beroperasi sekalipun. Hal ini merupakan bentuk CSR ke luar yaitu pengembangan masyarakat (*community development*) dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*)

3. Penanganan kelestarian lingkungan

Kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, kertas, hingga penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan agar tidak mencemari lingkungan sekitar kantor, pabrik dan lahan sekitar. Hal ini merupakan bentuk CSR ke luar yaitu pengelolaan lingkungan masyarakat atau *community services*.

4. Investasi sosial

Kategori ini sering diartikan secara sempit sebagai “kegiatan amal perusahaan”. Sesungguhnya, istilah tersebut merujuk pada tindakan perusahaan yang memberi dukungan finansial dan non-finansial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi lain. Pada akhirnya, kegiatan tersebut akan menunjang bisnis perusahaan karena perusahaan dapat menuai citra positif (*corporate image*). Hal ini merupakan bentuk CSR ke luar yaitu hubungan masyarakat atau *community relation*.

Ada berbagai macam model yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan program CSR ini. Canoll (1999), Saidi (2004) dan Tanuwijaya (2008) membagi program CSR ke dalam empat (4) model, yaitu:

- 1) Keterlibatan langsung, perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.
- 2) Melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan, perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi yang lazim dilakukan di negara maju. Disini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan untuk operasional yayasan.
- 3) Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
- 4) Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati bersama. (Salsiyah, 2010)

Suharto (2010) mendefinisikan CSR sebagai kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungan (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan

berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan professional. Sehingga program aksi CSR menurut Suharto meliputi:

a. CSR Bidang Pendidikan

Sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa, pendidikan tidak bisa diabaikan oleh perusahaan dalam menerapkan CSR. Maka tidak mengherankan apabila pendidikan adalah bidang yang tidak terlewatkan dalam implementasi CSR setiap perusahaan. Misalnya memberikan beasiswa, pengadaan bantuan tenaga pengajar, pengadaan peralatan yang menunjang pendidikan dan lain sebagainya.

b. CSR Bidang Kesehatan

Peningkatan kesehatan suatu penduduk adalah salah satu target *Milenium Development Goals* (MDGs). Dengan demikian, program-program CSR sudah sebaiknya tidak meninggalkan program di bidang kesehatan ini. Program-program CSR bisa dilakukan dengan banyak cara, disesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang semestinya dilakukan di daeran setempat. Misalnya memberikan pengobatan gratis, pemberian bantuan makanan tambahan untuk anak-anak dan balita, serta bantuan peralatan Posyandu dan perbaikan infrastruktur Puskesmas di daerah operasional mereka dan lain sebagainya.

c. CSR Bidang Lingkungan

Tanggungjawab terhadap perlindungan lingkungan sering kali dianggap berada dalam ranah publik. Di masa lalu pemerintah dipandang sebagai aktor utama yang mengadopsi perilaku ramah lingkungan, baik melalui regulasi, saksi dan tidak jarang melalui penawaran insentif. Sementara itu, sektor swasta hanya dilihat sebagai penyebab timbulnya masalah-masalah lingkungan.

d. CSR Bidang Modal Sosial

Bidang sosial dalam konteks CSR

seringkali di lihat sebagai pola bantuan sosial yang dilakukan perusahaan kepada lingkungan sekitar dalam rangka mencapai keharmonisan sosial antara perusahaan dan lingkungannya (masyarakat). Misalnya pembangunan infrastruktur, pembinaan karang taruna, sunatan massal, bantuan sosial pesta adat, bantuan bencana alam dan lain sebagainya.

e. CSR bidang Ekonomi dan Kewirausahaan

Meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi menjadi perhatian serius setiap pemangku kebijakan CSR. Maka program peningkatan pendapatan masyarakat seringkali menjadi program andalan setiap perusahaan dalam mengimplementasikan CSR. Peningkatan pendapatan ekonomi ini bisa diterapkan dengan mengembangkan lembaga keuangan mikro, bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha kecil, pemberdayaan usaha kecil dan menengah dan hingga program pemberdayaan petani.

CSR merupakan suatu konsep yang penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan, yang berbasis kepada pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (*community development and community empowerment*), hubungan kemasyarakatan (*community relation*) yang biasanya berbentuk bantuan (*charity*) dan pelayanan masyarakat (*community services*). Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan timbal balik yang saling sinergis antara perusahaan dengan masyarakat yang berada lingkungan sekitarnya.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif memiliki tahapan penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, yang mana seorang peneliti mulai berfikir secara induktif yaitu menangkap

berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu. Lokasi penelitian dilaksanakan pada PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) operasional Rumbai, Tapung dan Minas di Provinsi Riau. Dipilihnya dua perusahaan ini dikarenakan perusahaan tersebut mewakili perusahaan milik pemerintah yaitu PT. Pertamina (Persero) dan perusahaan milik swasta yaitu PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI), sehingga dengan adanya kajian ini diharapkan ada perbandingan implementasi dan prioritas program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan milik pemerintah dan swasta yang memang benar-benar dapat memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Sumber data dalam penelitian ini akan diambil dari data primer dan sekunder di lapangan. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yakni yang berasal dari informan dengan cara interview dan observasi. Informan kajian ini diambil dari kelompok sasaran program CSR yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) operasional Rumbai, Tapung dan Minas di Provinsi Riau dan informan para pelaksana program CSR yang terlibat langsung ataupun tidak langsung yang berasal dari PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) operasional Rumbai, Tapung dan Minas di Provinsi Riau.

Indeks kepuasan publik terhadap program CSR adalah informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang berada di wilayah operasional perusahaan terhadap program CSR yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif atas pendapat masyarakat dalam menerima program CSR dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Oleh karena ukuran

dari indeks kepuasan publik dalam penelitian ini adalah memuaskan, cukup memuaskan dan kurang memuaskan. Memuaskan apabila program CSR yang dilakukan menyentuh seluruh masyarakat. Cukup memuaskan apabila program CSR hanya menyentuh sebagian kecil masyarakat. Kurang memuaskan apabila program CSR tidak menyentuh masyarakat.

Analisis data akan mempergunakan teknik triangulasi sumber data, pengolahan data kualitatif dilakukan dengan mempergunakan pendekatan 'cross check' informan untuk memberikan pemahaman secara lebih mendalam berbagai pernyataan yang dikemukakan oleh responden, serta berdasarkan hasil observasi dan telaah data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prioritas Program CSR

Indeks kepuasan publik adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan publik yang diperoleh dari pengukuran secara kualitatif

atas pendapat publik terhadap implementasi program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) operasional Rumbai, Tapung dan Minas di Provinsi Riau. Dimana ukuran indeks kepuasan publik dari PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dilihat dari program-program CSR yang diberikan seperti program pertamina dan pendidikan, program pertamina dan society, program pertamina dan kesehatan, program pertamina dan lingkungan serta program pertamina kemitraan dan bina lingkungan. Oleh karena itu, indeks kepuasan publik atas program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dinilai dari program CSR yang diimplementasikan. Dari penyebaran angket dan wawancara yang dilakukan kepada publik terhadap program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai, ditemukan indeks kepuasan publik dan prioritas program yang diinginkan publik dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2. Indeks Kepuasan Publik dan Prioritas Program yang Diinginkan Publik Terhadap program CSR PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai

No.	Wilayah Operasional	Bentuk Program	Indeks Kepuasan Publik	Prioritas Program yang diinginkan Publik
1.	Kelurahan Jaya Mukti	1. Pertamina dan Pendidikan 2. Pertamina and Society 3. Pertamina dan Kesehatan 4. Pertamina dan Lingkungan 5. Pertamina Kemitraan dan Bina Lingkungan	Memuaskan Memuaskan Kurang memuaskan Kurang memuaskan Memuaskan	Prioritas program yang dibutuhkan adalah program pelatihan dan pendaur ulang sampah menjadi produk bermanfaat.
2.	Kelurahan Tanjung Palas	1. Pertamina dan Pendidikan 2. Pertamina and Society 3. Pertamina dan Kesehatan 4. Pertamina dan Lingkungan 5. Pertamina Kemitraan dan Bina Lingkungan	Memuaskan Memuaskan Kurang memuaskan Memuaskan Memuaskan	Prioritas program yang dibutuhkan adalah program pengembangan ekonomi masyarakat.
3.	Kelurahan Buluh Kasap	1. Pertamina dan Pendidikan 2. Pertamina and Society 3. Pertamina dan Kesehatan 4. Pertamina dan Lingkungan 5. Pertamina Kemitraan dan Bina Lingkungan	Memuaskan Kurang memuaskan Kurang memuaskan Kurang memuaskan Kurang memuaskan	Prioritas program yang dibutuhkan adalah bantuan perlengkapan sekolah bagi anak miskin dan bantuan pengembangan usaha kecil.

4.	Kelurahan Teluk Binjai	1. Pertamina dan Pendidikan 2. Pertamina and Society 3. Pertamina dan Kesehatan 4. Pertamina dan Lingkungan 5. Pertamina Kemitraan dan Bina Lingkungan	Memuaskan Kurang memuaskan Kurang memuaskan Kurang memuaskan Kurang memuaskan	Prioritas program yang dibutuhkan adalah bantuan penyediaan air bersih dan pemberdayaan bidang perikanan dan pertanian rumah tangga.
5.	Kelurahan Bukit Datuk	1. Pertamina dan Pendidikan 2. Pertamina and Society 3. Pertamina dan Kesehatan 4. Pertamina dan Lingkungan 5. Pertamina Kemitraan dan Bina Lingkungan	Memuaskan Memuaskan Kurang memuaskan Memuaskan Kurang memuaskan	Prioritas program yang dibutuhkan adalah program composting dan pemberdayaan bidang peternakan dan pertanian.
6.	Kelurahan Bukit Timah	1. Pertamina dan Pendidikan 2. Pertamina and Society 3. Pertamina dan Kesehatan 4. Pertamina dan Lingkungan 5. Pertamina Kemitraan dan Bina Lingkungan	Kurang memuaskan Kurang memuaskan Kurang memuaskan Kurang memuaskan Kurang memuaskan	Prioritas program yang dibutuhkan adalah program lingkungan sehat dengan membangun MCK dan pengembangan ekonomi masyarakat di bidang perikanan.

Sumber: Angket dan wawancara penelitian terhadap publik, 2016

Kemudian ukuran indeks kepuasan publik dari PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) operasional Rumbai, Tapung dan Minas dilihat dari program-program CSR yang diberikan seperti program pendidikan dan pelatihan, program kesehatan, program infrastruktur, program ekonomi kerakyatan dan program pengembangan usaha tempatan. Oleh karena itu, indeks kepuasan publik atas program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Cevron Pacific

Indonesia (CPI) operasional Rumbai, Tapung dan Minas dinilai dari program CSR yang diimplementasikan. Dari hasil angket dan wawancara yang dilakukan kepada publik terhadap program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) operasional Rumbai, Tapung dan Minas, ditemukan indeks kepuasan publik dan prioritas program yang diinginkan publik dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 3. Indeks Kepuasan Publik dan Prioritas Program yang Diinginkan Publik Terhadap program CSR

No.	Wilayah Operasional	Bentuk Program	Indeks Kepuasan Publik	Prioritas Program yang diinginkan Publik
1.	Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak	1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 2. Bidang Kesehatan 3. Bidang Infrastruktur 4. Bidang Ekonomi Kerakyatan 5. Bidang Pengembangan Usaha Tempatan	Cukup memuaskan Kurang memuaskan Memuaskan Cukup memuaskan Kurang memuaskan	Prioritas program yang dibutuhkan adalah bantuan bidang pengembangan ekonomi kerakyatan yang memberikan pelatihan dan modal sosial.
2.	Kepenghuluan Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak	1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 2. Bidang Kesehatan 3. Bidang Infrastruktur 4. Bidang Ekonomi Kerakyatan 5. Bidang Pengembangan Usaha Tempatan	Cukup memuaskan Kurang memuaskan Memuaskan Kurang Memuaskan Kurang memuaskan	Prioritas program yang dibutuhkan adalah bantuan bidang pengembangan ekonomi kerakyatan yang memberikan pelatihan dan modal sosial.

3.	Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 2. Bidang Kesehatan 3. Bidang Infrastruktur 4. Bidang Ekonomi Kerakyatan 5. Bidang Pengembangan Usaha Tempatan	Kurang memuaskan Kurang memuaskan Kurang memuaskan Kurang memuaskan Kurang memuaskan	Prioritas program yang dibutuhkan adalah bantuan penyediaan air bersih.
4.	Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 2. Bidang Kesehatan 3. Bidang Infrastruktur 4. Bidang Ekonomi Kerakyatan 5. Bidang Pengembangan Usaha Tempatan	Memuaskan Kurang memuaskan Kurang memuaskan Kurang memuaskan Kurang memuaskan	Prioritas program yang dibutuhkan adalah pengembangan usaha tempatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
5.	Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 2. Bidang Kesehatan 3. Bidang Infrastruktur 4. Bidang Ekonomi Kerakyatan 5. Bidang Pengembangan Usaha Tempatan	Memuaskan Kurang memuaskan Memuaskan Kurang memuaskan Kurang memuaskan	Prioritas program yang dibutuhkan adalah pengembangan usaha tempatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
6.	Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 2. Bidang Kesehatan 3. Bidang Infrastruktur 4. Bidang Ekonomi Kerakyatan 5. Bidang Pengembangan Usaha Tempatan	Kurang memuaskan Kurang memuaskan Memuaskan Cukup memuaskan Cukup memuaskan	Prioritas program yang dibutuhkan adalah pengembangan usaha tempatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
7.	Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 2. Bidang Kesehatan 3. Bidang Infrastruktur 4. Bidang Ekonomi Kerakyatan 5. Bidang Pengembangan Usaha Tempatan	Kurang memuaskan Kurang memuaskan Kurang Memuaskan Kurang memuaskan Kurang memuaskan	Prioritas program yang dibutuhkan adalah bantuan infrastruktur pendidikan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
8.	Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar	1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 2. Bidang Kesehatan 3. Bidang Infrastruktur 4. Bidang Ekonomi Kerakyatan 5. Bidang Pengembangan Usaha Tempatan	Kurang memuaskan Kurang memuaskan Kurang Memuaskan Kurang memuaskan Kurang memuaskan	Prioritas program yang dibutuhkan adalah bantuan bidang pendidikan dan bidang infrastruktur.

Sumber: Angket dan wawancara penelitian terhadap publik, 2016

B. Faktor yang Menghambat Implementasi Prioritas Program CSR

Bentuk program CSR yang diimplementasikan oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pacific Indonesia

(CPI) khususnya di wilayah Rumbai, Tapung dan Minas di Provinsi Riau, tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh publik sebagai

kelompok sasaran program CSR PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) khususnya di wilayah Rumbai, Tapung dan Minas di Provinsi Riau, ditemukan faktor-faktor yang menghambat prioritas implementasi program CSR, yaitu:

a. Sosialisasi program CSR

Faktor ini merupakan kegiatan penyampain informasi kepada masyarakat lokal tentang program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan. Dimana dalam proses sosialisasi yang dilakukan perusahaan akan menyampaikan bentuk-bentuk program yang dikelolanya seperti pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (*community development and community empowerment*), hubungan kemasyarakatan (*community relation*) yang biasanya berbentuk bantuan (*charity*) dan pelayanan masyarakat (*community services*).

b. SOP pengajuan pengusulan program CSR

Faktor ini merupakan kegiatan penyusunan tata cara atau prosedural pengusulan pengajuan program CSR yang disediakan oleh perusahaan. Dimana SOP yang disusun untuk semua jenis program seperti pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (*community development and community empowerment*), hubungan kemasyarakatan (*community relation*) yang biasanya berbentuk bantuan (*charity*) dan pelayanan masyarakat (*community services*).

c. Budaya dan mind set masyarakat/kelompok sasaran

Faktor ini merupakan nilai dan pola fikir yang ada pada dalam diri masyarakat yang menerima program CSR. Dimana masyarakat menganggap bahwa program CSR yang diberikan merupakan hadiah dari perusahaan kepada masyarakat. Sehingga program yang diimplementasikan tidak termanfaatkan untuk mengembangkan diri.

d. Sinergitas implementasi program CSR

Faktor ini merupakan bentuk koordinasi yang dilakukan pihak perusahaan dengan pemerintah setempat untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan program CSR kepada masyarakat. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi tumpang tindih antara program pemerintah dengan program CSR perusahaan.

e. Anggaran

Faktor ini merupakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan dalam mengimplementasikan program CSR. Sebab setiap tahunnya anggaran program CSR perusahaan akan berubah, sesuai dengan profit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam setiap tahunnya.

Kepuasan publik atas program CSR adalah respon publik terhadap kesesuaian program CSR yang digulirkan kepada publik di setiap wilayah operasional perusahaan yang sudah ditetapkan. Indeks kepuasan publik akan diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada publik terhadap bentuk program CSR yang diberikan perusahaan kepada publik. PT. Pertamina (persero) RU II Dumai adalah BUMN yang melaksanakan program kegiatan berbasis masyarakat tercampur antara program CSR dan program PKBL. Program CSR adalah suatu kebutuhan perusahaan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat lokal yang ada di wilayah operasional perusahaan, dimana program CSR yang dilaksanakan berbentuk pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (*community development and community empowerment*). Sedangkan PKBL adalah kewajiban pemerintah melalui BUMN untuk membangun masyarakat dan membenahi lingkungan hidup, dimana program PKBL berbentuk hubungan kemasyarakatan (*community relation*) yang biasanya berbentuk bantuan (*charity*) dan pelayanan masyarakat

(*community services*). Adapun bentuk program CSR yang diberikan PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai kepada publik di wilayah operasionalnya, yaitu:

1. Program Pertamina dan Pendidikan
2. Program Pertamina and *Society*
3. Program Pertamina dan Kesehatan
4. Program Pertamina dan Lingkungan
5. Program Pertamina Kemitraan dan Bina Lingkungan

Sedangkan PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) adalah swasta penuh dari asing yang bukan BUMN sehingga kebutuhan untuk penerapan program CSR melalui pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (*community development and community empowerment*), hubungan kemasyarakatan (*community relation*) yang biasanya berbentuk bantuan (*charity*) dan pelayanan masyarakat (*community services*) penting untuk dilakukan. Adapun bentuk program CSR yang diberikan PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) operasional Rumbai, Tapung dan Minas kepada publik di wilayah operasionalnya, yaitu:

- a. Program Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- b. Program Bidang Kesehatan
- c. Program Infrastruktur
- d. Program Ekonomi Kerakyatan
- e. Program Pengembangan Usaha Tempatan

Indeks kepuasan publik terhadap program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai umumnya masih kurang memuaskan. Fakta ini terlihat pada wilayah operasional yang tergolong kedalam *ring* II, yaitu Kelurahan Buluh Kasap, Kelurahan Teluk Binjai, Kelurahan Bukit Datuk dan Kelurahan Bukit Timah. Sedangkan wilayah operasional yang berada di *ring* I PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai memiliki indeks kepuasan publik yang memuaskan. Kemudian untuk prioritas program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina

(Persero) RU II Dumai berdasarkan kebutuhan publik, terdiri dari program pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil, program pendaur ulangan sampah dan composting melalui pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai guna, program bantuan pendidikan bagi anak-anak miskin dan program penyediaan air bersih. Program-program yang menjadi prioritas bagi setiap wilayah operasional pada PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan *capacity building* masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Untuk itu seharusnya pada tahapan kedepan pihak PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai lebih menfokuskan kepada prioritas program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga ketermanfaatan implementasi program akan lebih nyata terlihat bagi perbaikan dan pembenahan kehidupan masyarakat.

Indeks kepuasan publik yang kurang memuaskan terhadap implementasi program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai pada wilayah *ring/cluster* 2 dan 3 memberikan dampak kecemburuan sosial bagi masyarakat yang berada di wilayah operasional perusahaan. Apalagi program yang kurang memuaskan tersebut merupakan program yang bisa memberikan dampak kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu dilakukan pembagian skala prioritas oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dalam mengimplementasikan program CSR untuk dimasing-masing *ring/cluster*, terutama bagi program CSR yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat merangsang pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Implementasi program CSR yang berpihak kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat

akan memberikan stimulus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan harus terlebih dahulu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masyarakat. Sehingga masyarakat yang menerima program pemberdayaan ekonomi melalui program CSR tidak perlu terlebih dahulu mempejarinya. Sebab setiap individu masyarakat memiliki kemampuan yang berbeda-beda apabila harus memahami suatu program pemberdayaan ekonomi yang baru dikenal. Maka dari itu program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada peningkatan kesejahteraan harus merupakan sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat dan masyarakat juga nyaman untuk mengerjakannya.

Kemudian indeks kepuasan publik terhadap program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) operasional Rumbai, Tapung dan Minas umumnya masih kurang memuaskan. Fakta ini terlihat pada wilayah operasional yang tergolong kedalam *ring 1*, *ring II* ataupun *ring III*, yaitu Kelurahan Minas, Kepenghuluan Minas Timur, Kelurahan Muara Fajar, Kelurahan Umban Sari, Kelurahan Limbungan, Kelurahan Lembah Damai, Desa Petapahan Jaya dan Desa Cinta Damai. Kemudian untuk prioritas program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) operasional Rumbai, Tapung dan Minas berdasarkan kebutuhan publik, terdiri dari pengembangan usaha tempatan, bidang ekonomi kerakyatan, bidang pendidikan dan bidang infrastruktur. Program-program yang diinginkan dan menjadi prioritas oleh masyarakat yang dapat dipenuhi melalui program CSR PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) pada dasarnya program-program yang bersifat pemberdayaan bagi masyarakat. Sebab masyarakat saat ini memang sangat

membutuhkan program dari pihak PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) untuk membantu dan memberikan spirit kepada masyarakat dalam upaya mengembangkan potensinya untuk bisa keluar dan bangkit dari keterpurukan ekonomi. Untuk itu prioritas program yang bersifat pemberdayaan bagi masyarakat harus menjadi fokus utama bagi PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) dalam upaya mengimplementasikan programnya. Sementara program-program yang bersifat *charity* dan donasi serta infrastruktur biarlah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah setempat. Maka dari itu pihak PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) harus benar-benar memberikan program CSR-nya kepada masyarakat apa yang telah menjadi prioritas terhadap kebutuhannya.

Indeks kepuasan publik yang kurang memuaskan terhadap implementasi program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) operasional Rumbai, Tapung dan Minas di Provinsi Riau umumnya terjadi setelah kontrak kerja perusahaan yang sudah habis dan tidak diperpanjang lagi oleh Pemerintah Daerah. Kondisi ini membuat perhatian PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) kepada masyarakat yang selama ini menjadi mitra binaannya dalam program CSR atau *community development* (CD) menjadi terabaikan. Sehingga masyarakat yang sudah menjadi mitra binaan harus meneruskan usaha kegiatannya sendiri tanpa mendapat dukungan lagi dari pihak PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI). Fakta ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat mitra binaan yang sudah siap mandiri akan berjalan terus kegiatan usaha yang digelutinya dan bagi masyarakat yang belum siap mandiri akan langsung gulung tikar dan merugi. Realitas ini tentunya sangat berdampak negatif bagi tingkat pendapatan masyarakat dan akan berdampak signifikan pula kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya saat

ini, banyak kelompok masyarakat yang pernah dibina oleh PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) harus memulai kegiatan usaha baru untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan hidup dibawah standart kesejahteraan atau berada pada level kemiskinan.

Konsistensi implementor program CSR, dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan. Sebab apabila tingkat konsistensinya rendah, maka masyarakat yang selama ini dibina akan cenderung gagal mengerjakan program pemberdayaan yang dilakukan. Namun sebaliknya apabila tingkat konsistensi implementor tinggi, maka masyarakat yang dibina akan semakin mandiri dan tinggal menunggu waktu untuk dilepas supaya bisa lebih otonomi dalam mengerjakan kegiatan ekonominya. Apabila kemandirian sudah didapat oleh masyarakat, maka kegiatan ekonomi masyarakat juga akan stabil dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat juga semakin terjaga. Oleh karena itu supaya kemandirian masyarakat yang diberdayakan cepat muncul, dibutuhkan program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal. Sehingga masyarakat yang menjalani program pemberdayaan tidak perlu rumit-rumit mempelajari program pemberdayaan yang diperuntukan bagi dirinya.

Kemudian dalam mewujudkan implementasi prioritas program CSR berdasarkan indeks kepuasan publik, tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat. Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi prioritas program CSR berdasarkan indeks kepuasan publik di PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) khususnya di wilayah Rumbai, Tapung dan Minas di Provinsi Riau, yaitu: Pertama, sosialisasi program CSR yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak implementor untuk menyampaikan dan menginformasikan program yang dimiliki kepada masyarakat

sebagai kelompok sasarannya. Apabila proses sosialisasi yang dilakukan tidak berjalan lancar kepada seluruh kelompok sasaran, maka informasi program yang akan diberikan tidak akan diterima dengan baik. Karena sosialisasi yang dilakukan merupakan salah satu kunci penting supaya implementasi program dapat berhasil. Sebab tanpa ada sosialisasi yang jelas dari implementor, maka kegagalan implementasi program akan terwujud. Untuk itu dalam upaya mencapai keberhasilan dalam mengimplementasikan program, sosialisasi perlu dilakukan dengan baik. Supaya setiap kelompok sasaran program mengetahui keberadaan program dan dapat memanfaatkan program sesuai dengan peruntukannya.

Kedua, SOP pengajuan pengusulan program CSR yaitu merupakan tata cara atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh kelompok sasaran apabila ingin memanfaatkan program yang diimplementasikan. Penetapan SOP yang jelas kepada kelompok sasaran akan memberikan panduan kepada kelompok sasaran untuk bisa mengikuti program sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Selain itu juga keberadaan SOP yang ditetapkan akan mempermudah implementor dalam mengeksekusi setiap usulan pemanfaatan program yang diajukan oleh kelompok sasaran. Apabila kelompok sasaran mengajukan usulan tidak memenuhi kriteria dan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam SOP, maka implementor bisa membatalkan dan tidak menerima usulan yang diajukan oleh kelompok sasaran. Ketiga, budaya dan mind set masyarakat/kelompok sasaran yaitu kebiasaan dan pola pikir yang dimiliki oleh kelompok sasaran dalam menerima program yang disediakan. Apabila budaya dan mind set kelompok sasaran hanya memanfaatkan program untuk menerima keuntungan sesaat atau hanya untuk memperoleh program saja, maka kegagalan implementasi program

yang dilakukan akan mungkin terjadi. Sebab kelompok sasaran memandang bantuan atau pemberian program yang dilakukan hanya sekedar hibah atau pemberian yang cuma-cuma dari pihak implementor. Padahal bantuan yang diberikan seharusnya dijadikan kesempatan dan peluang bagi kelompok sasaran untuk membenahi dan memperbaiki kehidupannya. Kondisi inilah yang membuat banyak program yang diimplementasikan menemui kegagalan dalam pelaksanaannya.

Keempat, sinergitas implementasi program CSR yaitu koordinasi dan penyamaan persepsi antara pihak implementor (pemilik program) dan pihak fasilitator (pemerintah setempat) dalam menentukan dan menetapkan peruntukkan program kepada kelompok sasaran. Sebab apabila sinergitas dapat berjalan, maka pihak fasilitator dapat membantu implementor dalam mengenali kebutuhan kelompok sasaran. Karena yang memiliki kelompok sasaran adalah fasilitator, sehingga pihak ini dapat mengenali kebutuhan yang dapat dijadikan stimulus atau peluang bagi kelompok sasaran untuk bangkit dan keluar dari ketidakberdayaannya dalam kehidupan. Kelima, anggaran yaitu ketersediaan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam mengimplementasikan program. Dengan komposisi anggaran yang terbatas, tentunya pihak perusahaan harus bisa menyeleksi dan memilih program CSR mana yang akan dilaksanakan dan diimplementasikan. Sebab ketersediaan anggaran CSR akan sangat tergantung kepada laba perusahaan yang diperoleh dalam setiap tahunnya. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan, maka anggaran CSR yang disediakan cukup besar untuk diimplementasikan. Tetapi sebaliknya apabila keuntungan perusahaan kecil, maka anggaran CSR juga akan menjadi kecil. Bahkan apabila anggaran CSR perusahaan kecil, maka pihak perusahaan akan mengimplementasikan

program CSR-nya kepada kelompok sasaran yang berada di wilayah *ring* 1 perusahaan saja.

KESIMPULAN

Implementasi program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai yang merupakan BUMN akan bercampur dengan program PKBL masih berjalan dengan kurang maksimal. Sedangkan Implementasi program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) yang merupakan swasta murni di wilayah Rumbai, Tapung dan Minas di Provinsi Riau umumnya masih berjalan dengan kurang maksimal. Fakta ini menunjukkan bahwa kedua perusahaan yang memiliki latar belakang yang berbeda membutuhkan implementasi program CSR yang lebih prioritas. Prioritas program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai berdasarkan kebutuhan publik, terdiri dari program pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil, program pendaur ulangan sampah dan composting melalui pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai guna, program bantuan pendidikan bagi anak-anak miskin dan program penyediaan air bersih. Sedangkan prioritas program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) operasional Rumbai, Tapung dan Minas berdasarkan kebutuhan publik, terdiri dari pengembangan usaha tempatan, bidang ekonomi kerakyatan, bidang pendidikan dan bidang infrastruktur.

Kemudian faktor-faktor yang menghambat implementasi prioritas program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) khususnya di wilayah Rumbai, Tapung dan Minas di Provinsi Riau yaitu sosialisasi program CSR, SOP pengajuan pengusulan program CSR, budaya dan mind set masyarakat/

kelompok sasaran, sinergitas implementasi program CSR dan anggaran implementasi program CSR.

SARAN

Dalam upaya mengimplementasikan prioritas program CSR disetiap wilayah operasionalnya PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) khususnya di wilayah Rumbai, Tapung dan Minas di Provinsi Riau dengan baik, pihak perusahaan harus membagi jenis bantuan CSR apa yang akan diberikan oleh masing-masing wilayah di *ring* 1, 2 dan 3 perusahaan. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka direkomendasikan pula penyusunan SOP yang jelas untuk masing-masing wilayah operasional, supaya proses pengajuan usulan program dapat teratur dan memenuhi standart yang telah ditetapkan. Kemudian hendaknya direkomendasikan penyusunan model implementasi program CSR yang sesuai dengan kebutuhan publik. Karena dengan adanya model ini setiap wilayah operasional perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan permohonan bantuan dari program CSR yang disediakan. Selain itu juga model yang disusun dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam menggali kebutuhan masyarakat akan program CSR yang disediakan oleh perusahaan. Model yang disusun juga dapat menjadi dasar implementasi program CSR yang sesuai dengan kebutuhan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini., 2006., Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa efek Jakarta)., Simposium Nasional Akuntansi Padang.

Arief, E., 2010., Implementasi Good Corporate Governance melalui *Corporate social responsibility*., Muh. [http:// www.kemitraan. or. Id / newsroom / media-news](http://www.kemitraan.or.Id/newsroom/media-news).

Creswell W. John., 2012., Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed., Pustaka Pelajar., Yogyakarta.

Djalil, S., 2003., Konteks Teoritis dan Praksis *Corporate social responsibility*., Jurnal Reformasi Ekonomi., LSPEU Indonesia, Volume 4 No. 1., Jakarta.

Gerard, F., 2003., *Corporate social responsibility*., tjsga/tlwnsiessay.

Hendrik., 2011., Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Pulau Besar dan Danau Bawah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau., Volume 16 Nomor 1., Jurnal Perikanan dan Kelautan Universitas Riau.

Imron HS, A., 2012., Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Manguharjo Tugu Semarang dalam Menghadapi Perubahan Iklim., Volume 6 Nomor 1., Jurnal Riptek.

Ismail, S., 2009., *Corporate social responsibility: From Charity to Sustainability*., Salemba Empat., Jakarta.

Kim K.S., 2000., *Corporate social responsibility And Strategic Management: An Empirical Study of Korean MNCs in The United States*. Unpublished Dissertation. West Heaven, Connecticut: The University Of Heaven.

Mapisangka, A., 2009., Implementasi CSR Terhadap Kesejahteraan Hidup

- Masyarakat., JESP Vol 1.
- Mosher., 1987., Menggerakkan dan Membangun Pertanian., Yasaguna., Jakarta.
- Partini., 2013., CSR dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Implementasi CSR-PTBA di Muara Enim Sumatera Selatan)., Jurnal Manusia dan Lingkungan., Volume 20 Nomor 1., UGM.
- Rahmayanti, DR., 2014., Impelementasi Corporete Social Responsibility dalam Membangun Reputasi Perusahaan., Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 11 Nomor 1., UNS.
- Salsiyah, SM., 2010., Implementasi Program *Corporate social responsibility* Program Kemintraan dan Program Bina Lingkungan, Jurnal Administrasi Bisnis., Politehnik Negeri Semarang.
- Sigiharto, E; Salmani, & Indratno, B., 2013., Studi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau., Volume 18 No.2., Jurnal Ilmu Perikanan Tropis., Universitas Mulawarman.
- Siregar NC., 2007., Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi *Corporate social responsibility* Pada Masyarakat Indonesia., Jurnal Socioteknologi Edisi 12 Tahun 6 Bulan Desember., ITB., Bandung.
- Suharto, E., 2010., CSR & Comdev, Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi., Alfabeta., Bandung.
- Suryadarma, D; Akhmadi, Hastuti & Toyama, N., 2005., Ukuran Objektif Kesejahteraan Keluarga untuk Penargetan Kemiskinan: Hasil Uji Coba Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat Indonesia., Lembaga Penelitian SMERU., Jakarta.
- Steurer & Reinhard., 2010., The role of governments in *corporate social responsibility*: Characterising public policies on CSR in Europe., Institute of Forest, Environmental and Natural Resource Policy., BOKU-University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna. Vol. 43 Issue 1.
- Tashakkori, A & Teddlie, C., 2010., Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research., Pustaka Pelajar., Yogyakarta.
- Tauginiene, L., 2010., *Corporate social responsibility* in the Research Management., 16th EDAMBA Summer Academy.
- Thiel, M., 2010., Innovation in *Corporate social responsibility* from Global Business Leaders at Panasonic., Thomson Reuters and Nanyang Business School., American Journal of Economics and Business Administration 2(2): 194-200.
- Wahyudi I. & Azheri B., 2011., *Corporate social responsibility*: Prinsip, pengaturan dan implementasi., Setara Press., Surabaya.
- Wijayanti, L & Ihsannudin., 2013., Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan., Velume 2 Nomor 2 Oktober., Jurnal Agriekonomika.
- Wise, V & Muhammad, AM., 2009., Corporate Governanve and *Corporate social responsibility* in Bangladesh with Special Reference to Commercial Banks., Working Paper No. AIUB-

BUS-ECON 05.

Yentifa, A & Handayani, D., 2008.,
Implementasi Program “*Corporate
social responsibility*” (CSR) PT.
Semen Padang., Jurnal Akuntansi &
Manajemen Vol 3 No. 2 Desember ISSN
1858-3687 hal 71-85., Padang.

**INTEGRASI SOSIAL DI PERDESAAN:
KETERKAITAN KAWASAN TRANSMIGRASI DENGAN DESA-DESA SEKITAR**

***SOCIAL INTEGRATION IN RURAL:
LINKAGE OF TRANSMIGRATION AREA WITH VILLAGES NEIGHBOURHOOD***

Widarjanto dan Slamet Rahmat Topo Susilo

Pusat Penelitian dan Pengembangan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Jl. TMP Kalibata 17 Jakarta Selatan, Telp/Fax 021 7971010

E-mail: anto3369@yahoo.co.id

Diterima: 31 Mei 2016; Direvisi: 12 Desember 2016; Disetujui: 14 Desember 2016

Abstrak

Pengembangan masyarakat lebih efektif dilaksanakan melalui kelembagaan berbasis komunitas dan kawasan. Melalui pendekatan kelembagaan, baik kelembagaan ekonomi maupun sosial dapat mempermudah mengontrol pengambilan keputusan, kebijakan, program, dan pelaksanaan. Kelembagaan dapat menghimpun norma dan aturan yang dibuat dan disepakati dalam mengatur pergaulan hidup dengan tujuan bersama berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis kondisi integrasi sosial, mempelajari pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dikembangkan oleh masyarakat transmigrasi dan merumuskan saran tindak dan pendekatan pengembangan masyarakat yang lebih sesuai dalam pembangunan transmigrasi. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan melihat hubungan gejala yang bersifat interaktif. Melalui kelembagaan dapat mendorong terjadinya dinamika proses seperti interaksi yang intensif, terjadi harmonisasi, toleransi, kegiatan kolektif, dan partisipasi. Dinamika proses yang terjadi menghasilkan integrasi sosial dengan dukungan tiga kekuatan integratif, yaitu koersif di pusat Kota Terpadu Mandiri (KTM), normatif di desa-desa hinterland, dan kawasan KTM dengan integrasi fungsional. Semua unsur melakukan harmonisasi pada derajat tertentu dalam menjamin kelangsungan sistem sosial.

Kata kunci: pengembangan masyarakat, integrasi sosial, transmigrasi.

Abstract

Community development through community and regional based institutions has seen as an effective approach. Those approach, both economic and social institutions can facilitate in the controlling of decision-making, policy, program, and implementation. The research objective is to analyze the conditions of social integration, between migrant and origin community. The research is a qualitative and uses case studies that looks at social reality as something holistic, complex, dynamic, and full of meaning, as well as seeing the interactive relationship of symptoms. Institutions can lead to such intensive interaction processes, harmonization, tolerance, collective activity, and participation. The dynamics of the processes that occur will generate social integration with the support of three integrative forces, namely coercive forces in the center of the Integrated Independent City (KTM), normative forces in the hinterland villages, and the KTM regions with functional integration. All elements harmonize at certain degrees in ensuring the continuity of the social system.

Keywords: community development, social integration, transmigration.

PENDAHULUAN

Pembangunan transmigrasi merupakan suatu sistem pembangunan jangka panjang dan dilaksanakan secara terpadu, yang melibatkan banyak pihak dan banyak kepentingan termasuk mengintegrasikan transmigran dan penduduk setempat. Pelaksanaannya mengintegrasikan berbagai program terkait baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Dengan gambaran demikian, pembangunan transmigrasi memiliki ciri pembangunan sosial yang diperkenalkan oleh James Midgley, terutama dalam mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Midgley (1995), menawarkan pembangunan sosial sebagai suatu pendekatan untuk mendukung kesejahteraan penduduk, yang berjalan bersama-sama dengan pembangunan ekonomi, seperti dua sisi mata uang. Pembangunan sosial didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis.

Fakta menunjukkan bahwa cukup banyak kawasan transmigrasi yang telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah secara signifikan (Soegiharto, 2008). Namun disadari tanpa mengesampingkan hasil yang telah dicapai, keberhasilan pembangunan transmigrasi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, diantaranya karena lahan yang kurang layak, rendahnya produktivitas usahatani, kurang lancarnya proses distribusi, keterbatasan prasarana sarana, rendahnya kompetensi transmigran, dan tidak terbentuk keterkaitan pusat-pusat pertumbuhan baru. Berdasarkan pengalaman empirik, suatu lokasi transmigrasi Pola Tanaman Pangan (Jenis TU)

yang berkembang menjadi sentra produksi atau menjadi ibukota kecamatan/kabupaten membutuhkan waktu selama 17–20 tahun (Gavin Jones, 1982; Arndt dan Sundrum, 1982 dalam Haryati dkk, 2006; Soegiharto, 2008). Kondisi ini disebabkan permukiman transmigrasi yang ada kurang mendorong terbentuknya hubungan ekonomi antara transmigran atau permukiman transmigrasi dengan masyarakat sekitar atau daerah di luar permukiman transmigrasi. Pembangunan permukiman transmigrasi diyakini tidak semata-mata membangun fisik, tetapi akan membangun suatu komunitas masyarakat yang mandiri berdasarkan atas prinsip kesejahteraan ekonomi dan sosial baik secara kelompok maupun individu.

Selama ini program transmigrasi menimbulkan dinamika sosial baru dan dampak sosiologis bagi transmigran pendatang, transmigran daerah asal dan penduduk sekitar permukiman transmigrasi. Hal ini disebabkan oleh faktor hubungan dan pola kehidupan bermasyarakat di daerah yang baru sangat berbeda dengan daerah asalnya. Di permukiman baru, transmigran harus berintegrasi dengan masyarakat atau penduduk asli setempat yang sifat dan karakteristiknya sangat berbeda dengan tempat asalnya (Soekiman dan Yulianto, 1997).

Program transmigrasi ini mengakibatkan adanya perpindahan sistem kebiasaan, sistem kewenangan dan kerjasama, sistem pengawasan tingkah laku dan kebebasan, kebebasan individu yang berbeda satu sama lainnya. Dengan kenyataan tersebut, tidak mengherankan jika terjadi konflik antar pendatang dan penduduk setempat di permukiman transmigrasi yang baru.

Berdasar paradigma pembangunan transmigrasi baru, untuk mempercepat pengembangan masyarakat transmigrasi sebagai proses integrasi sosial dapat

diwujudkan dengan membentuk pusat pertumbuhan dalam waktu 10-15 tahun. Akselerasi pembangunan dan pengembangan masyarakat itu dilakukan melalui pendekatan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Inti dari penyenggaraan KTM adalah pembangunan sistem pengembangan masyarakat transmigrasi dalam kawasan yang dirancang secara holistik dan komprehensif dalam skala ekonomi dan sosial sesuai dengan rencana daerah dalam mengembangkan wilayahnya. Dalam kawasan ini, selain permukiman transmigrasi baik permukiman baru maupun yang telah menjadi desa, juga termasuk penduduk setempat yang bermukim di desa-desa sekitar permukiman transmigrasi yang berada dalam kawasan tersebut. (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP. 214/MEN/V/2007).

Karakteristik KTM merupakan kebijakan pembangunan sosial yang bertujuan untuk percepatan pusat-pusat pertumbuhan baru sekaligus mewujudkan integrasi sosial menuju kesejahteraan sosial. Pembangunan KTM bersifat lintas sektor, integrasi pembangunan sosial dan ekonomi serta melibatkan peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Permasalahan mendasar dari model percepatan pengembangan masyarakat dalam skema KTM adalah pembangunan prasarana dan sarana fisik tidaklah serta merta dapat menumbuhkan perekonomian daerah dan integrasi sosial sebagaimana yang diharapkan. Perwujudan pengembangan masyarakat seperti tercapainya perilaku masyarakat yang produktif, efisien, berwawasan luas, peduli lingkungan dan berfikiran modern menuju masyarakat madani belum terbentuk. Upaya untuk mendukung pewujudan wilayah pusat pertumbuhan selain diperlukan berbagai agenda untuk melakukan perubahan yang bersifat fisik spasial, seperti penetapan tata ruang,

pembangunan permukiman, serta penyediaan sarana industri dan jasa, juga diperlukan perubahan sikap dan cara pikir masyarakat transmigrasi dari tradisional menuju modern (Najiyati dkk, 2008).

Beberapa hasil penelitian menyimpulkan adanya faktor-faktor pendukung, pendorong dan penghambat terjadinya integrasi sosial, upaya-upaya untuk meningkatkan integrasi sosial dan bentuk integrasi sosial. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa pembangunan fisik dan ekonomi masih menjadi faktor utama dalam mempengaruhi integrasi sosial, sehingga belum terlihat keterpaduan antara program pengembangan ekonomi dan program pengembangan masyarakat transmigrasi dalam mewujudkan pembangunan transmigrasi. Permasalahan tersebut adalah pembangunan yang terlihat bias fisik prasarana sarana dan belum menyentuh pengembangan masyarakat, dominasi pembangunan *top down* dan peran pemerintah masih mendominasi, partisipasi masyarakat dan non pemerintah dalam pembangunan KTM belum terlihat, terjadinya permasalahan sosial seperti gesekan antara transmigran dan penduduk setempat, pendapatan transmigran masih rendah, serta kemandirian individu dan kelompok transmigran belum terbentuk.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena permasalahan yang muncul, terjadi kemampuan membangun yang berbeda antara transmigran dan penduduk sekitar di kawasan transmigrasi. Apabila hal ini berlanjut akan mengakibatkan kesenjangan pembangunan dan membahayakan keberlanjutan pengembangan masyarakat karena akan memicu konflik sosial (disintegrasi).

Penelitian ini berupaya melakukan analisa berdasarkan kondisi, bentuk, potensi dan kendala terwujudnya integrasi sosial. Bertitik

tolak dari permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah menganalisis kondisi integrasi sosial di kawasan transmigrasi (perdesaan).

METODE

Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan melihat hubungan gejala yang bersifat interaktif (Creswell, 2009).

Tahapan penelitian dimulai dengan mendeskripsikan masalah-masalah integrasi di kawasan transmigrasi meliputi faktor-faktor pendorong dan penghambat integrasi sosial; menggambarkan kondisi riil pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi; prospek kecenderungan dan analisis masalah pengembangan masyarakat transmigrasi; dan penyusunan rekomendasi pengembangan masyarakat transmigrasi untuk menentukan intervensi yang tepat.

Lokasi penelitian di kawasan KTM Rambutan Parit, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan pertimbangan terdapat permukiman transmigrasi pola tanaman pangan yang mendapat program akselerasi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi dengan asumsi transmigran telah beradaptasi dengan lingkungan sekitar termasuk penduduk sekitarnya. Tipologi kawasan untuk analisis terbagi menjadi tiga, yaitu di pusat KTM, di desa-desa sekitar dan kawasan KTM.

Penentuan informan dengan purposive sampling untuk mendapatkan kesesuaian antara pertanyaan penelitian dengan sampel yang dibutuhkan. Dasar kriteria informan adalah yang paling tahu tentang apa yang diharapkan, dan memudahkan dalam menjelajahi situasi sosial yang diteliti, seperti transmigran dan penduduk sekitar, tokoh formal dan informal

masyarakat transmigrasi, *stakeholder* seperti pedagang, pemilik usaha perdagangan, jasa atau industri, dan penampung hasil pertanian, aparat instansi terkait, dan aparat pemerintah daerah seperti kepala kantor KTM, kepala kantor kimtrans, pendamping, dan kepala desa.

Menurut Rubin dan Babbie (2008), pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Dilihat settingnya, data yang dikumpulkan berada pada setting alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan yang tidak dapat dipahami apabila dipisahkan dari konteksnya, yaitu kawasan transmigrasi. Dari sumber datanya, pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya dari teknik pengumpulan data, dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara/ interview mendalam, diskusi kelompok terfokus, dokumentasi dan gabungan (triangulasi). Penelitian ini menggunakan teknik analisa data berdasarkan pada tahapan penelitian, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema waktu (Spradley, 1980). Pisau analisis untuk membedah kondisi integrasi sosial adalah dimensi integrasi sosial menurut konsep Wirutomo (2012), yang terbagi menjadi integrasi normatif, fungsional, dan koersif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kawasan KTM

KTM dibangun untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta untuk menumbuhkan-kembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan penduduk sekitar, membuka peluang

usaha dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitar, serta meningkatkan kemudahan transmigran dan penduduk sekitar untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar. Kawasan Rambutan Parit ditetapkan sebagai KTM pada tahun 2007 dengan pusatnya berada di permukiman transmigrasi Rambutan 1.

Fasilitas umum dan sarana usaha dibangun agar transmigran betah tinggal di permukiman transmigrasi untuk berusaha. Sarana usaha tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat sekitar kawasan transmigrasi. Fasilitas umum dan sarana usaha yang sudah dibangun yaitu pasar, sarana pendidikan, kesehatan, dan peribadatan. Pasar belum dimanfaatkan oleh transmigran dan lebih banyak digunakan oleh pedagang dari luar permukiman transmigrasi. Sedangkan sarana usaha seperti lembaga permodalan, Koperasi, UPJA, kelompok tani dan Gapoktan sudah berkembang dan berfungsi baik. Di kawasan ini terdapat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dimanfaatkan transmigran dan penduduk sekitar menjadi pekerja di waktu pekerjaan di lahan tidak banyak. Bekerja di kelapa sawit menjadi wahana untuk berinteraksi antara transmigran dan penduduk setempat.

Integrasi Sosial di Kawasan KTM

Integrasi sosial dapat terbentuk apabila para anggota masyarakat bersepakat mengenai struktur kemasyarakatan, nilai-nilai, dan norma serta pranata sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dimensi integrasi sosial menurut konsep Wirutomo (2012), terbagi menjadi integrasi normatif, fungsional, dan koersif.

a. Pusat KTM

Proses integrasi di pusat KTM terjadi dengan adanya interaksi sehari-hari, proses kerjasama, saling tolong menolong

dan toleransi sosial cukup baik, terutama transmigran yang berasal dari Jawa. Diakui bahwa transmigran Jawa memiliki tingkat adaptasi sosial yang cukup tinggi sehingga jarang menimbulkan gesekan budaya maupun sosial yang mengganggu hubungan antar etnik. Interaksi yang intens terjadi karena seringnya bertemu, bermusyawarah, dan bergotong-royong dalam wahana yang diciptakan oleh pemerintah. Keikutsertaan dalam program transmigrasi “memaksa” transmigran pendatang dan penduduk setempat yang menjadi transmigran berada dalam tempat yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai transmigran. Hak sebagai transmigran adalah menerima bantuan-bantuan, seperti menerima jaminan hidup, paket produksi standar, sarana produksi non standar, mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pelatihan intensifikasi lahan pekarangan atau usaha, program kewirausahaan, Gapoktan, Koperasi, dan lembaga keuangan mikro. Sedangkan kewajiban yang harus dipatuhi adalah harus tinggal menetap di permukiman transmigrasi dengan mematuhi aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, memelihara kelestarian lingkungan, memelihara dan mengembangkan kegiatan usaha, mempertahankan pemilikan tanah dan aset produksi, memelihara hubungan yang serasi dengan masyarakat setempat serta menghormati dan memperhatikan adat istiadatnya.

Berdasar hasil penelitian, berkumpul dan menetapnya beberapa etnis mendorong terjadinya bentuk integrasi koersif dalam lingkup pusat KTM, dan dikondisikan oleh beberapa faktor yaitu nilai dasar, toleransi, struktur, partisipasi, dan agama.

b. Desa-Desa Sekitar

Pembangunan dan pengembangan kawasan KTM termasuk juga pengembangan

desa-desa sekitar. Desa-desa yang termasuk dalam deliniasi KTM Rambutan Parit dapat dikelompokkan ke dalam dua kluster berdasar jarak terhadap pusat KTM. Kluster pertama dengan jarak yang dekat adalah Desa Sungai Rambutan, dan Desa Tanjung Pule. Kluster kedua dengan jarak cukup jauh adalah Desa Bakung, Desa Parit, Desa Lorok, dan Desa Purnajaya. Konektivitas antara pusat KTM dengan desa-desa sekitar telah terhubung dengan dibangunnya jalan.

Integrasi di lingkup desa sekitar terjadi dengan adanya interaksi sehari-hari, identifikasi, proses kerjasama, saling tolong-menolong dan toleransi sosial cukup baik. Kondisi ini tercermin dari proses terbentuknya integrasi yang terjadi di desa-desa sekitar. Pada kelompok etnik yang homogen, biasanya ciri ras, fisik, agama, sikap, hubungan kekeluargaan, pekerjaan dan kekerabatan dapat menjadi dasar dari ikatan/bonding masyarakat. Karakteristik kultural penduduk desa sekitar permukiman transmigrasi ditandai dengan keberagaman strata sosial dan ekonomi, tetapi relatif homogen dalam hal etnis budaya, dan agama. Homogenitas dapat terlihat dari sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari, seperti kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga, antara warga masyarakat terdapat semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti kegiatan gotong royong dan kerja bakti di lingkungan desa, membersihkan parit, perbaikan rumah ibadah, perbaikan jalan desa, medatangi undangan hajatan, menjenguk yang sakit, dan melayat yang meninggal,

Dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan melalui musyawarah, terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas

kepentingan pribadi dan golongan. Suasana pedesaan yang masih kental menjadikan masyarakat di desa-desa ini seakan seluruhnya saling mengenal satu sama lain. Hubungan kekerabatan yang saling kait-mengkait satu sama lain menggambarkan masyarakatnya sebagai sebuah keluarga besar. Wujud dari kekeluargaan tampak pada sikap toleran dan solidaritas sesama mereka dengan saling menyapa, mengunjungi, membantu atau tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai integrasi normatif, dimana ikatan sosial terjadi karena suatu kesepakatan terhadap nilai-nilai dan norma dasar sebagai wujud mempertahankan dan mewujudkan struktur sosial sebagai masyarakat yang homogen.

Kehadiran program pembangunan transmigrasi disekitarnya membuat mereka harus berinteraksi dengan masyarakat yang relatif beragam dalam hal entis, budaya, kebiasaan, dan agama. Motto hubungan dengan pendatang adalah kebersamaan, saling menerima, dan mencontoh pendatang karena ulet, misalnya dalam hal budidaya palawija dan kelapa sawit. Selain itu, ada rasa kekeluargaan kepada siapa saja terutama kepada tetangga dan kenalan tanpa pilih kasih apakah seseorang itu sebagai pendatang yang ada hubungan keluarga atau tidak. Dari kondisi integrasi sosial di desa-desa sekitar, teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kesamaan etnis/suku, agama, kebudayaan, pekerjaan, dan pendapatan.

c. Kawasan KTM.

Pembangunan dan pengembangan kawasan KTM Rambutan Parit adalah untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta, sebagai penggerak perekonomian transmigran dan penduduk sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru sekaligus

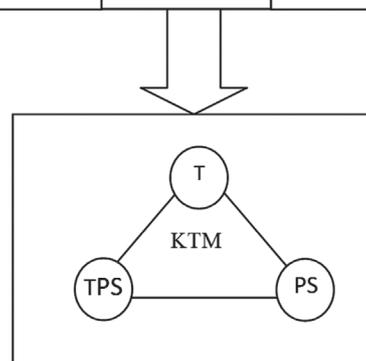
untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha. Dengan terbentuknya kawasan ini, diharapkan meningkatkan kemudahan-kemudahan bagi transmigran dan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apabila proses ini berjalan lancar, dengan sendirinya dapat meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan terwujudnya integrasi transmigran dengan penduduk sekitar.

Pembangunan dan pengembangan kawasan KTM dirancang melalui pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi meliputi pembangunan pusat KTM dan beberapa desa di hinterland dalam satu kawasan. Pembangunan pusat KTM dimaksudkan untuk menyatukan visi kawasan transmigrasi yang dikembangkan memenuhi fungsi-fungsi perkotaan. Perwujudan fungsi perkotaan adalah tersedianya berbagai fasilitas meliputi pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat kegiatan industri pengolahan hasil, pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan dan pelatihan, sarana pemerintahan, fasilitas umum, dan sosial.

Proses dan dinamika integrasi fungsional tengah berlangsung di kawasan ini melalui komunitas di desa-desa sekitar dengan memanfaatkan prasarana dan sarana yang telah dibangun. Modal fisik berupa jalan penghubung telah memberi dampak positif dalam membuka komunitas yang mengelompok dan terpencil, kemudian mengintensifkan interaksi sosial antara anggota komunitas yang berbeda. Selanjutnya mampu memperluas kohesi sosial dari sempit dengan anggota komunitas sendiri menjadi semakin luas dalam masyarakat kawasan KTM. Ini merupakan suatu ikatan sosial yang didasarkan situasi saling ketergantungan fungsional antara unsur satu dan lainnya.

Dengan pemanfaatan berbagai fasilitas menyerupai fungsi kota, terjadi interaksi yang rutin dan terus-menerus mengakibatkan kesepahaman ke arah proses integrasi sosial. Terjadi percepatan proses transformasi sosial masyarakat rural ke arah masyarakat urban, tanpa harus meninggalkan pola usaha utama sebagai petani serta peningkatan pendapatan individu, keluarga, dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini diperlihatkan dengan tersedianya berbagai pelayanan-pelayanan yang mencerminkan kondisi perkotaan. Namun kondisi perkotaan masih memiliki nuansa pertanian yang diperlihatkan dengan adanya perusahaan komoditas pertanian sebagai unggulan dan aktivitas agribisnis. Kondisi proses integrasi fungsional di kawasan transmigrasi terjadi karena adanya fungsi dan manfaat, pelaksanaan program pengembangan masyarakat, sarana dan prasarana, pendapatan, bekerja di perusahaan perkebunan, dan agama.

Kawasan Transmigrasi (Kota Terpadu Mandiri)		
Pusat KTM (Permukiman Transmigrasi)	Desa Sekitar/ Hinterland	Kawasan KTM (Pusat dan Desa-Desa Hinterland)
Integrasi Koersif	Integrasi Normatif	Integrasi Fungsional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai dasar 2. Toleransi 3. Struktur 4. Partisipasi 5. Agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etnis/Suku 2. Pekerjaan 3. Pendapatan 4. Agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi dan manfaat 2. Pendapatan 3. Sarana dan prasarana 4. Pelaksanaan program pengembangan masyarakat 5. Bekerja di perkebunan



Keterangan:

T: transmigran

TPS: transmigran penduduk setempat

PS: penduduk setempat

Gambar 1. Deskripsi Kondisi Integrasi Sosial di KTM
Rambutan Parit

Ke tiga integrasi yang terjadi itu bukan merupakan tahapan, melainkan seperti tiga pilar yang menyangga kawasan transmigrasi. Semua kekuatan integrasi itu penting dan selalu ada pada derajat tertentu, ideal dalam jumlah yang proposional dan seimbang sehingga menjamin kelangsungan sistem sosial. Ketiga unsur integrasi tersebut pada dasarnya tidak saling meniadakan tetapi justru saling berinteraksi untuk menemukan keseimbangan yang dinamis (Wirutomo, 2012).

Analisis Pengembangan Masyarakat Mendukung Integrasi Sosial

Proses pengembangan masyarakat lebih efektif apabila dilaksanakan dalam bentuk kelembagaan atau organisasi. Bahwa pendekatan pengembangan masyarakat lebih berdaya jika diorganisasikan melalui kegiatan kolektif yang dapat mengontrol pengambilan keputusan, kebijakan, proyek program, dan pelaksanaannya. Organisasi kolektif menghimpun norma-norma segala tingkatan yang mengatur pergaulan hidup dengan tujuan tertentu berkisar pada suatu kebutuhan-kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat (Nasdian, 2014).

Dengan rujukan norma-norma yang diputuskan bersama, dan dianut terjadi proses interaksi pada sistem sosial di masyarakat dan mendorong terjadinya saling percaya dalam interaksi semakin tumbuh yang pada akhirnya mewujudkan integrasi sosial. Pengembangan masyarakat dijalankan dengan mengorganisir

diri dalam suatu kelembagaan ekonomi dan sosial cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif di tingkat komunitas. Masyarakat dalam hal ini adalah anggota masyarakat yang diorganisasikan menjadi suatu kelompok yang bersifat komunitas yang saling mengenal, terikat oleh kepentingan dan tujuan yang sama, didudukkan sebagai pelaku dan penentu program. Upaya ini dirasakan cukup strategis mengingat kelembagaan masyarakat merupakan kolaborasi dari interaksi sosial pada suatu komunitas untuk kepentingan bersama.

Kelembagaan dibuat dengan tujuan yang sama merupakan suatu perekat yang dapat menyatukan antar anggota masyarakat transmigrasi melalui pengaturan struktur dan fungsi kelembagaan sehingga mampu memobilisasi semua potensi baik yang berasal dari dalam maupun luar tanpa ada satupun yang merasa dirugikan (Zubaedi, 2013). Pengembangan masyarakat merupakan program yang membutuhkan waktu, energi, komitmen, dalam wilayah tertentu, dan hasilnya belum tentu memuaskan. Pemerintah terlibat dalam upaya pengembangan masyarakat sebagai pemulai (starter).

Kelembagaan masyarakat yang terbentuk untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dan kebutuhan sosial lainnya seperti lembaga pelayanan pendidikan, lembaga pelayanan kesehatan, lembaga keamanan desa, lembaga keagamaan, dan lembaga kepemudaan. Kelembagaan yang dibangun hampir sama dengan lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk di desa. Lembaga ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Fungsinya adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya

demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Dalam kehidupan komunitas, posisi dan fungsi kelembagaan merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial dalam suatu komunitas.

Selanjutnya, pengembangan masyarakat mendorong terjadinya interaksi antar orang-orang dalam dan antar komunitas dengan frekwensi sesuai dengan program dan jadwal pelaksanaan pengembangan masyarakat yang diberikan. Peran anggota masyarakat transmigrasi dalam suatu kelembagaan dapat berupa menjadi pengurus kelembagaan atau hanya menjadi anggota saja. Dengan aktivitas kelembagaan yang efektif, memunculkan kesadaran anggota masyarakat transmigrasi dalam menghidupkan roda kelembagaan untuk memanfaatkan, berkumpul, dan menggunakan mekanisme musyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Individu dalam kelembagaan belajar untuk mendiskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka. Anggota kelembagaan belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis, dan merancang suatu solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Menurut Polak (1966), kelembagaan itu memiliki tujuan untuk mengatur antarmubungan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting (Nasdian, 2014).

Prinsip-prinsip proses, dapat menciptakan kerjasama yang lebih luas dalam aktivitas masyarakat dan mendorong terjadinya integrasi sosial. Dilihat dari proses perubahan, maka yang direncanakan adalah suatu tindakan untuk membangun aspek manusia termasuk proses interaksi dengan sistem sosial di masyarakat (Soetomo, 2009). Integrasi sosial dalam lingkup permukiman transmigrasi mengarah ke koersif, sedangkan antar komunitas yaitu antara

komunitas di permukiman transmigrasi dan komunitas pada desa-desa sekitar mengarah ke fungsional. Untuk komunitas di dalam desa terjadi integrasi normatif.

Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berupaya mempersatukan komunitas dan menjamin agar setiap kegiatan komunitas diarahkan untuk membangun komunitas itu dengan mencari upaya agar semakin banyak anggota komunitas yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Hal ini akan memberi peluang bagi semua untuk berinteraksi baik secara formal maupun informal. Suasana informal sering lebih disukai. Dengan demikian, pembangunan kelembagaan tidak sesederhana mengumpulkan orang-orang, tetapi mencakup upaya-upaya mendorong dan menyediakan kondisi yang sesuai untuk bekerjasama, menyediakan struktur, mekanisme saling membutuhkan dalam melakukan kegiatan bersama, dimana setiap orang dapat memberi sumbangan dan menghargai sumbangan orang lain.

Pelembagaan di kawasan KTM membutuhkan proses yang cukup lama hingga aturan, tata cara menyalurkan dan memperoleh layanan dari kelembagaan itu diakui secara luas sebagai norma dan perilaku bersama. Faktor-faktor keberhasilan proses kelembagaan adalah:

1. Terdapat tujuan kebutuhan dan masalah bersama antara transmigran dan penduduk sekitar, sehingga terjadi pola dan aturan kerjasama baru. Tanpa adanya tujuan dan masalah tidak mungkin ada alasan yang cukup untuk mengembangkan dan memperkenalkan norma dan perilaku baru di dalam warga. Disinilah pentingnya dari upaya peningkatan kesadaran sebagai bagian penting dari upaya pengorganisasian dan pengembangan kelembagaan.
2. Terdapat dasar-dasar persamaan pola kebudayaan asal dan agama diantara

masyarakat transmigrasi menentukan tingkat penerimaan dan kepatuhan mereka secara keseluruhan terhadap norma dan perilaku tertentu yang diperkenalkan. Latar belakang budaya seseorang menentukan cara pandang terhadap suatu perilaku dan norma tertentu.

3. Tersediannya tokoh-tokoh pemimpin sangat menentukan keberhasilan proses pelebagaan. Hal ini mudah dipahami karena pemimpin umumnya menjadi sumber inspirasi dan inovasi atas norma dan perilaku baru yang diperlukan. Para pemimpin juga menjadi acuan seluruh anggota komunitas tentang penataan terhadap norma dan perilaku sehari-hari.
4. Terjadinya frekuensi interaksi yang cukup diantara pihak-pihak di dalam suatu masyarakat transmigrasi sebagai sarana untuk mendiskusikan, menilai atau mengevaluasi kemapanan, keteraturan, stabilitas, dan kecocokan setiap norma dan perilaku baru yang diperkenalkan.
5. Terjadinya interaksi dan kerjasama yang baik, diantara unsur-unsur di dalam warga sebagai sarana untuk menerapkan norma-norma dan perilaku yang diperkenalkan.
6. Komunkasi sosial dengan posisi setara (antara transmigran, transmigran penduduk setempat, dan penduduk setempat) menjadi faktor penting dalam mewujudkan integrasi sosial, sehingga tidak ada orang yang merasa diperdaya melalui proses komunikasi ini.

KESIMPULAN

Integrasi sosial di kawasan KTM terjadi karena dukungan tiga kekuatan integratif, yaitu koersif, normatif, dan fungsional. Semua unsur melakukan harmonisasi pada derajat tertentu dalam menjamin kelangsungan sistem sosial. Integrasi sosial terbentuk melalui serangkaian proses yang terjadi dalam batasan kawasan transmigrasi, terdiri dari pusat KTM, desa-desa hinterland dan kawasan KTM. Kondisi

integrasi koersif di pusat KTM terjadi dengan adanya interaksi sehari-hari, proses kerjasama, saling tolong menolong dan toleransi sosial cukup baik. Faktor pendorong terjadinya integrasi sosial di pusat KTM adalah persamaan nilai-nilai dasar, adanya toleransi, dukungan struktural, adanya partisipasi, dan persamaan agama. Kondisi integrasi normatif di lingkup desa sekitar terlihat dengan adanya interaksi sehari-hari, identifikasi, proses kerjasama, saling tolong-menolong dan toleransi sosial cukup baik. Faktor pendukung terjadinya integrasi sosial di desa-desa hinterland adalah kesamaan etnis (adat dan budaya), agama, pekerjaan, dan pendapatan. Integrasi di kawasan KTM termanifes dengan pemanfaatan berbagai fasilitas menyerupai fungsi kota, terjadi interaksi yang rutin dan terus-menerus mengakibatkan kesepahaman ke arah proses integrasi fungsional. Faktor pendorong terjadinya integrasi sosial di kawasan adalah adanya fungsi dan manfaat, pelaksanaan program pengembangan masyarakat, sarana dan prasarana, persamaan pendapatan, dan persamaan agama.

SARAN

Pengembangan masyarakat lebih efektif dilaksanakan melalui kelembagaan berbasis komunitas dan kawasan. Melalui pendekatan kelembagaan, baik kelembagaan ekonomi dan sosial dapat mempermudah mengontrol pengambilan keputusan, kebijakan, proyek/program, dan pelaksanaannya. Kelembagaan dapat menghimpun norma dan aturan yang dibuat dan disepakati dalam mengatur pergaulan hidup dengan tujuan bersama berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kelembagaan dapat mendorong terjadinya dinamika sistem atau proses seperti interaksi yang intensif, harmonisasi, toleransi, kegiatan kolektif, dan partisipasi masyarakat transmigrasi berbasis kawasan.

Pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi yang berkelanjutan memerlukan pengembangan yang seimbang, terpadu dan pendekatan sinergi lintas sektor. Pengembangan yang seimbang mencakup sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan spiritual serta dilakukan terpadu mengingat adanya berbagai program di berbagai instansi. Model pengembangan masyarakat yang diusulkan adalah sinergitas perencanaan dalam satu kawasan transmigrasi, dilakukan dengan mengakomodir dalam master plan kawasan transmigrasi melibatkan lintas sektor terkait. Pengembangan masyarakat di masing-masing satuan permukiman dilandasi dengan tahapan-tahapan pengembangan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Tahapan pengembangan masyarakat dilakukan melalui tahap indentifikasi kebutuhan/persiapan (*engagement*); tahap pengkajian (*assessment*); tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*); tahap pelaksanaan kegiatan (*implementation*); tahap evaluasi (*evaluation*); dan tahap terminasi (*termination*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih disampaikan kepada Bapak Asnawi, Bapak Ahmad Zaili, dan Bapak Ahmad Zuber di Palembang dan Indralaya yang telah membantu dalam mengumpulkan data dan informasi di KTM Rambutan Parit.

DAFTAR PUSTAKA

Agusta, I. (2002). Metode Evaluasi Program Pemberdayaan. Artikel ini merupakan perbaikan makalah yang disampaikan pada Kongres dan Seminar Nasional IV Ikatan Sosiologi Indonesia tahun 2002 di Bogor, Jawa Barat, 28-29 Agustus 2002

Alfitri (2010). Program *Community development*

Perusahaan Migas dalam Penguatan Modal Sosial. Disertasi. Universitas Padjadjaran, Bandung.

Creswell, J. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 2nd ed. California: Sage Publication.

Haryati, dkk. (2006). *Studi Pembangunan Pusat Pertumbuhan*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ife, J. & Tesoriero, F. (2008). *Community development: Community Based Alternatives in on Age Globalisation*. Perason Education Australia, Unit 4, Level 3, 14 Aquatic Drive Frenchs Forest NSW 2086.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 214/Men/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi.

Lawang, R. M. Z. (2004). *Stratifikasi Sosial di Cancar Manggarai, Flores Barat Tahun 1950-an dan 1980-an*. Depok: FISIP UI Press.

Midgley, J. (1995). *Sosial Development: the Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publications Ltd.

Najiyati, S. dkk. (2008). *Transmigrasi dan Pengembangan Masyarakat Desa Sekitar*. Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana.

Nasdian, F.T. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Rubin, A & Babbie, E.R. (2008). *Research*

- Methods for Social Work, 6th Edition.
Thomson Brooks/Cole.
- Soegiharto, S. (2008). *Transmigrasi: Belajar dari Kisah Sukses*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Soekiman & Yulianto. (1997). *Dimensi Sosial, Ekonomi dan Budaya dalam Pelaksanaan Program Transmigrasi Lokal di Provinsi Lampung*. Dalam Muhajir Utomo dan Rofiq Ahmad, *90 Tahun Kolonisasi 45 Tahun Transmigrasi*. Jakarta: Puspa Swara.
- Soetomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat. Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Spradley, J.P. (1980). *The Participation Observation*. New York: Reinhart & Winston.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Wirutomo, P dkk. (2012). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Parktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

PEDOMAN BAGI PENULIS

Redaksi menerima kiriman artikel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Artikel berupa hasil penelitian lapangan, bidang kesejahteraan sosial maksimal 3 tahun terakhir, dan belum pernah dipublikasikan oleh media lain.
2. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 12 poin, 1,5 spasi, 15 - 25 halaman (A4), dan diserahkan dalam bentuk *soft copy* ke www.ejournal.kemsos.go.id
3. Sistematika artikel disusun tanpa penomoran sub judul (lihat *journal template*), dengan urutan sebagai berikut:
 - a). Judul (huruf besar) dan nama penulis (tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel), disertai lembaga, alamat dan email penulis. Jika penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan adalah nama penulis utama, nama penulis-penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah (dengan melampirkan identitas penulis);
 - b). Abstrak terdiri dari 150 - 200 kata, huruf Times New Roman dalam 1 (satu) paragraf berisi tujuan, metode, hasil penelitian, dan Kata kunci (*keywords*) maksimal 3 kata.
 - c). Pendahuluan (huruf besar); berisi narasi tentang latar belakang, sedikit tinjauan daftar pustaka, tujuan penelitian, dan metode;
 - d). Hasil dan Pembahasan (huruf besar);
 - e). Kesimpulan, Saran, dan Ucapan Terima Kasih;
 - f). Daftar pustaka (huruf besar): Berasal dari Jurnal (diutamakan Jurnal Kesejahteraan Sosial/Pekerja Sosial), hasil-hasil penelitian, website, buku.
4. Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris
5. Kutipan yang langsung dan panjang (lebih dari tiga baris) diketik dengan jarak baris satu dengan bentuk indented style (bentuk berinden). Semua kutipan dan rujukan yang digunakan oleh penulis harus tercantum dalam daftar pustaka.
6. Penggunaan singkatan diperbolehkan, tetapi harus dituliskan secara lengkap pada saat pertama kali disebutkan lalu dibubuhkan singkatannya dalam kurung. Istilah/kata asing atau daerah ditulis dengan *Italic* (dimiringkan). Simbol/lambang ditulis dengan jelas dan dapat dibedakan, seperti penggunaan angka 1 dan huruf I (juga angka 0 dan huruf O).
7. Tabel dan judul tabel ditulis dengan Times New Roman berukuran 10. Penomoran tabel menggunakan angka Arab (ikuti format APA).
8. Penulisan daftar pustaka mengikuti format APA (*American Psychological Association*). Daftar pustaka sedapat mungkin menggunakan sumber primer (buku atau jurnal), diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama keluarga/penulis. Minimal 80% rujukan berasal dari sumber yang up to date (diterbitkan tidak lebih dari 10 tahun terakhir). Rujukan dari internet mencantumkan tanggal diakses.
 - a) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku dengan pengarang tunggal:
Arikunto, S. (2005). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
 - b) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku dengan 2 pengarang:
Wijaya, C. & Rusyan, T. (1992). Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
 - c) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku lebih dari 2 pengarang:
Suharto, E., Suradi, Luhpuri, D., Sudrajat, A., Koswara, A., Marbun, J., Masngudin & Sabeni. (2003). Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial, Studi Kasus Rumah Tangga Miskin Indonesia. Bandung: STKS Bandung Press.
 - d) Bila daftar pustaka dirujuk dari jurnal:
Mujiyadi, B & Gunawan, (2000). Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Suatu Kajian terhadap Masyarakat di Sekitar Kawasan Industri, Informasi Vol.5 No. 1, Januari 2000. Jakarta: Balitbang Depsos RI,
 - e) Bila daftar pustaka dirujuk dari website:
Hamidah, (2000). Dampak Pelecehan Seksual, <http://Viking-Trisna.Blogspot.com/2010/04/Dampak-Pelecehan-seksual.html>, diakses 23 Juli 2012
 - f) Bila daftar daftar pustaka dirujuk dari Lembaga:
Kementerian Sosial RI. (2000). Pedoman Panti Sosial Bina Remaja, Jakarta: Direktorat Rehsos
 - g) Bila daftar pustaka dirujuk dari media massa:
Surbakti R. (2012). Otonomi daerah dari Presiden, Kompas 31 Juli 2012:6
 - h) Bila daftar daftar pustaka dirujuk dari Undang-Undang:
Republik Indonesia, (2002). Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Kementerian Sosial

